

**IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BADAN GIZI NASIONAL
NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS PERSPEKIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD IMRON

210203110080



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BADAN GIZI NASIONAL
NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS PERSPEKIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

OLEH:

MUHAMMAD IMRON

NIM 210203110080



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BADAN GIZI NASIONAL
NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS PERSPEKIF MAQASHID SYARIAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Desember 2025

Penulis,



The signature is written in black ink over a red circular official stamp. To the left of the signature is a vertical barcode stamp with the text 'METERAL TEMPEL' and 'AACAMX039491886'.

Muhammad Imron
NIM 210203110080

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MUHAMMAD IMRON, NIM. 210203110080, Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PERSPEKIF MAQASHID SYARIAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan penguji.

Malang, 4 Desember 2025

Ketua Prodi

Hukum Tata Negara

(*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Nur Jannani S.H., M.H

NIP. 198110082015032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

**KETERANGAN
PENGESEAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD IMRON
NIM : 210203110080
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 1 Desember 2025
Dosen Pembimbing,

Nur Jannani S.H.I., M.H
NIP. 198110082015032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website <http://syariahiainmalang.ac.id> E-mail syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : MUHAMMAD IMRON
NIM : 210203110080
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Nur Jannani S.HI., M.H
Judul Skripsi : Implementasi Surat Keputusan Badan Gizi Nasional
Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program
Makan Bergizi Gratis Perspektif Maqashid Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 24 Januari 2025	Membahas fokus isu Hukum	
2	Jum'at, 7 Februari 2025	ACC Judul	
3	Jum'at, 11 April 2025	Pemantapan Judul dan Rumusan Masalah	
4	Selasa, 3 Juni 2025	ACC Seminar Proposal	
5	Jum'at, 27 Juni 2025	Pemantapan kembali judul skripsi pasca Sempro dan fokus penelitian	
6	Selasa, 1 Juli 2025	Revisi Bab II terkait penambahan penelitian terdahulu	
7	Selasa, 8 Juli 2023	Konsultasi Bab IV Pembahasan	
8	Jumat, 24 Oktober 2025	Revisi Bab IV dan Konsultasi Bab V	
9	Selasa, 18 November 2025	Revisi Bab V	
10	Selasa, 2 Desember 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 1 Desember 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Musleh Harry, S.H, M.Hum.
NIP 196807101999031002


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Imron, NIM 210203110080, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BADAN GIZI NASIONAL
NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS PERSPEKIF MAQASHID SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jum'at, 12 Desember 2025. Dengan Penguji:

1. **Imam Sukadi, S.H., M.H.**
NIP. 198612112023211023

()
Ketua

2. **Nur Jannani, S.H., M.H.**
NIP. 198110082015032002

()
Sekretaris

3. **Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.**
NIP. 196807101999031002

()
Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 198108261998032002

MOTTO

"Makan sehat hari ini, untuk generasi emas Indonesia di masa depan."

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama.”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis Perspektif Maqashid Syariah” Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nur Jannani S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan dalam memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Kebijakan dan kesabaran Ibu sangat membantu penulis dalam melewati setiap tahapan penelitian hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Tanpa bimbingan dan motivasi dari Ibu, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Abdul Kadir, S.HI., M.H., sebagai dosen wali yang telah senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi selama masa studi saya. Arahan dan perhatian Bapak sangat berarti dalam membantu saya melewati berbagai tantangan akademik hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga bimbingan yang Bapak berikan menjadi amal jariyah dan manfaat bagi saya maupun mahasiswa lainnya.
6. Segenap Dosen Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sangat menghargai waktu, perhatian, dan masukan berharga yang telah diberikan selama proses ujian.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap pegawai, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan.
8. Kedua orang tua tersayang Bapak Supan dan Ibu Sunik terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun ayah dan Ibu tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial,

serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. terimakasih untuk semua uang yang dikeluarkan untuk Pendidikan penulis, baju yang nyaman, makanan yang sesuai selera, tempat tinggal yang aman, dan masih banyak kebahagiaan yang telah diusahakan yang tidak bisa disebutkan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Ayah dan Ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak laki-laki bungsunya ini menyandang gelar Sarjana Hukum seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang. Teruntuk ayah semoga Allah SWT menempatkan ayah ditempat terbaik di-sisiNya.

9. Kepada kakak penulis Roby Candra Kurniawan dan Luluk Tri Agustin, terimakasih sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk adikmu ini secara moril maupun materil dan juga motivasi dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sampai sarjana.
10. Kepada Bapak Syamsudin Duka S.Sos selaku Kepala SPPG Wonocolo, Fadhilah Munawaroh selaku Kepala SPPG Rungkut, dan Dra. Asmiati, M.Pd selaku kepala sekolah MTSN 3 Surabaya. Penulis ucapkan terimakasih telah telah memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
11. Kepada seluruh teman-teman HTN angkatan 21 yang telah membersamai penulis selama masa perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan semua pihak yang turut andil dalam membantu penulis dari awal perkuliahan hingga tuntasnya tugas akhir yang dikerjakan oleh penulis.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 4 Desember 2025

Muhammad Imron
NIM.210203110080

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)

			bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	16
F. Definisi Operasional.....	16
G. Sistematika Kepenulisan	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kerangka Teori.....	46
1. Teori Good Governance	46
3. <i>Maqashid Syariah</i>	54
BAB III	64
METODE PENELITIAN.....	64

A. Jenis Penelitian.....	64
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Lokasi Penelitian.....	65
D. Jenis dan Sumber Data	66
E. Metode Pengumpulan data	68
F. Teknik Analisis Data.....	71
BAB IV	72
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Objek Penelitian	72
1. Profil SPPG Wonocolo	72
2. Profil SPPG Rungkut	73
3. Profil MTSN 3 Surabaya.....	74
B. Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya.....	75
C. Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Prinsip-Prinsip <i>Maqashid</i> <i>Syari'ah</i> dalam hukum Islam	131
BAB V.....	142
PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	152

ABSTRAK

Muhammad Imron. NIM 210203110080. **Implementasi Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis Perspektif Maqashid Syariah** Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Nur Jannani S.H.I., M.H.

Kata Kunci : Implementasi, Makan Bergizi Gratis, Maqashid Syariah

Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan makanan bergizi secara cuma-cuma bagi siswa sekolah, ibu hamil, dan menyusui, guna mengatasi stunting, gizi buruk, serta meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut di SPPG Rungkut dan Wonocolo serta kesesuaiannya dengan prinsip *Maqashid Syariah*.

Jenis penelitian yaitu *yuridis* empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini berfokus pada implementasi program MBG oleh SPPG Rungkut dan SPPG Wonocolo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MBG dan perspektif *maqashid syari'ah*. Sumber data terdiri dari, sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan kepala SPPG, kepala sekolah, dan siswa. Data sekunder berasal dari SK BGN No.63 tahun 2015, buku, jurnal, dan Peraturan Perundang-Undangan. Data tersier berasal dari website dan media online lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program MBG oleh SPPG Rungkut dan Wonocolo telah sesuai SK BGN Nomor 63 Tahun 2025 terkait petunjuk teknis, mulai dari pendirian SPPG sampai penyaluran program MBG ke penerima manfaat. Selain itu, implmentasi program MBG tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip teori *good governance*. Namun, masih terdapat tantangan yaitu penyesuaian menu MBG supaya tidak membosankan dan memastikan makanan layak dikonsumsi sebelum diterima oleh penerima manfaat. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* menunjukkan bahwa pengimplementasian program MBG selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* yaitu *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-mal*.

ABSTRACT

Muhammad Imron. Student ID Number 210203110080. Implementation of National Nutrition Agency Decree Number 63 of 2025 Concerning Technical Guidelines for the Free Nutritious Meals Program from a Maqashid Sharia Perspective. Thesis. Constitutional Law Study Program. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Nur Jannani, S.H.I., M.H.

Keywords: Implementation, Free Nutritious Meals, Maqashid Syariah

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is an initiative of the Indonesian government under President Prabowo Subianto to provide free nutritious meals to school children, pregnant women, and nursing mothers in order to overcome stunting, malnutrition, and improve the quality of human resources towards Indonesia Emas 2045. This study aims to analyze the implementation of this policy at SPPG Rungkut and Wonocolo and its conformity with the principles of Maqashid Syariah.

This research is a legal empirical study with a sociological approach. It focuses on the implementation of the MBG program by SPPG Rungkut and SPPG Wonocolo based on the Decree (SK) of the National Nutrition Agency (BGN) Number 63 of 2025 concerning Technical Guidelines for the Implementation of MBG and the perspective of maqashid syari'ah. The data sources consist of primary data obtained from interviews with the heads of SPPG, school principals, and students. Secondary data comes from BGN Decree No. 63 of 2015, books, journals, and laws and regulations. Tertiary data comes from websites and other online media. The data collection methods used were interviews, observation, and documentation.

The results of this study indicate that the implementation of the MBG program by SPPG Rungkut and Wonocolo is in accordance with BGN Decree No. 63 of 2025 regarding technical guidelines, from the establishment of SPPG to the distribution of the MBG program to beneficiaries. In addition, the implementation of the MBG program is also in accordance with the principles of good governance theory. However, there are still challenges, namely adjusting the MBG menu so that it is not boring and ensuring that the food is fit for consumption before it is received by the beneficiaries. A review of Maqashid Syari'ah shows that the implementation of the MBG program is in line with the principles of maqashid syari'ah, namely *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-mal*.

ملخص

محمد إمرؤن. رقم الطالب 210203110080. تنفيذ مرسوم الوكالة الوطنية للتغذية رقم 63 لعام 2025 بشأن المبادئ التوجيهية الفنية لبرنامج الوجبات الغذائية المجانية من منظور مقاصد الشريعة. أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري. كلية الشريعة، جامعة مولانا S.H.I.، M.H. مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: نور جاناني،

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، الوجبات الغذائية المجانية، مقاصد الشريعة
هو مبادرة من الحكومة الإندونيسية في عهد (MBG) برنامج الوجبات الغذائية المجانية الرئيس براوو سوبيانتو لتوفير وجبات غذائية مجانية لأطفال المدارس والنساء الحوامل والمرضعات من أجل مكافحة التقزم وسوء التغذية وتحسين جودة الموارد البشرية نحو ومدى توافرها إندونيسيا إيماس 2045. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ هذه السياسة في مع مبادئ مقاصد الشريعة

هذه الدراسة هي دراسة قانونية تجريبية ذات نهج سوسيولوجي. وهي تركز على تنفيذ رقم 63 لعام (BGN) استنادًا إلى مرسوم الوكالة الوطنية للتغذية من قبل MBG برنامج ومنظور مقاصد الشريعة. تتكون MBG 2025 بشأن المبادئ التوجيهية الفنية لتنفيذ مصادر البيانات من البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات مع رؤساء رقم 63 لعام BGN ومديري المدارس والطلاب. تأتي البيانات الثانوية من مرسوم SPPG 2015 والكتب والمجلات والقوانين واللوائح. تأتي البيانات الثالثة من مواقع الويب ووسائل

الإعلام الأخرى عبر الإنترنت. كانت طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والملاحظة والتوثيق

رقم BGN يتوافق مع مرسوم من قبل MBG تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ برنامج MBG وحتى توزيع برنامج SPPG 63 لعام 2025 بشأن الإرشادات الفنية، بدءًا من إنشاء أيضًا مع مبادئ نظرية MBG على المستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق تنفيذ برنامج بحيث لا MBG الحوكمة الرشيدة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، وهي تعديل قائمة تكون مملة وضمان أن الطعام صالح للاستهلاك قبل أن يستلمه المستفيدون. تظهر مراجعة يتماشى مع مبادئ مقاصد الشريعة، وهي حفظ MBG مقاصد الشريعة أن تنفيذ برنامج النفس وحفظ العقل وحفظ المال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”.¹ Jaminan gizi yang memadai merupakan bagian tak terpisahkan dari hak atas kesehatan, karena asupan gizi yang cukup dan seimbang sangat menentukan kualitas hidup, pertumbuhan, dan perkembangan manusia sejak dalam kandungan hingga dewasa. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi melalui berbagai program, kebijakan, dan regulasi yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dengan demikian, pemenuhan hak atas gizi yang layak bukan hanya merupakan amanat konstitusi, tetapi juga investasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga pada faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan kognitif dan fisik siswa. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan adalah kecukupan gizi

¹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2)

anak sekolah, yang berperan dalam meningkatkan daya pikir, tamina, dan ketahanan belajar mereka.² Asupan gizi yang memadai memungkinkan siswa untuk lebih fokus dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat menyerap materi dengan lebih efektif. Selain itu, gizi yang baik juga berdampak pada perkembangan fisik yang optimal, yang pada gilirannya mendukung aktivitas motorik serta interaksi sosial di lingkungan sekolah. Namun, di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, ketimpangan akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan.³

Presiden Republik Indonesia memiliki misi yang bernama Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salah satu isi dari Astacita Tersebut adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) maka pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025. Program ini mulai dilaksanakan secara bertahap pada Senin,

² Meilita M Rawung, Herlina I S Wungouw, dan Damajanty H C Pangemanan, "Hubungan Status Gizi dengan Prestasi Belajar Siswa SD Katolik St Fransiskus Xaverius Kakaskasen Kota Tomohon,".

³ Rifiy Qomarrullah dkk., "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 2 (2025): 130–37, <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i2.660>.

6 Januari 2025, melalui koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).⁴

Latar belakang diadakan program makan bergizi gratis menurut Prabowo Subianto yaitu 25% anak di Indonesia tidak makan bergizi setiap hari dan untuk menghilangkan kelaparan tanpa membedakan status ekonomi anak-anak di Indonesia. Berdasarkan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Strategi nasional program PPS menggunakan kerangka penyebab masalah gizi, yaitu kerangka konseptual faktor penentu gizi anak, penyebab utama malnutrisi, dan faktor penyebab masalah gizi konteks Indonesia.⁵

Pelaksanaan program disesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah, memastikan distribusi berjalan lancar sesuai kebutuhan. Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) juta penerima manfaat sepanjang tahun ini⁶, mencakup berbagai kelompok prioritas. Penerima manfaat meliputi peserta didik dari jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, hingga Pendidikan Menengah, serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung pencapaian kesejahteraan nasional.⁷

⁴“detail news,” diakses 20 Mei 2025, <https://www.bgn.go.id/news/artikel/bgn-akan-memulai-program-mbg-secara-bertahap>.

⁵CISDI. (2024). Makan Bergizi Gratis : Menilik Tujuan , Anggaran dan Tata Kelola Program. 2023(17), 1–16.

⁶ Kompas Cyber Media, “Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Sasar 20 Juta Penerima,” KOMPAS.com, 6 Januari 2025, <https://health.kompas.com/read/25A06090000568/program-makan-bergizi-gratis-dimulai-sasar-20-juta-penerima>.

⁷ Avrina Dwijayanti, “Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian,” *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 2 (2024): 281–308, <https://doi.org/10.52316/jap.v20i2.435>.

Kebijakan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah merupakan salah satu program sosial yang telah diterapkan di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan gizi siswa, meningkatkan konsentrasi belajar, dan meringankan beban ekonomi orang tua. Program ini dirancang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan malnutrisi yang sering dialami siswa dari keluarga kurang mampu, sekaligus untuk mendukung pencapaian target pendidikan nasional.⁸

Implementasi kebijakan makan bergizi gratis ini tidak hanya membawa manfaat praktis bagi siswa dan keluarga mereka, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya. Program ini menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan sosial sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar siswa. Namun, untuk memahami lebih dalam dampak dan legitimasi kebijakan ini, diperlukan analisis yang menyentuh aspek filosofis dan normatif, termasuk bagaimana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan⁹ memperkuat prinsip bahwa pemenuhan pangan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, dan menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya sebatas ketersediaan bahan makanan, tetapi juga harus mencakup aspek keberagaman, kecukupan, keamanan, dan kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan.

⁸ Anisa, S. K., Rohim, A. N., & Hasbi, D. S. (2021). Analisis pendistribusian ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di yayasan Indonesia mulia Bekasi. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(2), 1-28.

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227

Selain itu, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi¹⁰ menjadi pijakan hukum penting dalam memperkuat upaya pemenuhan hak gizi masyarakat. Pada Pasal 37, ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan kebutuhan gizi bagi seluruh masyarakat, melalui program terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Regulasi ini juga mengamanatkan penyelenggaraan intervensi gizi bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, balita, dan ibu hamil, sebagai bagian integral dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi nasional.¹¹ Ketentuan ini kemudian menjadi latar belakang lahirnya kebijakan lanjutan, yakni Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang hadir sebagai jawaban atas kebutuhan lembaga yang lebih fokus, terstruktur, dan bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan program gizi nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis.¹²

Pasal 5 ayat (1a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Berbunyi¹³ : “Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:

¹⁰ Lihat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60

¹¹ Indonesia, N. K., & RI, H. A. M. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. *Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*.

¹² Ramadhan, A. M., Santoso, M. P. T., & Gustianti, N. A. (2024). Proses Sekuritisasi Isu Keamanan Non Tradisional dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Narkoba Internasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18495-18511.

¹³ Lihat Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173

- a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, Pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, Pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
- b. anak usia di bawah lima tahun;
- c. ibu hamil; dan
- d. ibu menyusui.

Namun Pada Implementasinya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah Indonesia untuk anak sekolah menghadapi berbagai kasus dan tantangan di lapangan. Dikutip dari CNN Indonesia menjelaskan bahwa sejumlah insiden keracunan makanan telah terjadi, seperti di SDN 4 Wonorejo, Jawa Tengah menjadi sorotan setelah Kepala Sekolah, dan dua siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis. Setelah makanan dibagikan ke siswa, beberapa murid mengeluhkan daging ayam yang berlendir dan kuah soto yang sudah asam. Akibatnya, dua siswa mengalami sakit perut dan harus dilarikan ke fasilitas kesehatan. Setelah dilakukan penelusuran, diduga keracunan berasal dari bahan makanan yang tidak segar, seperti daging ayam dan melon busuk, serta ditemukan pula buah pisang yang kematangan dan sebagian membusuk dalam paket MBG.¹⁴

Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjadi salah satu insiden serius yang terjadi

¹⁴ “Kepala Sekolah dan Dua Siswa di Karanganyar Diduga Keracunan MBG,” diakses 6 Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250429174012-20-1223999/kepala-sekolah-dan-dua-siswa-di-karanganyar-diduga-keracunan-mbg>.

pada April 2025, di mana sebanyak 165 siswa dari dua sekolah, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi paket makanan MBG yang terdiri dari nasi, mi goreng, ayam suwir, tempe mendoan, dan semangka. Para siswa mengalami muntah, pusing, diare, dan mual beberapa jam setelah makan, sehingga 92 di antaranya harus dirawat di rumah sakit seperti RSUD Sayang Cianjur dan RS Bhayangkara, serta beberapa puskesmas dan klinik, sementara sisanya menjalani perawatan di rumah. Pihak kepolisian setempat melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang pengelola dapur penyedia makanan MBG, termasuk penanggung jawab CV, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), staf, tim pengemas, dan kurir pengantar makanan, serta mengambil sampel makanan untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat guna memastikan penyebab keracunan.¹⁵

Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tepatnya di SDN 33 Kasipute pada Rabu, 23 April 2025. Belasan murid muntah setelah mencium aroma amis dari paket MBG yang berisi nasi, chicken karaage, tahu goreng, dan sayur sop. Kepala sekolah menyebut aroma tak sedap berasal dari ayam krispi yang sudah tidak layak konsumsi. Kepolisian mengonfirmasi ada 53 dari 1.026 paket makanan yang tidak segar.¹⁶ Sementara program MBG di

¹⁵ Fabio Maria Lopes Costa- fabio.lopes@kompas.com, “Jumlah Siswa Diduga Keracunan Paket MBG di Cianjur Jadi 165 Orang,” Kompas.id, 26 April 2025, <https://www.kompas.id/artikel/jumlah-siswa-diduga-keracunan-paket-mbg-di-cianjur-jadi-165-orang>.

¹⁶ “Sejumlah Daerah yang Laporkan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis | tempo.co,” Tempo, 25 April 2025, <https://www.tempo.co/politik/sejumlah-daerah-yang-laporkan-kasus-keracunan-makan-bergizi-gratis-1247446>.

Kabupaten Sumenep dihentikan sementara pada Februari 2025. Penghentian ini disebabkan oleh beban kerja dan besaran upah yang tidak sebanding bagi petugas dapur. Selain itu, terdapat dugaan monopoli pembelian peralatan dapur oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sebanyak 2.965 siswa kehilangan akses terhadap makanan bergizi gratis akibat penghentian ini.¹⁷

Selain masalah kesehatan, di Jakarta Timur, sejumlah sekolah melaporkan keterlambatan distribusi makanan hingga dua jam, sehingga siswa harus menunggu dalam kondisi lapar dan proses belajar terganggu. Beberapa sekolah di wilayah ini melaporkan bahwa pengiriman makanan sering terlambat hingga dua jam, sehingga siswa harus menunggu dalam kondisi lapar yang mengganggu proses belajar.¹⁸

Sedangkan di Surabaya permasalahan terkait Makanan Bergizi Gratis yang diberikan kepada siswa di SMPN 13 Surabaya ditemukan dalam keadaan basi, khususnya pada buah melon dan beberapa jenis sayur yang sudah mengeluarkan bau asam dan tidak layak konsumsi. Temuan ini terungkap saat Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak pada 25 Februari 2025 dan mewawancarai sejumlah siswa mengaku menerima buah dan sayur yang sudah basi. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran terkait higiene dan pengawasan program Kasus ini menjadi catatan penting bagi

¹⁷ Riana Agustian “Deretan Kasus Program Makan Siang Bergizi Gratis: Menuai Masalah Hingga Dihentikan di Sejumlah Wilayah,” Olenka, 25 April 2025, <https://olenka.id/deretan-kasus-program-makan-siang-bergizi-gratis-menuai-masalah-hingga-dihentikan-di-sejumlah-wilayah>.

¹⁸ Mario Christian Sumampaw “Guru Sekolah Was-was Pendistribusian Menu Makan Bergizi Hambat Proses Belajar Siswa,” Tribunnews.com, 10 Mei 2025, <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2025/01/07/guru-sekolah-was-was-pendistribusian-menu-makan-bergizi-hambat-proses-belajar-siswa>.

pemerintah dan penyelenggara MBG agar memperketat pengawasan mutu dan distribusi makanan demi menjaga kesehatan dan kepercayaan siswa terhadap program ini.

Selain itu program makan bergizi gratis ini dapat meresahkan para pedagang kecil dan juga kantin sekolah. Karena dengan adanya program makan bergizi gratis ini para pedagang kantin menjadi sepi dan berpotensi dapat menurunkan pendapatan pedagang kantin dan juga pedagang kaki lima.¹⁹ Selain itu hingga awal April 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya baru diuji coba di 38 sekolah, sehingga pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah kota. Keterlambatan ini terutama disebabkan oleh proses verifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap penyedia makanan, khususnya dapur umum yang harus memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) ketat yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini telah ditetapkan alokasi budget makan bergizi gratis sebesar Rp 10ribu per anak setiap harinya, muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai kecukupan dana tersebut untuk benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal.²⁰ Di sisi lain, kota Surabaya menjadi salah satu kota dengan kebutuhan harga bahan pokok yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur.

¹⁹ Riski, Petrus. "Pemerintah Diminta Libatkan Kantin Sekolah dan UMKM untuk Program Makan Bergizi Gratis" Artikel VOA Indonesia Diakses 31 Januari 2025 selengkapnya <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-diminta-libatkan-kantin-sekolah-dan-umkm-untuk-program-makan-bergizi-gratis/7935967.html>

²⁰ Dwijayanti, Avrina. "Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian." *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 2 (2024): 281-308.

Surabaya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan wilayah metropolitan mengalami kecenderungan harga bahan pangan yang lebih mahal akibat tingginya permintaan, biaya distribusi yang kompleks, serta keterbatasan lahan produksi local.²¹

Tiap lembaga pemerintah tentunya mempunyai sejumlah tujuan dimana hendak diraih melalui kualitas misalnya peningkatan sumber daya manusia (SDM), karena hal tersebut tentunya akan membawa perubahan pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Pada penerapan pelayanan administrasi terdapat good governance, karena good governance itu sendiri berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan.

Melalui implementasi konsep good governance menjadi sebuah landasan dari berjalannya pemerintahan dimana berorientasi membentuk pemerintah yang adil kepada masyarakat guna memberi layanan. Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi implementasi prinsip good governance sangatlah penting guna menambah performa aparatur pemerintahan. Implementasi prinsip Good Governance merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik²².

Untuk merealisasikan praktik good governance ini, pemerintah perlu menggunakan rencana yang jelas. Karena kompleksitas dan luasnya masalah,

²¹ Disperindag Jatim. (2024). *Laporan Pemantauan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur Tahun 2024*. Surabaya: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

²² miftia Khodiqotul Istiqomah, *Skripsi Analisis Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Desa Banjarsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga* (UniversitasTidar,2024),
//Repositori.Untidar.Ac.Id%2Findex.Php%3Fp%3Dshow_Detail%26id%3D16807%26keywords%3D.

serta sumber daya dan kemampuan pemerintah yang terbatas, keputusan strategis harus dibuat agar pemerintahan yang efektif dapat dimulai. Salah satu cara untuk mengembangkan good governance di Indonesia yaitu dengan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui implementasi prinsip-prinsip good governance.

Kebijakan Program MBG ini dapat dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syariah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.²³ *Maqashid syariah* merupakan tujuan utama syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan melindungi lima elemen pokok kehidupan (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).²⁴ Menurut Imam Asy-Syatibi, *maqashid syariah* bertujuan untuk melindungi lima hal pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu *maqashid syariah* merupakan tujuan utama dari ditetapkannya syariat, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan.

²³ Khumairoh A. (2021) *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kehidupan Istri Kedua Pasca Perceraian Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak Jawa Tengah)*“5. BAB II.pdf,” t.t., diakses 22 Mei 2025, <http://repository.iainkudus.ac.id/7047/5/5.%20BAB%20II.pdf>.

²⁴ Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media; 43.

Hasil Pra-research dengan kepala SPPG Rungkut dengan Ibu Fadilah Munawaroh menunjukkan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan. Kelompok tersebut meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu, dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Selain itu, Program MBG juga bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. Menyediakan makanan sehat di sekolah diharapkan dapat mendukung konsentrasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.²⁵

Namun pada implementasinya di Surabaya masih mengalami tantangan dan kendala dalam melaksanakan Program MBG ini, Meskipun Badan Gizi Nasional telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis akan tetapi masih banyak permasalahan yang ada salah satunya yaitu terkait adanya beberapa siswa dan kepala sekolah yang keracunan akibat mengkonsumsi MBG ini

²⁵ Fadilah Munawaroh, Wawancara, (Surabaya 21 Mei 2025)

Masalah ini menggambarkan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan implementasi dari Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis sehingga terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari Program MBG. Jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah*, Program ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam mencapai keadilan distribusi dan memastikan manfaat yang merata. Dalam kerangka masalah, kebijakan ini seharusnya menjadi instrumen yang menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*), yaitu memberikan manfaat kepada semua siswa dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi sehingga selaras dengan prinsip *hifzh al-nafs*, yang menekankan perlindungan terhadap hak hidup dan kesehatan, serta *hifzh al-‘aql*, yang mendukung perkembangan intelektual melalui penyediaan kebutuhan dasar.²⁶

Penelitian mengenai kebijakan makan bergizi gratis ini menarik karena mampu menghubungkan aspek kebijakan publik dengan prinsip hukum Islam yang kontekstual, khususnya melalui pendekatan Maqashid Syariah. Dengan mengkaji kebijakan ini dalam kerangka hukum Islam, penelitian tidak hanya menawarkan perspektif baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat diaplikasikan dalam kebijakan publik.²⁷ Di sisi

²⁶ Rohman, A. (2022). Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban dalam Islam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 6(1), 45–58.

²⁷ Maheran, S., Saiin, A., April, M., & Rizki, M. (2022). Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(01), 49-59.

lain apakah program Makan Bergizi Gratis ini dapat dilakukan dalam jangka Panjang karena mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang dialami dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis ini. Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan **“IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PERSPEKIF MAQASHID SYARIAH”**

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini menjadi lebih terarah dan jelas maka penulis memberikan Batasan masalah pada penulisan skripsi ini yaitu penelitian ini berfokuskan terkait Pelaksanaan Operasional dan Bahan Pangan dalam BAB 4 berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis dengan melakukan Penelitian di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Rungkut dan Wonocolo

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program makan bergizi gratis berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis di Surabaya?
2. Apakah implementasi Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program makan bergizi gratis di Surabaya
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu gizi, kesehatan masyarakat, dan hukum Islam, khususnya dalam konteks *maqashid syariah*. Dengan menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai pengaturan gizi nasional dan dampaknya terhadap Masyarakat. Penelitian ini dapat mengembangkan pemahaman tentang bagaimana prinsip *maqashid syariah*, yang menekankan pada perlindungan jiwa, akal, dan harta, dapat diterapkan dalam kebijakan publik. Hal ini penting untuk menunjukkan relevansi prinsip-prinsip *syariah* dalam konteks pembangunan kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Badan Gizi Nasional dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui program makan bergizi gratis. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan efektivitasnya. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pihak SPPG untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program makan bergizi gratis, sehingga lebih efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini merupakan penjelasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menghindari kesalahan interpretasi.²⁸ Variabel dalam penelitian ini merujuk pada konsep-konsep utama yang dianalisis secara spesifik dan dijelaskan secara rinci agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Berikut adalah definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini:

²⁸ Anshori, M., & Iswati, S. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif: edisi 1*. Airlangga University Press.

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan untuk melaksanakan sebuah keputusan yang sudah ditetapkan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.²⁹ Implementasi kebijakan dalam penelitian ini merujuk pada proses penerapan Program Makan Bergizi Gratis dari tahap perencanaan hingga evaluasi.³⁰ Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Implementasi kebijakan mencakup pengalokasian anggaran, pengadaan bahan pangan, distribusi makanan, serta pengawasan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Efektivitas implementasi kebijakan ini bergantung pada faktor koordinasi, sumber daya, serta kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

2. Surat Keputusan

Surat keputusan adalah dokumen tertulis yang berisi keputusan resmi dari pihak berwenang dalam suatu organisasi atau lembaga. Keputusan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah, atau menghapus

²⁹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2020).

³⁰ Askandary, A. I., Rahman, A. Z., & Hanani, R. (2024). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik Melalui Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Dalam Upaya Penurunan Stunting Di Kelurahan Bandarahajo, Kecamatan Semarang Utara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-17.

hubungan hukum yang ada.³¹ Dalam konteks penelitian ini, Surat Keputusan merujuk pada Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk teknis yang mengatur proses pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

3. Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan gizi nasional. BGN memiliki peran strategis dalam menentukan standar gizi nasional, mengawasi pelaksanaan program pangan dan gizi, serta melakukan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.³² Dalam Program Makan Bergizi Gratis, BGN bertindak sebagai regulator dan pengawas utama dalam memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini diselenggarakan melalui pemberian makanan sehat dan bergizi secara gratis yang memenuhi standar gizi

³¹ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 141.

³² Andriyani, A., Baroroh Barir, S. K. M., Gz, M., Musiana, S. H. I., MM, M. K., Irianto, S. K. M., ... & Gz, M. (2024). *Kebijakan Dan Manajemen Program Gizi Masyarakat*. Cendikia mulia mandiri.

seimbang. sejak awal diumumkan. Program ini dikenal sebagai "program makan siang gratis", namun kemudian diperluas menjadi pemberian makanan bergizi gratis.³³ Perubahan ini didasarkan pada data dari Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menunjukkan bahwa 41 persen siswa di Indonesia mengalami kelaparan saat belajar di sekolah, yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan mereka.³⁴

5. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai landasan dalam menilai kebijakan publik, termasuk dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis.³⁵ Konsep ini terdiri dari lima prinsip utama, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks kebijakan gizi, *Maqashid Syariah* digunakan sebagai pendekatan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

³³ Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 300-311.

³⁴ Ajeng Atikah Merlinda dan Yusmar Yusuf, "Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Tinjauan Dari Perspektif Sosiologi Pendidikan," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 2, <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i2.1360>.

³⁵ Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6).

G. Sistematika Kepenulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur penyusunan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi dan relevansi penelitian, batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik dari sisi akademis maupun praktis, definisi operasional yang mendeskripsikan variabel penelitian, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum mengenai struktur laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, mencakup penelitian terdahulu untuk melihat perbandingan dengan penelitian lain, kerangka teori yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan, serta landasan konseptual yang mendukung penelitian. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperkuat argumentasi teoritis dalam penelitian ini.

BAB III HASIL METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang diterapkan, lokasi penelitian yang menjadi tempat pengumpulan data, sumber data yang digunakan baik primer maupun sekunder, metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi,

serta teknik analisis data yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan, serta analisis terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan prinsip maqashid syariah dan good governance. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teori yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan, sementara saran ditujukan kepada pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas program.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mengulas penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan makan bergizi gratis dan perspektif maqashid syariah dalam kebijakan publik. Penelitian terdahulu mencakup jurnal akademik dan artikel ilmiah lainnya yang membahas aspek kebijakan gizi nasional, efektivitas program makan bergizi gratis, serta relevansinya dengan maqashid syariah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan menunjukkan keunikan serta perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, Skripsi karya, Andi Asfiyanti Cendrakasih (2023) dengan judul **“Implementasi Peraturan Presiden (Pp) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Dinas Kesehatan Kab. Wajo)”**.³⁶ Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Wajo sudah berjalan dengan baik di mana dinas kesehatan kabupaten Wajo terus berupaya untuk mengimplementasikan program percepatan penurunan stunting mereka membagikan tablet tambah darah,

³⁶Cendrakasih, Andi Asfiyanti “Implementasi Peraturan Presiden (Pp) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Dinas Kesehatan Kab. Wajo)”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2023). <http://repository.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/25459>

mendapatkan imunisasi, mendapatkan makanan tambahan, memberikan ASI hingga usia 24 bulan, mendapatkan obat cacing, memberikan imunisasi dasar lengkap kepada anak, pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil, 1000 HPK (1000 Hari Pertama Kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan (270 Hari) sampai dengan anak berusia 2 tahun (730 Hari)), pembinaan ASI eksklusif 0-6 bulan dan sanitasi lingkungan yang sehat. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Asfianti lebih bersifat kajian regulasi dan efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting secara umum dengan pendekatan fiqh siyasah yang lebih teoritik dan konstitusional. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kebijakan yang lebih kontemporer yakni Program Makan Bergizi Gratis, yang mulai diimplementasikan tahun 2024-2025, serta penerapan perspektif *Maqashid Syariah* yang mengintegrasikan dimensi etika dan nilai Islam dalam evaluasi kebijakan.

Kedua, Jurnal karya M. Mardatillah dkk. (2024) **“Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Studi**

Kasus Di Puskesmas Halong)"³⁷ hasil pembahasan dari penelitian tersebut menunjukkan pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan optimal. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan sudah diterapkan, dan peran pemerintah pusat serta daerah dalam penanggulangan gizi sudah berjalan secara terpadu. Sumber daya manusia pelaksana di Puskesmas juga sudah cukup baik dalam menerapkan program, namun dukungan finansial masih kurang sehingga sosialisasi program belum maksimal. Fasilitas pendukung seperti posyandu tersedia dan membantu meningkatkan partisipasi orang tua dalam pemenuhan gizi anak. Selain itu, koordinasi antara instansi terkait sudah baik dan ada dukungan dari pemerintah desa dan kecamatan. Namun, opini dan pengetahuan publik tentang gizi anak masih rendah, sehingga menjadi kendala dalam implementasi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M. Mardatillah dkk lebih fokus pada implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang penanggulangan masalah gizi anak akibat penyakit, dengan studi kasus di Puskesmas Halong Kabupaten Balangan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif tradisional, yang berupaya memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis tentang pelaksanaan peraturan tersebut dalam konteks penurunan angka stunting dan gizi buruk pada anak. Sedangkan penulis fokusnya pada program makan bergizi gratis

³⁷ Mardatillah, M., Ramona Handayani, and Agus Sya'bani Arlan. "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN MASALAH GIZI BAGI ANAK AKIBAT PENYAKIT (Studi Kasus Di Puskesmas Halong)." *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia* 1, no. 3 (2024): 528-538.

yang baru diimplementasikan pada 2024-2025 serta penerapan perspektif Maqashid Syariah dalam mengkaji kebijakan publik terkait gizi,

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Cindy Destia Cantika (2024) **“Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita Berstatus Gizi Kurang Di Puskesmas Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**³⁸ hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi program perbaikan gizi balita berstatus gizi kurang di Puskesmas Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu belum berjalan secara optimal. Hal ini terbukti dari kurangnya pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan aspek-aspek program. Beberapa kendala utama yang ditemukan adalah kekurangan sumber daya manusia, terutama tenaga ahli gizi yang terbatas, serta sosialisasi program yang telah dilakukan kepada masyarakat belum sepenuhnya efektif sehingga masyarakat kurang menerapkan anjuran program tersebut. Selain itu, terdapat beberapa program yang sudah tidak berjalan lagi, yang menghambat pencapaian tujuan perbaikan gizi balita. Peneliti juga mengidentifikasi bahwa kendala dalam pengorganisasian, kurangnya dukungan dan koordinasi antar pelaksana, serta keterbatasan fasilitas menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program. Meski berbagai upaya dan kegiatan sudah dilakukan, jumlah balita dengan gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Batang Peranap masih meningkat,

³⁸ CANTIKA, CINDY DESTIA. "IMPLEMENTASI PROGRAM PERBAIKAN GIZI BALITA BERSTATUS GIZI KURANG DI PUSKESMAS BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih intensif dan terintegrasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada program yang dilakukan yaitu program MBG ini merupakan langkah pemerintah dalam menanggulangi gizi buruk pada anak, karena pada saat ini pemerintah memfokuskan pada kondisi gizi pada usia rentan dengan meluncurkan Program MBG ini, dan Perbedaan lainnya penulis menggunakan Perspektif *Maqashid Syariah* dalam mengkaji isu hukum islam.

Keempat, Skripsi Karya Marthin Sinaga (2023) **“Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita Di Posyandu Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan”**³⁹ hasil dari pembahasan tersebut ialah Implementasi program perbaikan gizi balita di Posyandu Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan telah berjalan dengan aspek-aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang relatif terpenuhi sesuai teori George C. Edward III. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan signifikan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya posyandu, keterbatasan jumlah fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan posyandu, dan jumlah kader posyandu yang masih sedikit sehingga menghambat kelancaran pelayanan. Program perbaikan gizi yang

³⁹ Sinaga, Marthin. "Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan." PhD diss., Universitas Medan Area, 2023.

dilaksanakan meliputi penimbangan balita secara rutin untuk pemantauan pertumbuhan dan deteksi dini gangguan gizi, pemberian makanan tambahan serta penyuluhan gizi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Skripsi karya Marthin Sinaga Penelitian ini menitikberatkan pada aspek pelaksanaan program serta hambatan yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan fasilitas dan kesadaran masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk menganalisis implementasi program di posyandu. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kebijakan yang lebih kontemporer yakni Program Makan Bergizi Gratis, yang mulai diimplementasikan tahun 2024-2025, serta penerapan perspektif *Maqashid Syariah* yang mengintegrasikan nilai Islam dalam evaluasi kebijakan.

Kelima, Jurnal Karya Eko Eryanto Nugroho, Abd. Mahsyar, Jaelan Usman (2020) **“Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Enrekang”**⁴⁰ hasil pembahasan dari penelitian tersebut adalah Salah satu yang dapat membuat implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai yang diinginkan yaitu adanya faktor pendukung dalam menjalankan sebuah implementasi kebijakan yaitu sumber daya manusia (SDM) salah satu yang sangat penting dan bisa

⁴⁰ Nugroho, Eko Eryanto, Abd Mahsyar, and Jaelan Usman. "Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Enrekang." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 1, no. 2 (2020): 700-714.

dikatakan tidak dapat dilepaskan dari sebuah namanya organisasi baik, institusi maupun dari Perusahaan. Dinas Kesehatan sudah melakukan penangana gizi dari sebuah namanya organisasi baik, institusi maupun dari Perusahaan. Dinas Kesehatan sudah melakukan penangana gizi buruk pada balita dengan malihat apa saja penyebab utama terjadinya kekurangan gizi yaitu pada pola makan, sanitasi, dan pola asuh kemudian memberikan sosialisasi terkait asupan gizi untuk ibu hamil, anak dan remaja putri yang berkerja sama dengan pihak puskesmas dan pihak rumah sakit.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis hanya fokus dengan salah satu kebijakan pemerintah yaitu dengan adanya program Makan Bergizi Gratis dengan menggunakan *Perspektif Maqashid Syariah*.

Keenam, Skripsi karya Syamsul Bahri ZR (2025) dengan judul **“Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar’iyyah)”**⁴¹ hasil pembahasan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang berjalan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan melalui koordinasi awal berdasarkan Petunjuk Teknis. Pelaksanaan menunjukkan kesiapan. Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung ke sekolah. Kemudian Tingkat partisipasi sekolah dalam pelaksanaan program tergolong tinggi.

⁴¹ ZR, Syamsul Bahri. "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar’iyyah)." PhD diss., IAIN Parepare, 2025.

Kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan makanan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kemudian dari perspektif Siyasaḥ Syar'iyah, kebijakan ini merupakan bentuk kemaslahatan umum (masalah 'ammah) yang sah secara syar'i karena bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan generasi muda, mengurangi angka stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga akal (hifz al-'aql).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri ZR menggunakan pendekatan lapangan dengan analisis Siyasaḥ Syariyyah yang menitikberatkan pada aspek hukum tata negara dan implementasi kebijakan makan bergizi gratis secara spesifik di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menyoroti proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program MBG di tingkat sekolah serta keterlibatan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, dan UMKM lokal dalam mendukung program tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada implementasi program makan bergizi gratis di Surabaya menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan penekanan pada integrasi prinsip Maqashid Syariah dan good governance.

Ketujuh, Jurnal oleh Ikka Febryanti dkk (2025) dengan judul **“Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Mbg) (Studi Kasus**

Pada Sdn 3 Kepanjen Kabupaten Malang)”⁴² hasil pembahasan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2025, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian siswa dan perbaikan SDM, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Meskipun belum ada peraturan tertulis khusus mengenai pelaksanaan MBG, pihak sekolah telah berupaya untuk mendukung program ini melalui peran aktif guru dan pengelola. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang adalah kebijakan pemerintah yang jelas dan komitmen terhadap pengentasan malnutrisi, dan responsifnya kebijakan satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang adalah Keterbatasan anggaran yang mempengaruhi penyusunan menu dan distribusi makanan, dan Tata kelola yang kurang optimal di tingkat satuan pendidikan yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ikka Febryanti dkk penelitian di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang lebih berorientasi pada

⁴² Febryanti, Ikka, Indiaty Indiaty, Muhammad Alwiadi Pane, and Pudji Astuti. "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Studi Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang)." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2025): 067-079.

studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang menelaah implementasi kebijakan MBG dari sisi manajemen publik dan administrasi, termasuk aspek kebijakan, tata kelola, dan anggaran di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Penelitian ini menyoroti faktor pendukung dan kendala pelaksanaan program di lapangan, seperti kebijakan yang belum tertulis di tingkat sekolah, peran aktif guru dan pengelola, serta hambatan anggaran dan tata kelola yang memengaruhi kelancaran program. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang menitikberatkan pada bagaimana implementasi program makan bergizi gratis sesuai dengan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional No. 63 Tahun 2025 dijalankan di Kota Surabaya, serta sejauh mana pelaksanaan program ini selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam hukum Islam. Penelitian ini juga menyoroti tata kelola program di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kecamatan Rungkut dan Wonocolo, serta mengangkat prinsip good governance sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kedelapan jurnal oleh Bawon Nul Hakim dan Wahida Yuliana (2025) dengan judul **“Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis”**⁴³ hasil pembahasan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara formal peraturan ini sah menurut ketentuan hukum positif karena dikeluarkan oleh

⁴³ Hakim, Bawon Nul, and Wahida Yuliana. "Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 267-283.

Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan. Namun, dari perspektif hierarki norma, Perpres ini menyisakan persoalan yuridis terkait legitimasi kelembagaan dan implikasi administratif, mengingat dasar hukumnya hanya bertumpu pada kewenangan eksekutif tanpa dukungan undang-undang sebagai payung hukum yang lebih kuat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi dengan sejumlah undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terutama dalam aspek pembagian kewenangan dan koordinasi antar-lembaga. Dengan demikian, meskipun pembentukan BGN menjawab kebutuhan mendesak terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), secara kelembagaan dan administratif masih terdapat kerentanan yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi di lapangan. Untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas Perpres Nomor 83 Tahun 2024, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan regulasi dengan hierarki yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Gizi Nasional atau integrasi klausul eksplisit mengenai gizi dalam Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Pangan. Harmonisasi antara Perpres dengan undang-undang sektoral menjadi penting untuk meminimalisasi tumpang tindih kewenangan dan memastikan kebijakan gizi nasional berjalan sesuai prinsip good governance.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menitikberatkan pada evaluasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru diimplementasikan pada tahun 2024-2025 dan

menggunakan perspektif Maqashid Syariah sebagai kerangka untuk mengkaji nilai-nilai etika dan hukum Islam dalam evaluasi kebijakan publik terkait gizi. Penelitian ini menggunakan metode gabungan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan dengan subjek siswa penerima manfaat di Surabaya, sehingga pendekatannya bersifat yuridis empiris yang menggabungkan aspek sosial dan nilai Islam secara langsung dalam konteks kebijakan kontemporer. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bawon Nul Hakim dan Wahida Yuliana lebih bersifat yuridis normatif dengan fokus pada analisis legalitas serta implikasi yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang menjadi payung hukum program MBG. Penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, termasuk regulasi perundang-undangan, prinsip hierarki norma hukum, serta evaluasi tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Penekanan utama ada pada legitimasi formal dan substantif regulasi, risiko hukum, serta aspek administrasi dan tata kelola negara dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan meninjau beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang baru diluncurkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis dengan menggunakan

perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini juga menggabungkan aspek kebijakan publik dan hukum Islam dalam satu kajian yang komprehensif.

N o.	Nama/ Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
	Andi Asfiyanti Cendrakasih (2023) dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden (Pp) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Dinas Kesehatan Kab. Wajo)” . ⁴⁴	Bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting Kabupaten Wajo? Bagaimana pandangan siyasa dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting?	Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Wajo sudah berjalan dengan baik di mana dinas kesehatan kabupaten Wajo terus berupaya untuk mengimplementasikan program percepatan penurunan stunting mereka membagikan tablet tambah darah, mendapatkan imunisasi, mendapatkan makanan tambahan, memberikan ASI hingga usia 24 bulan, mendapatkan obat cacing, memberikan imunisasi dasar	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Asfiyanti lebih bersifat kajian regulasi dan efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting secara umum dengan pendekatan fiqh siyasah yang lebih teoritik dan konstitusional. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kebijakan yang lebih kontemporer yakni Program Makan Bergizi Gratis, yang mulai diimplementasikan tahun 2024-2025, serta penerapan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> yang mengintegrasikan dimensi etika dan nilai Islam dalam evaluasi kebijakan.	Dengan meninjau beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang baru diluncurkan oleh pemerintah Indonesia berdararkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah.

⁴⁴Cendrakasih, Andi Asfiyanti “Implementasi Peraturan Presiden (Pp) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Dinas Kesehatan Kab. Wajo)”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2023). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/25459>

			<p>lengkap kepada anak, pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil, 1000 HPK (1000 Hari Pertama Kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan (270 Hari) sampai dengan anak berusia 2 tahun (730 Hari)), pembinaan ASI eksklusif 0-6 bulan dan sanitasi lingkungan yang sehat. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.</p>		
2.	<p>M. Mardatillah dkk. (2024) “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi</p>	<p>bagaimana tingkat implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang penanggulangan gizi pada anak akibat penyakit di</p>	<p>pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan optimal. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan sudah diterapkan, dan peran pemerintah pusat serta daerah dalam penanggulangan gizi sudah berjalan secara terpadu. Sumber</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh M. Mardatillah dkk lebih fokus pada implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang penanggulangan masalah gizi anak akibat penyakit, dengan studi</p>	

	Anak Akibat Penyakit (Studi Kasus Di Puskesmas Halong)”⁴⁵	<p>Puskesmas Halong?</p> <p>apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut? bagaimana peran sumber daya manusia, anggaran, dan sosialisasi dalam keberhasilan kebijakan ini?</p> <p>bagaimana tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat serta opini publik terhadap program penanggulangan masalah gizi anak yang dijalankan di Puskesmas tersebut?</p>	<p>daya manusia pelaksana di Puskesmas juga sudah cukup baik dalam menerapkan program, namun dukungan finansial masih kurang sehingga sosialisasi program belum maksimal. Fasilitas pendukung seperti posyandu tersedia dan membantu meningkatkan partisipasi orang tua dalam pemenuhan gizi anak. Selain itu, koordinasi antara instansi terkait sudah baik dan ada dukungan dari pemerintah desa dan kecamatan. Namun, opini dan pengetahuan publik tentang gizi anak masih rendah, sehingga menjadi kendala dalam implementasi.</p>	<p>kasus di Puskesmas Halong Kabupaten Balangan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif tradisional, yang berupaya memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis tentang pelaksanaan peraturan tersebut dalam konteks penurunan angka stunting dan gizi buruk pada anak. Sedangkan penulis fokusnya pada program makan bergizi gratis yang baru diimplementasikan pada 2024-2025 serta penerapan perspektif Maqashid Syariah dalam mengkaji kebijakan publik terkait gizi,</p>	
3.	Cindy Destia Cantika (2024) “Implementasi Program	Bagaimana Implementasi Program Perbaikan	hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada	

⁴⁵ Mardatillah, M., Ramona Handayani, and Agus Sya'bani Arlan. "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN MASALAH GIZI BAGI ANAK AKIBAT PENYAKIT (Studi Kasus Di Puskesmas Halong)." *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia* 1, no. 3 (2024): 528-538.

	<p>Perbaikan Gizi Balita Berstatus Gizi Kurang Di Puskesmas Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu⁴⁶</p>	<p>Gizi Balita Berstatus Gizi Kurang di Puskesmas Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?</p> <p>Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita Berstatus Gizi Kurang di Puskesmas Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?</p>	<p>implementasi program perbaikan gizi balita berstatus gizi kurang di Puskesmas Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu belum berjalan secara optimal. Hal ini terbukti dari kurangnya pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan aspek-aspek program. Beberapa kendala utama yang ditemukan adalah kekurangan sumber daya manusia, terutama tenaga ahli gizi yang terbatas, serta sosialisasi program yang telah dilakukan kepada masyarakat belum sepenuhnya efektif sehingga masyarakat kurang menerapkan anjuran program tersebut. Selain itu, terdapat beberapa program yang sudah tidak berjalan lagi, yang menghambat pencapaian tujuan perbaikan gizi balita. Peneliti juga</p>	<p>program yang dilakukan yaitu program MBG ini merupakan langkah pemerintah dalam menanggulangi gizi buruk pada anak, karena pada saat ini pemerintah memfokuskan pada kondisi gizi pada usia rentan dengan meluncurkan Program MBG ini, dan Perbedaan lainnya penulis menggunakan Perspektif Maqashid Syariah dalam mengkaji isu hukum islam.</p>	
--	---	---	---	---	--

⁴⁶ CANTIKA, CINDY DESTIA. "IMPLEMENTASI PROGRAM PERBAIKAN GIZI BALITA BERSTATUS GIZI KURANG DI PUSKESMAS BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

			<p>mengidentifikasi bahwa kendala dalam pengorganisasian, kurangnya dukungan dan koordinasi antar pelaksana, serta keterbatasan fasilitas menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program. Meski berbagai upaya dan kegiatan sudah dilakukan, jumlah balita dengan gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Batang Peranap masih meningkat, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih intensif dan terintegrasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.</p>		
4.	<p>Skripsi Karya Marthin Sinaga (2023) “Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita Di Posyandu Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan”⁴⁷</p>	<p>1. Bagaimana implementasi program perbaikan gizi balita di Posyandu Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan? Apa saja faktor yang menjadi penghambat</p>	<p>Implementasi program perbaikan gizi balita di Posyandu Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan telah berjalan dengan aspek-aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang relatif</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Skripsi karya Marthin Sinaga Penelitian ini menitikberatkan pada aspek pelaksanaan program serta hambatan yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan fasilitas dan kesadaran masyarakat.</p>	

⁴⁷ Sinaga, Marthin. "Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan." PhD diss., Universitas Medan Area, 2023.

		implementasi program perbaikan gizi balita di Posyandu Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?	terpenuhi sesuai teori George C. Edward III. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan signifikan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya posyandu, keterbatasan jumlah fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan posyandu, dan jumlah kader posyandu yang masih sedikit sehingga menghambat kelancaran pelayanan. Program perbaikan gizi yang dilaksanakan meliputi penimbangan balita secara rutin untuk pemantauan pertumbuhan dan deteksi dini gangguan gizi, pemberian makanan tambahan serta penyuluhan gizi.	Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk menganalisis implementasi program di posyandu. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kebijakan yang lebih kontemporer yakni Program Makan Bergizi Gratis, yang mulai diimplementasikan tahun 2024-2025, serta penerapan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> yang mengintegrasikan nilai Islam dalam evaluasi kebijakan.	
5.	Eko Eryanto Nugroho, Abd. Mahsyar, Jaelan Usman	Bagaimana Implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam penanganan gizi buruk pada balita	Salah satu yang dapat membuat implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai yang diinginkan yaitu adanya faktor pendukung dalam	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eko eryanto Nugroho Dkk adalah sama-sama membahas terkait implementasi	

	(2020) ⁴⁸ "Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Enrekang"	Kabupaten Enrekang.?	menjalankan sebuah implementasi kebijakan yaitu sumber daya manusia (SDM) salah satu yang sangat penting dan bisa dikatakan tidak dapat dilepaskan dari sebuah namanya organisasi baik, institusi maupun dari Perusahaan. Dinas Kesehatan sudah melakukan penanganan gizi buruk pada balita dengan melihat apa saja penyebab utama terjadinya kekurangan gizi yaitu pada pola makan, sanitasi, dan pola asuh kemudian memberikan sosialisasi terkait asupan gizi untuk ibu hamil, anak dan remaja putri yang berkerja sama dengan pihak puskesmas dan pihak rumah sakit	pemerintah dalam menangani gizi buruk yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan Metode Kualitatif	
6.	Syamsul Bahri ZR (2025) dengan judul "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang"	Bagaimana implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang? Bagaimana peraturan hukum	hasil pembahasan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang berjalan melalui tahapan	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri ZR menggunakan pendekatan lapangan dengan analisis Siyash Syariyyah yang menitikberatkan pada aspek	

⁴⁸ Nugroho, Eko Eryanto, Abd Mahsyar, and Jaelan Usman. "Implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam penanganan gizi buruk pada balita di Kabupaten Enrekang." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 1, no. 2 (2020): 700-714.

	(Analisis Siyasah Syar'iyah) ”⁴⁹	pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang Analisis Siyasah Syar'iyah?	perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan melalui koordinasi awal berdasarkan Petunjuk Teknis. Pelaksanaan menunjukkan kesiapan. Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung ke sekolah. Kemudian Tingkat partisipasi sekolah dalam pelaksanaan program tergolong tinggi. Kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan makanan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kemudian dari perspektif Siyasah Syar'iyah, kebijakan ini merupakan bentuk kemaslahatan	hukum tata negara dan implementasi kebijakan makan bergizi gratis secara spesifik di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menyoroti proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program MBG di tingkat sekolah serta keterlibatan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, dan UMKM lokal dalam mendukung program tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada implementasi program makan bergizi gratis di Surabaya menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan penekanan pada integrasi prinsip Maqashid Syariah dan good governance.	
--	--	--	---	---	--

⁴⁹ ZR, Syamsul Bahri. "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar'iyah)." PhD diss., IAIN Parepare, 2025.

			<p>umum (masalah 'ammah) yang sah secara syar'i karena bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan generasi muda, mengurangi angka stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini sejalan dengan prinsipprinsip dasar dalam maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga akal (hifz al-'aql).</p>		
7.	Ikka Febryanti dkk (2025) dengan judul “Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus Pada Sdn 3 Kepanjen Kabupaten Malang)” ⁵⁰	bagaimana Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur? Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Makan Bergizi	hasil pembahasan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2025, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian siswa dan perbaikan SDM, terutama bagi mereka yang	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ikka Febryanti dkk penelitian di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang lebih berorientasi pada studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang menelaah implementasi kebijakan MBG dari sisi manajemen publik dan administrasi, termasuk aspek kebijakan, tata	

⁵⁰ Febryanti, Ikka, Indiati Indiati, Muhammad Alwiadi Pane, and Pudji Astuti. "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Studi Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang)." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2025): 067-079.

		<p>Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur?</p>	<p>berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Meskipun belum ada peraturan tertulis khusus mengenai pelaksanaan MBG, pihak sekolah telah berupaya untuk mendukung program ini melalui peran aktif guru dan pengelola. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang adalah kebijakan pemerintah yang jelas dan komitmen terhadap pengentasan malnutrisi, dan responsifnya kebijakan satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang adalah Keterbatasan anggaran yang mempengaruhi penyusunan menu dan distribusi makanan, dan</p>	<p>kelola, dan anggaran di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Penelitian ini menyoroti faktor pendukung dan kendala pelaksanaan program di lapangan, seperti kebijakan yang belum tertulis di tingkat sekolah, peran aktif guru dan pengelola, serta hambatan anggaran dan tata kelola yang memengaruhi kelancaran program. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang menitikberatkan pada bagaimana implementasi program makan bergizi gratis sesuai dengan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional No. 63 Tahun 2025 dijalankan di Kota Surabaya, serta sejauh mana pelaksanaan program ini selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam hukum Islam. Penelitian ini juga menyoroti tata kelola program di</p>	
--	--	--	--	---	--

			Tata kelola yang kurang optimal di tingkat satuan pendidikan yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar.	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kecamatan Rungkut dan Wonocolo, serta mengangkat prinsip good governance sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan.	
8.	Bawon Nul Hakim dan Wahida Yuliana (2025) dengan judul "Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis" ⁵¹	Bagaimana ? Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis	hasil pembahasan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara formal peraturan ini sah menurut ketentuan hukum positif karena dikeluarkan oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan. Namun, dari perspektif hierarki norma, Perpres ini menyisakan persoalan yuridis terkait legitimasi kelembagaan dan implikasi administratif, mengingat dasar hukumnya hanya bertumpu pada kewenangan eksekutif tanpa dukungan undang-undang sebagai payung hukum yang lebih kuat. Kondisi ini berpotensi	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menitikberatkan pada evaluasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru diimplementasikan pada tahun 2024-2025 dan menggunakan perspektif Maqashid Syariah sebagai kerangka untuk mengkaji nilai-nilai etika dan hukum Islam dalam evaluasi kebijakan publik terkait gizi. Penelitian ini menggunakan metode gabungan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan dengan subjek siswa penerima manfaat di Surabaya, sehingga	

⁵¹ Hakim, Bawon Nul, and Wahida Yuliana. "Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 267-283.

			<p>menimbulkan disharmonisasi dengan sejumlah undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terutama dalam aspek pembagian kewenangan dan koordinasi antar-lembaga. Dengan demikian, meskipun pembentukan BGN menjawab kebutuhan mendesak terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), secara kelembagaan dan administratif masih terdapat kerentanan yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi di lapangan. Untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas Perpres Nomor 83 Tahun 2024, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan regulasi dengan hierarki yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Gizi Nasional atau integrasi klausul eksplisit mengenai gizi dalam Undang-Undang</p>	<p>pendekatannya bersifat yuridis empiris yang menggabungkan aspek sosial dan nilai Islam secara langsung dalam konteks kebijakan kontemporer. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bawon Nul Hakim dan Wahida Yuliana lebih bersifat yuridis normatif dengan fokus pada analisis legalitas serta implikasi yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang menjadi payung hukum program MBG. Penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, termasuk regulasi perundang-undangan, prinsip hierarki norma hukum, serta evaluasi tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Penekanan utama ada pada legitimasi formal dan substantif regulasi, risiko hukum, serta aspek administrasi dan tata kelola negara</p>	
--	--	--	---	---	--

			Kesehatan maupun Undang-Undang Pangan. Harmonisasi antara Perpres dengan undang-undang sektoral menjadi penting untuk meminimalisasi tumpang tindih kewenangan dan memastikan kebijakan gizi nasional berjalan sesuai prinsip good governance.	dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.	
--	--	--	--	---------------------------------------	--

Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, dengan menyoroti kesamaan serta kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini dalam analisis implementasi kebijakan makan bergizi gratis dalam perspektif maqashid syariah.

B. Kerangka Teori

1. Teori Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Good Governance sangat penting dalam administrasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Istilah ini merujuk pada cara pemerintah menjalankan kewenangannya dalam mengelola sumber daya negara untuk pembangunan ekonomi dan sosial.⁵² Menurut World Bank, *Good*

⁵² Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195-203.

Governance adalah pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan negara di setiap tingkatan yang mencakup proses pembuatan kebijakan, implementasi, dan mekanisme akuntabilitas.⁵³

Istilah *good governance* menurut Sadjijono mempunyai makna sebagai aktivitas suatu lembaga pemerintah yang diselenggarakan atas dasar kepentingan rakyat dan norma yang ada untuk mencapai apa yang dicita-citakan negara.⁵⁴ Berdasarkan definisi-definisi tersebut secara garis besar sebenarnya *good governance* dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan dari suatu lembaga pemerintah yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepentingan rakyat dan norma-norma masyarakat yang ada guna mencapai cita-cita negara dimana kekuasaan terhadap rakyat diatur di berbagai tingkat pemerintahan negara yang berhubungan dengan sosial budaya, politik dan ekonomi negara tersebut.

Good Governance tidak hanya berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan, tetapi juga berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, terdapat delapan prinsip *Good Governance* yang mencakup partisipasi,

⁵³ World Bank. (1992). *Governance And Development*. World Bank.

⁵⁴ Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi. "Birokrasi & Good Governance." (2023).

supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas, yaitu :⁵⁵

1. Partisipasi

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan yang sah dan harus didukung oleh kebebasan berekspresi serta akses informasi yang memadai. Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki ruk yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan

2. Supremasi hukum

Seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang adil dan ditegakkan secara konsisten. Keberadaan sistem hukum yang independen dan tidak diskriminatif sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

3. Transparansi

Prinsip ketiga yang mengharuskan pemerintah menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana kebijakan dijalankan.

⁵⁵ United Nations Economic And Social Commission For Asia And The Pacific (Unescap). (2017). *What Is Good Governance?* Unescap.

4. Daya Tanggap (*responsiveness*)

Mengacu pada kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Pemerintah yang responsif akan lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan publik serta membangun kepercayaan masyarakat.⁵⁶

5. Orientasi Konsensus

Menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah yang mengedepankan prinsip ini akan mampu menyeimbangkan kepentingan beragam kelompok dalam masyarakat guna mencapai keputusan yang terbaik.⁵⁷

6. Keadilan dan Inklusivitas

Setiap individu, tanpa terkecuali, harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menerapkan prinsip ini akan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Menekankan bahwa kebijakan dan layanan publik harus dikelola secara optimal untuk mencapai hasil terbaik dengan sumber daya yang tersedia. Pemerintah harus menghindari

⁵⁶ Wijaya, S. C., Mahendra, A. A., Hamdan, T. N., Ramdan, H., & Aditya, R. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik untuk Pemerintah Daerah: Development of Public Service Information Systems for Regional Government. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 3(1), 40-51.

⁵⁷ La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.

pemborosan dan meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

8. Akuntabilitas

Prinsip yang mengharuskan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka buat. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk memberikan laporan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diterapkan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* ini, diharapkan pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi *Good Governance* dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam program makan bergizi gratis sebagaimana yang diatur Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis, menjadi aspek krusial dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.⁵⁸

2. Teori Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Ketahanan Keluarga

Keluarga adalah unit yang paling kecil dari lapisan masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal bersama

⁵⁸ Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.

dalam ikatan perkawinan, kelahiran atau adopsi.⁵⁹ Keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anaknya. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup dalam suatu rumah tangga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁶⁰

Kata ketahanan berarti kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasinya sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah.⁶¹

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial.⁶² Menurut undang-undang No 10. Tahun 1992 tentang

⁵⁹ Hanan Abimanyu, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”, (Masters Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024)..

https://etheses.iainponorogo.ac.id/29594/1/TESIS_HANAN%20ABIMANYU_503220011%20-%20cover%20iain%20%281%29%20%281%29_removed.pdf

⁶⁰ Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 61-62.

⁶¹ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), h. 191.

⁶² Muhamad Uyun, *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, h. 1.

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejatara pasal 1 ayat (15) Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁶³

b. Bentuk-bentuk Ketahanan Keluarga

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga. Dengan demikian keluarga dianggap memiliki tingkat ketahanan yang tinggi jika memenuhi hal-hal berikut:

1. ketahanan fisik

Keluarga yang memiliki kondisi fisik yang baik akan memperlihatkan tubuh yang sehat dan kuat, memiliki tempat tidur yang layak, serta terhindar dari berbagai penyakit, keterbatasan maupun disabilitas.⁶⁴ Selanjutnya akan memudahkan untuk membentuk ketahanan keluarga. Karena salah satu syarat membentuk ketahanan dalam keluarga ialah memiliki kondisi fisik yang baik.

⁶³ Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: Ipb Press, 2010), hlm. 11-12

⁶⁴ Hanan Abimanyu, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun", 45

2. ketahanan ekonomi

Setiap orang pasti memerlukan sumber penghidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Minimal seseorang dapat memenuhi kebutuhan makan, minum, dan perumahan, setidaknya hal tersebut mencukupi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut setiap orang juga perlu bekerja, karena dengan bekerja akan mendapat upah yang nantinya dapat dipergunakan dalam memenuhi kebutuhannya. Ketahanan ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat penting.⁶⁵ Selain itu, tingkat kesejahteraan keluarga juga ditentukan oleh ketahanan ekonominya, yaitu bagaimana sebuah keluarga dapat memenuhi berbagai kebutuhan keluarganya guna melangsungkan kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, tak terkecuali dalam hal jaminan pendidikan. Selain itu untuk mengantisipasi adanya masalah di masa yang akan datang, setiap keluarga juga dianjurkan mempunyai tabungan sebagai solusi ketika terjadi sesuatu yang tidak terduga di masa depan.

3. ketahanan sosial psikologis

Jika mampu mengatasi masalah non fisik, mengelola emosi dengan positif, memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri (termasuk harapan dan kepuasan), serta menunjukkan rasa peduli antara suami,

⁶⁵ Krismawati dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

istri dan anak. Ketahanan sosial psikologis dalam penelitian ini terdiri dari keharmonisan keluarga, dan kepatuhan terhadap hukum. Faktor-faktor ini mempengaruhi stabilitas emosional dan kesejahteraan psikologis keluarga⁶⁶

3. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat. Secara etimologis, *maqashid* berasal dari kata *maqshad*, yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syariah* mengacu pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.⁶⁷ Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh syariat dalam menetapkan hukum-hukum Islam untuk kebaikan umat manusia.

Al-Ghazali mengajukan teori *Maqāshid al-Syari'ah* dengan membatasi pemeliharaan syari'at pada lima unsur utama yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Hal ini juga dikemukakan oleh al-Syathibi dengan menyatakan bahwa *al-Mashlahah* adalah memelihara lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, kelima unsur di atas dianggap suci, mulia dan dihormati karenanya mesti

⁶⁶ Marty Mawarpury and Mirza Mirza, "Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi," *Psikoislamedia* : Jurnal Psikologi 2, no. 1 (2017): 96, <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v2i1.1829>.

⁶⁷ Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. Iiit.

dilindungi dan dipertahankan. *Maqāshid al-Syari'ah* juga merupakan prinsip umum syari'at (*al-Kulliyat al-Syari'ah*) yang pasti.⁶⁸ Kelima aspek ini menjadi dasar dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, baik dalam ranah individu maupun kebijakan publik.

Tujuan utama *Maqashid Syariah* dalam hukum Islam adalah menciptakan kesejahteraan bagi manusia dengan tetap memperhatikan aspek moral dan spiritual. Ibn Ashur menekankan bahwa *Maqashid Syariah* tidak hanya terbatas pada hukum-hukum yang bersifat ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Maqashid Syariah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).⁶⁹ *Dharuriyyat* adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Hajiyyat* merujuk pada kebutuhan yang jika tidak dipenuhi dapat

⁶⁸ Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA MAQASHID AL-SYARI'AH MASHLAHAH Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 2021

⁶⁹ Solehuddin Harahap, "Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam" 6, no. 2 (2023).

menyebabkan kesulitan dalam kehidupan, sementara tahsiniyyat berkaitan dengan aspek penyempurnaan atau keindahan dalam kehidupan manusia.⁷⁰

Dalam kebijakan publik, penerapan *Maqashid Syariah* dapat dilihat dalam berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, kebijakan yang berfokus pada kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dapat dikategorikan sebagai implementasi dari *Maqashid Syariah*.⁷¹ Dengan demikian, prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dapat menjadi pedoman dalam merancang kebijakan publik yang adil dan berkeadilan.

Salah satu prinsip penting dalam *Maqashid Syariah* adalah prinsip keadilan (*al-'adl*), yang menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum Islam. Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya mencakup aspek legal-formal, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Menurut Al-Shatibi, keadilan dalam *Maqashid Syariah* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum.⁷²

Maqashid Syariah juga berperan dalam memberikan fleksibilitas dalam hukum Islam, terutama dalam konteks kebijakan publik. Ibn Qayyim al-Jawziyya (2008) menekankan bahwa hukum Islam harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dalam setiap penerapannya.

⁷⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *FILSAFAT HUKUM ISLAM*, t.t.

⁷¹ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.

⁷² Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT*, 15, no. 1 (2021).

Oleh karena itu, kebijakan yang berbasis *Maqashid Syariah* tidak boleh bersifat rigid, tetapi harus menyesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang.

Di era modern, konsep *Maqashid Syariah* semakin relevan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Misalnya, dalam sistem keuangan Islam, prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* digunakan untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan tidak hanya memenuhi aspek legal Islam, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial.⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* memiliki peran strategis dalam membangun sistem yang berkeadilan.

Implementasi *Maqashid Syariah* dalam kebijakan publik juga dapat meningkatkan efektivitas program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kebijakan pangan⁷⁴, misalnya, Program MBG bagi anak-anak sekolah dapat dikategorikan sebagai upaya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-aql*). Oleh karena itu, pendekatan *Maqashid Syariah* dapat menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas kebijakan tersebut.

⁷³ Fattah, A. (2024). Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 194-208.

⁷⁴ Kompasiana.com, "Optimalisasi Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berdasarkan *Maqashid Syariah*," KOMPASIANA, 27 Agustus 2024, <https://www.kompasiana.com/burhanirfany0402/66cd6073ed6415317e094a55/optimalisasi-ketahanan-pangan-untuk-kesejahteraan-sosial-dan-pembanguna-ekonomi-berdasarkan-maqashid-syariah>.

Maqashid Syariah juga memiliki relevansi dalam kebijakan kesehatan, terutama dalam memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsep perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *Maqashid Syariah* menggarisbawahi pentingnya sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.⁷⁵ Dalam hal ini, kebijakan kesehatan yang dirancang oleh pemerintah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Maqashid Syariah memberikan landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih humanis dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.⁷⁶ Dengan memahami tujuan utama dari syariat Islam, para pembuat kebijakan dapat merancang program yang lebih efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara holistik. Hal ini menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* tidak hanya relevan dalam bidang hukum Islam, tetapi juga dalam pengelolaan kebijakan publik yang lebih luas.

Secara keseluruhan, pemahaman mengenai *Maqashid Syariah* sangat penting dalam mengembangkan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan menjadikan prinsip-prinsip *Maqashid*

⁷⁵ Dr. Ashadi L. Diab, M.A., M.Hum. “*MAQASHID KESEHATAN & ETIKA MEDIS DALAM ISLAM (SINTESIS FIKIH DAN KEDOKTERAN)* FULL.pdf,” (Deepublish 2017) diakses 31 Mei 2025, <https://digilib.iainkendari.ac.id/2045/1/Maqashid%20Kesehatan%20%20dan%20Etika%20medis%20FULL.pdf>.

⁷⁶ Thamsir, M., Umar, H., & Adawiyah, R. A. (2025). *Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5721-5728.

Syariah sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, diharapkan tercipta sistem hukum dan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

a) Klasifikasi *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan publik.⁷⁷ Konsep ini menekankan lima aspek utama yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam kebijakan publik, kelima prinsip ini menjadi landasan dalam merumuskan regulasi yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.⁷⁸

1. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Hifz al-Din mengacu pada perlindungan terhadap kebebasan beragama dan nilai-nilai keimanan dalam masyarakat. Dalam kebijakan publik, prinsip ini menuntut adanya regulasi yang memastikan setiap individu dapat menjalankan ajaran agamanya tanpa hambatan.⁷⁹ Misalnya, pemerintah harus menyediakan

⁷⁷ Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal Of Sharia Economics*, 1(1), 14-29.

⁷⁸ Sofian, M. (2023). Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(1), 29-46.

⁷⁹ Putra, D. (2017). Membangun Kembali Nilai-Nilai Dasar Keislaman sebagai Resolusi Konflik Ahmadiyah: Diskursus Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 2(01), 137-157.

lingkungan yang kondusif untuk beribadah serta menjamin kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Selain itu, kebijakan dalam sektor pendidikan juga perlu memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan tetap diajarkan untuk membentuk karakter masyarakat yang bermoral dan beretika. Regulasi yang mendukung kebebasan beribadah serta kebijakan yang mencegah intoleransi menjadi bagian dari upaya negara dalam melindungi aspek *hifz al-din*.

2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Perlindungan jiwa menjadi aspek penting dalam kebijakan publik, terutama dalam sektor kesehatan dan keamanan. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat, termasuk dalam program makan bergizi gratis yang diatur dalam Surat Keputusan Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis.⁸⁰ Kebijakan kesehatan publik harus memastikan akses yang merata terhadap layanan medis, vaksinasi, dan pengobatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, negara juga berkewajiban menciptakan kebijakan yang mengurangi angka kematian akibat penyakit menular,

⁸⁰ Suiroaka, I. P., ST, S., Fajar Saputra, S. K. M., Yuli Laraeni, S. K. M., Agustini, N. P., SKM, M. S., ... & Anis Ervina, S. S. T. (2024). *KESEHATAN MASYARAKAT UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK*. Cendikia Mulia Mandiri.

kelaparan, atau kekurangan gizi. Program seperti jaminan kesehatan nasional, edukasi tentang gaya hidup sehat, serta regulasi terhadap keamanan pangan dan obat-obatan adalah bentuk nyata dari implementasi *hifz al-nafs* dalam kebijakan publik.⁸¹

3. *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal)

Pendidikan merupakan instrumen utama dalam menjaga akal manusia. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan harus didesain untuk meningkatkan literasi, pengetahuan, dan kreativitas masyarakat.⁸² Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pendidikan yang diterapkan berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan intelektual individu.

Selain itu, regulasi yang mengontrol penyebaran narkoba dan minuman keras juga merupakan bagian dari implementasi *hifz al-aql*, karena bertujuan untuk menjaga akal manusia dari hal-hal yang merusak. Kebijakan yang melarang peredaran zat-zat adiktif serta mendukung rehabilitasi bagi pecandu adalah langkah konkret dalam melindungi akal dari pengaruh buruk.

4. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Prinsip *hifz al-nasl* menekankan pentingnya perlindungan terhadap keturunan melalui kebijakan yang mendukung

⁸¹ Betan, A., Sofiantin, N., Sanaky, M. J., Primadewi, B. K., Arda, D., Kamaruddin, M. I., & AM, A. M. A. (2023). Kebijakan Kesehatan Nasional. *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.

⁸² Susanti, L., Handriyanti, E., & Hamzah, A. (2023). *Guru Kreatif Inovatif Era Merdeka Belajar*. Penerbit Andi.

kesejahteraan keluarga dan anak-anak.⁸³ Dalam kebijakan publik, ini mencakup program perlindungan anak, kesejahteraan ibu hamil, serta pendidikan seks yang berbasis moral dan etika. Program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah juga sejalan dengan *hifz al-nasl*, karena berkontribusi dalam pemenuhan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Selain itu, kebijakan yang mendukung keluarga harmonis seperti perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, penguatan nilai-nilai keluarga, serta pemberian cuti melahirkan bagi pekerja perempuan merupakan bagian dari implementasi *hifz al-nasl*. Dengan demikian, negara memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan kondusif.

5. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Ekonomi yang stabil dan sistem keuangan yang adil merupakan bagian dari perlindungan harta dalam perspektif maqashid syariah.⁸⁴ Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang untuk memberikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, mencegah praktik riba dan eksploitasi ekonomi,

⁸³ Hanafiah, N. (2024). Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia. *Integrated Education Journal*, 1(2), 112-125.

⁸⁴ Rofiullah, A. H. (2024). Analisis Implementasi Prinsip Syariah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Lex Economica Journal*, 2(2), 127-141.

serta menciptakan mekanisme distribusi kekayaan yang lebih merata. Program makan bergizi gratis juga memiliki dampak ekonomi positif bagi masyarakat kurang mampu, karena membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan daya beli mereka untuk kebutuhan lainnya.

Selain itu, regulasi yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perlindungan konsumen dari praktik monopoli dan eksploitasi ekonomi, adalah bagian dari upaya perlindungan harta dalam kebijakan publik. Negara juga perlu memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran negara agar tidak terjadi korupsi yang merugikan masyarakat luas.⁸⁵

⁸⁵ Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji bagaimana suatu kebijakan atau peraturan diterapkan dalam praktik di masyarakat.⁸⁶ Penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis di Surabaya. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah dalam hukum Islam.

Penelitian hukum empiris dalam hal ini tidak hanya sekadar melihat implementasi kebijakan, tetapi juga menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat, hambatan dalam penerapannya, serta efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini mampu menggambarkan realitas di lapangan secara lebih mendalam dan komprehensif.⁸⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis implementasi

⁸⁶ Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 17-31.

⁸⁷ Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi.

kebijakan publik dalam kehidupan sosial serta bagaimana efektivitasnya dalam mencapai tujuan hukum.⁸⁸ Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis diterapkan oleh SPPG Rungkut serta bagaimana penerapannya selaras dengan prinsip maqashid syariah.

Pendekatan yuridis-sosiologis tidak hanya menganalisis aspek hukum dari kebijakan yang diteliti, tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, apakah terdapat kendala dalam implementasi, serta bagaimana masyarakat merespons program Makan Bergizi Gratis ini.⁸⁹ Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai hubungan antara regulasi pemerintah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rungkut dan Wonocolo, mengingat lembaga ini memiliki peran penting dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena mengingat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rungkut dan Wonocolo bertanggung jawab dalam memastikan keberhasilan program dari aspek gizi dan kesehatan penerima manfaat.

⁸⁸ Affandi, F. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlantar. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(2), 323-335.

⁸⁹ Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.

Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena kota ini menjadi salah satu kota dengan kebutuhan harga bahan pokok yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur. Surabaya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan wilayah metropolitan mengalami kecenderungan harga bahan pangan yang lebih mahal akibat tingginya permintaan, biaya distribusi yang kompleks, serta keterbatasan lahan produksi local.⁹⁰

Dengan meneliti di lokasi ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana program tersebut diterapkan di wilayah urban dan apakah ada perbedaan dengan daerah lain dalam hal efektivitas implementasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang diperoleh melalui studi lapangan atau pengumpulan data langsung oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertama. Data primer diperoleh dari responden, informan, dan narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan, yang mencakup informasi yang dikumpulkan dari responden dan informan, termasuk ahli sebagai narasumber.⁹¹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait langsung dengan kebijakan makan bergizi gratis yaitu :

⁹⁰ Disperindag Jatim. (2024). *Laporan Pemantauan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur Tahun 2024*. Surabaya: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

⁹¹ Syahid, A. (2020). Studi Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Perilaku Sopan Santun Siswa pada Kelas VIIIC SMP Negeri 18 Banjarmasin. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 6(4), 5-9.

1. SPPG Wonocolo

- a. Kepala SPPG Wonocolo yaitu Bapak Syamsudin Duka, S.Sos.
- b. Ahli Gizi SPPG Wonocolo yaitu Aurelia Shagita Melanie, A.Md.Gz.
- c. Penanggung jawab dapur atau Head Cheff yaitu Bapak cahyo

2. SPPG Rungkut

- a. Kepala SPPG Rungkut yaitu Fadhilah Munawaroh

3. MTSN 3 Surabaya

- a. Kepala Sekolah MTSN 3 Surabaya yaitu Dra. Asmiati, M.Pd.,
- b. Siswa kelas 8A dan 8B MTSN 3 Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dari sumber data primer.⁹² Penelitian ini, untuk menunjang daya dukung, peneliti menggunakan berbagai media seperti jurnal, artikel, buku-buku, hasil penelitian, dan dokumen tertulis lainnya yang masih relevan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

⁹² Ardiansyah, A., & Albanna, F. (2022). Analisis Pemeliharaan pada Kendaraan Operasional PKP-PK di Bandar Udara Adi Soemarmo Solo. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 19-28.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
6. Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggara Bantuan Pemerintah Program Makan Bergizi Gratis
7. Buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan teori Good Governance, hukum islam, dan Maqashid Syariah untuk menilai kebijakan ini dari perspektif syariat dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis

E. Metode Pengumpulan data

Kualitas suatu penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan metode pengumpulan data yang memadai untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk penelitian ini.⁹³ Dalam upaya untuk mendapatkan data yang valid dan relevan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dan langsung antara peneliti dan informan. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara

⁹³ Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., ... & Lolang, E. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

peneliti dan narasumber.⁹⁴ Dalam proses ini, informasi diperoleh dengan bertatap muka langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Seluruh pertanyaan dalam wawancara telah disusun secara sistematis dan terarah. Peneliti melakukan wawancara di tiga lokasi penelitian, yakni di SPPG Wonocolo, SPPG Rungkut, dan MTSN 3 Surabaya dengan informan sebagai berikut :

1. SPPG Wonocolo

- a. Kepala SPPG Wonocolo yaitu Bapak Syamsudin Duka, S.Sos. wawancara terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sesuai Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 terkait Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis
- b. Ahli Gizi SPPG Wonocolo yaitu Aurelia Shagita Melanie, A.Md.Gz. wawancara terkait pemenuhan gizi, keamanan dan kualitas makanan pada SPPG Wonocolo
- c. Wawancara dengan Bapak Cahyo sebagai Kepala Dapur atau *Head Cheff* SPPG Wonocolo yang bertanggungjawab terkait bahan baku makanan dan kualitas bahan makanan di SPPG Wonocolo

2. SPPG Rungkut

- a. Kepala SPPG Rungkut yaitu Fadhilah Munawaroh . wawancara terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sesuai Surat Keputusan

⁹⁴ Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423-5443.

Nomor 63 Tahun 2025 terkait Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis

3. MTSN 3 Surabaya

- a. Kepala Sekolah MTSN 3 Surabaya yaitu Dra. Asmiati, M.Pd., wawancara terkait bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, termasuk kendala teknis yang dihadapi di tingkat sekolah
- b. Siswa kelas 8A dan 8B MTSN 3 Surabaya sebagai penerima manfaat untuk mengetahui pengalaman langsung mereka, seperti akses terhadap makanan, kualitas makanan yang diterima, dan dampak terhadap kegiatan belajar.

2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya yang tersedia di instansi terkait. Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data berupa foto kegiatan Program Makan Bergizi Gratis yang terjadi di Wonocolo dan Rungkut serta dokumen pendukung yang diperoleh dari SPPG Wonocolo dan Rungkut khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis

3. Data Tersier

Data tersier atau data pendukung dikumpulkan melalui kepustakaan, yaitu salah satu metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi dan data dengan mempelajari masalah serta mengumpulkan data dari

berbagai sumber pustaka. Sumber-sumber tersebut dapat berupa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan materi penelitian, buku-buku, jurnal penelitian, dan sumber informasi dari internet. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengakses berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian, memperdalam pemahaman tentang masalah yang diteliti, serta mendukung analisis dan pembahasan penelitian. Studi kepustakaan menjadi langkah penting dalam mendukung keabsahan dan keakuratan hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan setelah semua data yang akan digunakan untuk menyusun penelitian ini terkumpul, termasuk data dari penelitian lapangan. Keadaan sebenarnya dan apa yang terjadi akan diceritakan dan dijelaskan melalui pengolahan data yang dikumpulkan dari hasil observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis deskriptif adalah metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan data yang telah terkumpul atau citra suatu topik dengan mengidentifikasi tren dan isu.⁹⁵ Analisis deskriptif yang dilakukan ingin memberikan gambaran atau deskripsi terkait dengan subjek penelitian berdasarkan data yang sudah diperoleh. Data yang diperoleh kemudian disusun untuk menjawab mengenai kepastian hukum.

⁹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 183.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

1. Profil SPPG Wonocolo

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonocolo terletak di Jl. Jemur Andayani XV/12, Kel. Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur. SPPG Wonocolo adalah salah satu unit dapur sehat atau dapur umum yang didirikan untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah. SPPG ini dikelola oleh Yayasan Miftahul Jinan Lamongan dengan tujuan utamanya adalah untuk memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan makanan yang berkualitas, higienis, dan bergizi seimbang kepada para penerima manfaat. Sasarannya meliputi siswa-siswi sekolah dari SD, SMP/MTS, SMA.

SPPG Wonocolo di Surabaya mendapatkan sorotan nasional karena dianggap sebagai salah satu implementasi program MBG yang sukses dan inovatif. Pada Agustus 2025, SPPG Wonocolo dikunjungi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk meninjau langsung operasionalnya.⁹⁶ Keunggulan utama yang ditonjolkan dari SPPG Wonocolo adalah kemampuannya mengelola limbah pangan. Unit ini diapresiasi karena memiliki skema khusus untuk menangani food waste

⁹⁶ Bramanta, *Menko Pangan Tinjau SPPG Wonocolo, Tegaskan Komitmen Negara Untuk Penuhi Gizi*, Jatimnow.com, diakses tanggal 30 Oktober 2025, <https://jatimnow.com/baca-78425-menko-pangan-tinjau-sppg-wonocolo-tegaskan-komitmen-negara-untuk-penuhi-gizi>

sehingga berhasil mencapai "Nol Food Waste" (Nol Limbah Pangan), menjadikannya sangat efisien. SPPG ini beroperasi dengan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas dan kelayakan gizi dari makanan yang disajikan kepada masyarakat.

2. Profil SPPG Rungkut

SPPG Rungkut terletak di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sama seperti SPPG Wonocolo, SPPG Rungkut adalah unit dapur sehat atau dapur umum yang didirikan oleh pemerintah untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan utamanya adalah untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi dalam porsi besar, dengan fokus utama pada pemenuhan gizi untuk siswa sekolah (SD, SMP, dan SMA) di wilayah pelayanannya.

SPPG Rungkut dikenal dan disorot media karena fokusnya yang sangat tinggi pada standar kebersihan dan penjaminan kualitas untuk mencegah insiden keracunan makanan. Unit ini memiliki kapasitas produksi yang besar. Sejumlah laporan menyebutkan SPPG Rungkut (atau mitra utamanya seperti "Dapur Nikmat Barokah") memproduksi sekitar 3.500 hingga 4.000 porsi makanan bergizi setiap harinya.⁹⁷ Untuk mengantisipasi risiko keracunan, SPPG Rungkut menerapkan standar operasional yang

⁹⁷ Juliana Christy, *SPPG Rungkut Layani 3500 siswa perhari, Andalkan Ahli Gizi dan Evaluasi Ketat Program MBG*, Jawapos.com, diakses tanggal 30 Oktober 2025, <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016158927/sppg-rungkut-layani-3500-siswa-per-hari-andalkan-ahli-gizi-dan-evaluasi-ketat-program-mbg>

ketat. Ini mencakup kebersihan lingkungan dapur, peralatan masak, pemilihan bahan baku, hingga proses pengolahan. Makanan yang akan didistribusikan harus melalui uji kelayakan dan gizi yang diawasi langsung oleh ahli gizi untuk memastikan kualitasnya. Dilaporkan bahwa aktivitas memasak di unit ini dimulai sejak pukul 02.00 dini hari. Hal ini dilakukan agar makanan yang disajikan kepada para siswa di sekolah masih dalam kondisi segar dan layak konsumsi.

3. Profil MTSN 3 Surabaya

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Kota Surabaya adalah sebuah lembaga pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dikenal sebagai salah satu madrasah negeri unggulan di Surabaya, sekolah ini memiliki fokus kuat pada pengembangan sains, teknologi (khususnya robotik), dan program keagamaan. MTSN 3 Surabaya terletak di Jl. Medokan Asri Tengah, Medokan Ayu, Kec.Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Visi dan Misi MTSN 3 Surabaya yaitu :

- a. Visi: Terwujudnya generasi emas yang berkarakter, cerdas, inovatif, kompetitif, dan berwawasan lingkungan.
- b. Misi: Berfokus pada pengembangan karakter Islami, pencapaian prestasi akademik dan non-akademik, penguasaan teknologi, dan penciptaan lingkungan madrasah yang asri dan nyaman.

B. Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan ini digagas saat masa kampanye pemilihan presiden tahun 2024 yang mana tujuannya memberikan peningkatan kualitas gizi bagi anak-anak. Kebijakan MBG dilandasi oleh kondisi anak-anak di Indonesia yang masih dihadapkan pada permasalahan malnutrisi dan stunting, khususnya pada kelompok masyarakat menengah dan bawah.⁹⁸ Sasaran utama program MBG adalah anak-anak, pelajar dan ibu hamil. Hal tersebut berdasarkan pada data dari Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menunjukkan 41% siswa mengalami kelaparan yang berdampak pada menurunnya kualitas Pendidikan.⁹⁹

Program makan bergizi gratis secara teknis diatur dalam Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Tujuan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis adalah untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengelolaan pemberian Makan Bergizi Gratis kepada kelompok sasaran dalam skala besar dan frekuensi ketat memerlukan

⁹⁸ Dian Herdiana, Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 3, Nomor 2, Maret 2025, h.470-478

⁹⁹ Muhammad Basit, Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi, Journal of Economics Development Research Vol. 1, No. 2, June 2025, h.53

jaminan keamanan pangan serta pengelolaan limbah yang dapat mengurangi pemborosan pangan dan mencegah dampak negatif pada lingkungan.¹⁰⁰

Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dijelaskan secara rinci pada Bab 4 Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Pada Bab 4 tersebut dijelaskan secara rinci yang terdiri dari Penyiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Verifikasi SPPG, Penerima Bantuan (Yayasan), SPPI sebagai Kepala SPPG, Penerima Manfaat, Perjanjian Kerjasama, Proposal (Bahan Pangan, Operasional, dan Sewa), Mekanisme Pencairan, Pelaksanaan Operasional SPPG Serta Larangan dan Sanksi.

1. Tempat penyiapan SPPG

Tempat penyiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan fasilitas strategis yang dirancang khusus untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis secara optimal. Lokasi ini harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat agar setiap makanan yang disiapkan benar-benar aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Semua sarana dan prasarana SPPG milik BGN dibiayai oleh APBN dan dibangun oleh BGN dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁰⁰ Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025

a. Spesifikasi Tanah

- 1) Luas tanah: 600 - 1000 meter persegi
- 2) Luas bangunan: 300 - 800 meter persegi.
- 3) Status tanah: pinjam pakai dari Pemda atau TNI Polri.
- 4) Lokasi: Lokasi dekat dengan lingkungan sekolah 3.000 – 4.000 anak sekolah dalam radius maksimal 6 km atau jarak tempuh maksimal 30 menit dari lokasi.
- 5) Kondisi: Dalam kondisi siap bangun, tidak perlu pematangan lahan.
- 6) Listrik: Terjangkau layanan PLN.
- 7) Jalan: Akses logistik yang memadai. Jalan akses lebar \pm 5 meter.
- 8) Lingkungan : Lingkungan sekitar higienis, Tidak berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, Tidak berdekatan dengan kandang.
- 9) Konflik : Tidak dalam kondisi sengketa dengan pihak manapun.¹⁰¹

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pada program MBG sesuai Perpes No. 83 Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Anak Balita.
- b. PAUD/TK
- c. SD/MI.

¹⁰¹ Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025

- d. SMP/MTS.
 - e. SMA/MA/SMK.
 - f. SLB.
 - g. Santri.
 - h. Pendidikan khusus
 - i. Ibu hamil.
 - j. Ibu menyusui.
3. Pelaksanaan Operasional SPPG
- a. Belanja Bahan
- Cara memilih bahan baku yang berkualitas baik sebagai berikut:
- 1) Daging: berwarna merah dan segar serta tidak bau.
 - 2) Ikan: insangnya masih berwarna merah, mata jernih (tidak buram), daging ikan ketika ditekan cepat kembali dan terasa kenyal, masih segar dan tidak berbau busuk.
 - 3) Ayam: Daging ayam masih segar, belum lama dipotong dan tidak mengeluarkan bau busuk.
 - 4) Telur: Telur berkualitas baik, usahakan langsung dari peternak untuk menghindari penyimpanan telur terlalu lama.
 - 5) Sayur: Kondisi sayur secara fisik terlihat segar dan tidak layu.
 - 6) Buah: Kondisi buah harus segar, manis, bebas pestisida.
 - 7) Susu: Susu tanpa berasa, tidak menggunakan tambahan gula (hanya laktosa).

- 8) Bahan baku sebelum diterima harus dicek oleh bagian pengawas bahan baku, baik kualitas dan kuantitas setiap itemnya.
- 9) Cara memotong daging, ayam dan ikan harus sesuai dengan gramasi.
- 10) Pastikan bahan baku sebelum dimasak dalam kondisi segar.¹⁰²

b. Operasional

1) Pengolahan bahan makan

- a. Bahan makanan sebelum diolah harus dalam kondisi fresh/segar, jumlah sesuai dengan penerima manfaat dan dilaksanakan pencucian.
- b. Daging, Ikan dan Ayam pemotongannya harus sesuai gramasi.
- c. Pengolahan bahan makanan dilaksanakan oleh relawan SPPG khususnya penjamah makanan dengan perlengkapan higienis.
- d. Pengolahan bahan makanan dilakukan 4 sd 6 jam sebelum pelaksanaan makan penerima manfaat sehingga pengolahan makanan dilakukan secara dua tahap sesuai dengan:
 - 1) Jam 08.00 pengantaran untuk Anak Balita, PAUD, TK/RA, SD/MI kelas 1 s.d. kelas 3.
 - 2) Jam 10.00 pengantaran untuk SD kelas 4 s.d. kelas 6, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Ibu Hamil dan Menyusui.
- e. Pengolahan makanan sesuai menu yang akan disajikan, perlu adanya pelatihan bagi pelaksana/penjamah makanan untuk

¹⁰² Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025

memasak makanan dengan jumlah banyak (3.000-4.000 orang) sebelum SPPG siap operasional.

- f. Pemilihan bahan makanan sesuai menu kearifan lokal di daerah masing-masing.
- g. Upayakan masakan tanpa kuah agar tidak cepat basi dan tidak tumpah.

2) Penggunaan Listrik, Air, dan Internet

a. Listrik.

- 1) Pemasangan listrik 13000 Kwh (sesuai kebutuhan).
- 2) Instalasi listrik sesuai standar keamanan.
- 3) Penggunaan listrik untuk alat masak di peralatan pendukung sesuai kebutuhan (hemat listrik).
- 4) Hindari pencurian arus listrik.
- 5) Tertib pembayaran listrik.
- 6) Pembayaran listrik dari biaya operasional.
- 7) Terdapat sumber listrik cadangan (genset).
- 8) Cegah kebakaran yang disebabkan korsleting listrik.

b. Air

- 1) Air untuk operasional SPPG berasal dari air tanah, PDAM atau sumber mata air lainnya yang di cek laboratorium daerah Ph air 6.5-8.5.

- 2) Ciri-ciri air yang layak konsumsi seperti: tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung bakteri, kekeruhan maksimal 5 NTU (Nephelometric Turbidity Unit).
- 3) Hemat air.
- 4) Uji laboratorium air dilakukan secara berkala satu tahun sekali.

G. Jaminan kualitas dan kuantitas makanan

- Jaminan Kualitas

- 1) Makanan yang disajikan untuk program MBG harus memenuhi standar kesehatan (*higienis/foodgrade*) dan standar gizi mulai dari pemilihan bahan baku, pencucian (air), pengolahan, pemorsian, penyajian dan pengantaran.
- 2) Makanan sebelum di distribusikan ke penerima manfaat harus dilakukan pengambilan sampel sesuai SOP oleh petugas yang bertugas.
- 3) Setiap hari harus menyiapkan food sample untuk di simpan di lemari pendingin sebagai sample.
- 4) SPPG harus mempunyai sertifikat halal.
- 5) Menjaga kualitas makanan akan di bantu oleh instansi terkait (BPOM dan DinKes) di wilayah masing-masing.
- 6) Kualitas makanan sebaiknya mengikuti ketentuan pemilihan baku yang benar sebagai berikut:
 - a) Pemilihan bahan baku.
 - b) Air (pencucian).

- c) Alat dapur dan alat masak (foodgrade).
- d) Tenaga kerja saat pengolahan makanan dan pemorsian.
- e) Mobil pengantaran (box tertutup).
- f) Lingkungan SPPG (pencemaran limbah, pencemaran udara, dll).
- g) Kuantitas makanan harus memperhatikan:
 - 1) Belanja bahan sesuai dengan jumlah penerima manfaat untuk menghindari makanan lebih atau makanan kurang.
 - 2) Penimbangan/gramasi untuk memperoleh porsi yang tepat sesuai pengelompokan penerima manfaat.

4. Persyaratan dan Mekanisme Pemberian MBG

a. Persyaratan

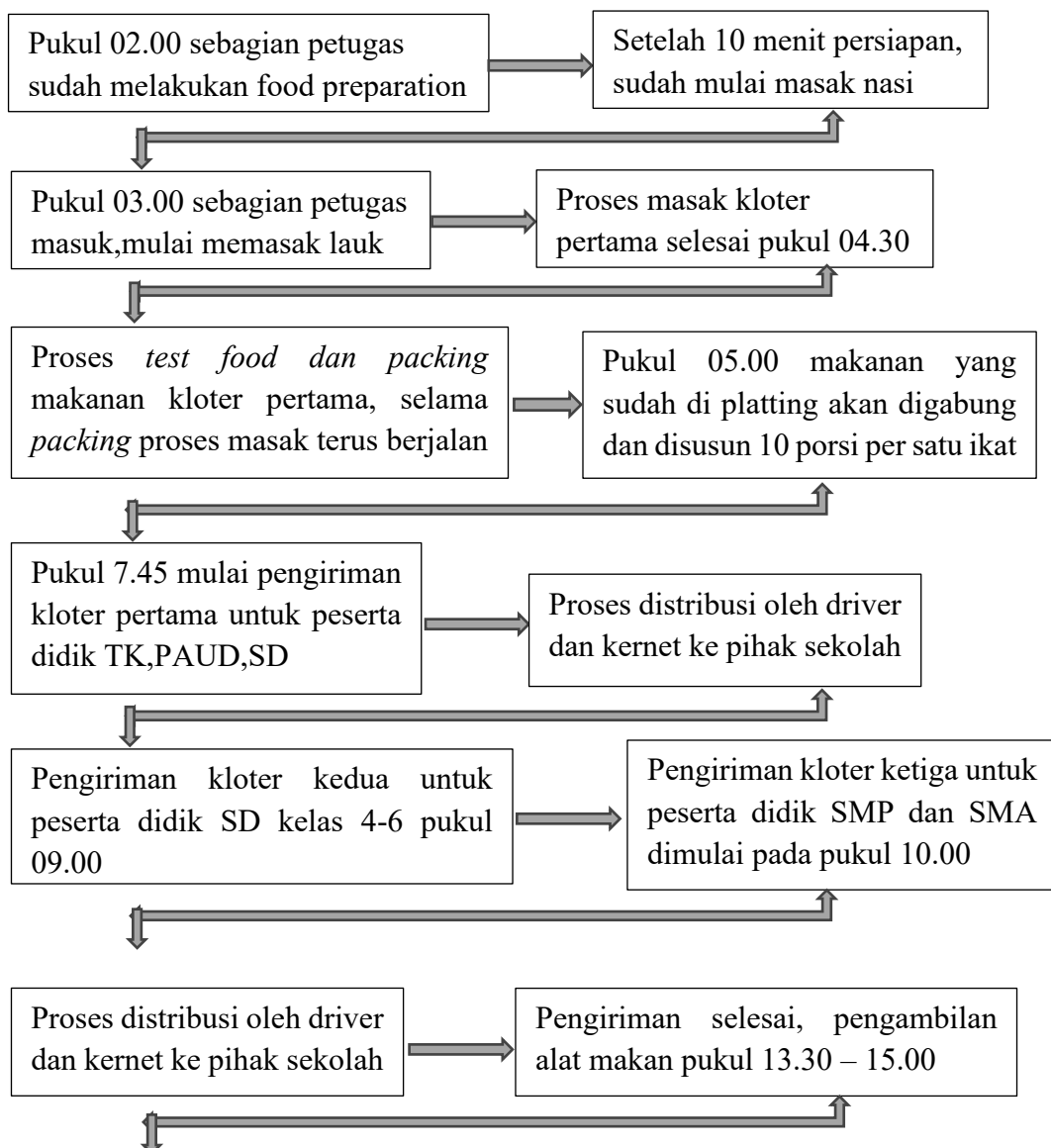
Persyaratan MBG yang diberikan kepada peserta didik Adalah berdasarkan:

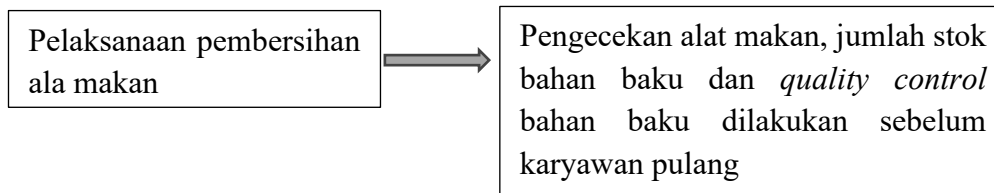
- 1) Terdiri dari menu lengkap dengan mengacu pada prinsip gizi seimbang dan diperuntukkan mengganti salah satu waktu makan utama, yaitu makan pagi atau makan siang;
- 2) Menu lengkap MBG gizi seimbang sesuai ketetapan Kementerian Kesehatan terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk pauk dan buah;
- 3) Memenuhi angka kecukupan gizi harian sesuai umur kelompok sasaran, 20-25% untuk makan pagi, atau 30-35% untuk makan siang;

- 4) Paket menu MBG disajikan untuk 1 kali makan.
- 5) Terjamin mutu dan keamanan pangan (mengikuti penerapan 5 (lima) kunci keamanan pangan).

b. Mekanisme

Gambar.1.
Mekanisme alur penyiapan dan penyaluran MBG





Keterangan:

- c. MBG disiapkan dan diolah setiap hari yaitu dari senin-sabtu (setiap hari untuk peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita).
- d. Pengolahan MBG dilakukan maksimal 4-6 jam sebelum makan bersama dilaksanakan di sekolah;
- e. Waktu makan bersama dilaksanakan pada istirahat pertama (makan pagi) atau makan siang;
- f. Menu yang disajikan harus dicek mutu dan keamanan pangan secara fisik (warna, rasa, aroma) terlebih dahulu oleh pihak penyedia (juru masak) sebelum diantarkan; dan dicek oleh pihak sekolah ketika MBG tiba di sekolah;
- g. MBG diberikan kepada peserta didik dengan menggunakan ompreng dalam keadaan baik dan aman termasuk untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita;
- h. Pengiriman MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita bekerja sama dengan kader posyandu dan kader KB setempat.
- i. Peserta didik menggunakan alat makan (sendok dan garpu) yang dibawa dari rumah pada setiap hari makan.

j. Peserta didik membawa air minum dari rumah setiap hari.

Berdasarkan Uraian diatas terkait Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025, Peneliti sudah melaksanakan wawancara kepada SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut di Kota Surabaya yang merupakan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis dari Pemerintah. Berikut Data Hasil Wawancara :

1. SPPG Wonocolo

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala SPPG Wonocolo yaitu Bapak Syamsudin Duka, S.Sos. Pada wawancara yang telah dilakukan, Bapak Syamsudin Duka, S.Sos menjelaskan tahapan-tahapan dalam membentuk SPPG sampai dengan penyaluran program MBG ke penerima manfaat. Bapak Syamsudin Duka, S.Sos, dalam wawancaranya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:¹⁰³

Bapak Syamsudin Duka menjelaskan bahwa pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dimulai dari proses registrasi dan akreditasi mitra atau yayasan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat. Proses ini bersifat selektif dan memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis). Persyaratan kelayakan tersebut mencakup aspek infrastruktur fisik, di mana fasilitas dapur harus memiliki luasan bangunan minimal 400 meter² dan luasan lahan minimum 600 meter². Selain itu, kelayakan peralatan yang digunakan juga harus memenuhi standar teknis

¹⁰³ Syamsudin Duka, *Wawancara*, (SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

yang diregulasi oleh BGN Pusat. Setelah melalui seleksi dan dinyatakan memenuhi syarat, dapur tersebut diizinkan melaksanakan Program Makan Bergizi (MBG) di bawah supervisi satu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas mengimplementasikan program.

SPPG mengadopsi struktur organisasi yang komprehensif, melibatkan total sekitar 50 staf. Struktur ini mencakup divisi fungsional spesialis seperti ahli gizi (untuk formulasi menu), akuntan (untuk manajemen finansial), staf produksi, pemorsian, pembersihan peralatan, dan personel distribusi/pengantaran (driver).¹⁰⁴

Siklus operasional di SPPG Wonocolo Bapak Syamsudin Duka menjelaskan bahwa berlangsung secara simultan dan berkesinambungan selama 24 jam. Fase awal (preparasi) dimulai pada sore hari dengan penyiapan dan sterilisasi bahan baku. Proses memasak dimulai setelah persiapan bahan selesai dan diperkirakan selesai hingga pukul 03.00 dini hari, diikuti oleh fase pemorsian (portioning) yang bersifat intensif dan memakan waktu lama. Pendistribusian dilaksanakan dalam dua gelombang: distribusi pertama pada pukul 07.00 pagi menargetkan jenjang TK hingga SD, sementara distribusi kedua pada pukul 11.00 siang menyasar jenjang SMP hingga SMA/SMK. Sebagai bagian dari mandat gizi tambahan, pada hari Senin (untuk alokasi Selasa dan Rabu) dan Kamis (untuk alokasi Jumat), SPPG Wonocolo

¹⁰⁴ Syamsudin Duka, *Wawancara*, (SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

menyelenggarakan distribusi khusus bagi kelompok rentan B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.¹⁰⁵

Setelah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinyatakan layak untuk mengimplementasikan program, alokasi pendanaan awal (initial funding) akan ditransfer dari Badan Gizi Nasional (BGN) ke pihak yayasan terkait. Proses pencairan anggaran operasional dari yayasan kepada SPPG memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak: pihak yayasan dan manajemen SPPG. Mekanisme pencairan dana di SPPG dilakukan secara berkala, yaitu setiap dua minggu sekali, dengan mengajukan proposal berdasarkan jumlah aktual penerima manfaat yang dilayani. Anggaran yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis ditetapkan berdasarkan ukuran porsi. Secara spesifik, porsi besar dianggarkan sebesar Rp10.000, sementara porsi kecil dianggarkan sebesar Rp8.000.¹⁰⁶

Secara keseluruhan, setiap penerima manfaat memiliki alokasi anggaran total sebesar Rp15.000 per hari. Sisa dana dari selisih biaya porsi makanan (Rp15.000 dikurangi biaya porsi) diperuntukkan bagi pembiayaan biaya operasional. Komponen utama dari biaya operasional ini meliputi remunerasi (gaji) karyawan serta biaya utilitas esensial seperti pembelian gas, listrik, dan air.

Program Bergizi Gratis menargetkan penerima manfaat yang mencakup spektrum luas, mulai dari siswa Taman Kanak-kanak (TK)/Pendidikan Anak

¹⁰⁵ Syamsudin Duka, *Wawancara*, (SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

¹⁰⁶ Syamsudin Duka, *Wawancara*, (SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

Usia Dini (PAUD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta kelompok rentan lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam proses penentuan sasaran, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berkoordinasi dengan Komando Rayon Militer (Koramil). Kolaborasi ini melibatkan permintaan data siswa kepada pihak sekolah.¹⁰⁷

Bapak Syamsudin Duka selaku Kepala SPPG menjelaskan pada tahap awal implementasi, banyak sekolah yang menunjukkan sikap penolakan terhadap program ini dikarenakan belum adanya arahan resmi dari Dinas Pendidikan setempat. Kriteria utama dalam program ini adalah batasan radius geografis penerima manfaat, yang tidak boleh melebihi 6 kilometer atau 30 menit perjalanan dari lokasi dapur SPPG. Di wilayah Wonocolo, penetapan penerima manfaat telah sesuai dengan batasan jarak yang ditentukan dan telah mencakup kuota maksimal 4.000 penerima manfaat. Apabila terjadi kelebihan jumlah calon penerima manfaat, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat untuk mendapatkan persetujuan. Perlu dicatat bahwa SPPG Wonocolo adalah satu-satunya satuan pelaksana yang saat ini melayani 4.000 penerima manfaat.¹⁰⁸

Penentuan indikator keberhasilan Program Makan Bergizi (MBG) tidak berorientasi pada penilaian internal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan didasarkan pada empat indikator utama yang berpusat pada

¹⁰⁷ Syamsudin Duka, *Wawancara*, (SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

¹⁰⁸ Syamsudin Duka, *Wawancara*, (SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

pemangku kepentingan (stakeholders) eksternal dan internal. Indikator pertama adalah evaluasi kepuasan penerima manfaat. Dalam konteks Wonocolo, terdapat indikasi kuat mengenai penerimaan positif dan apresiasi yang tinggi dari siswa selaku penerima manfaat utama program ini. Indikator kedua berfokus pada dampak implementasi terhadap beban kerja tenaga pendidik. Hasil observasi menunjukkan bahwa para guru di Wonocolo tidak mengalami penambahan beban kerja, melainkan menunjukkan sikap apresiasi karena program MBG dianggap memfasilitasi tugas mereka.

Indikator ketiga mengukur tingkat akseptabilitas sosial dan dampak eksternal program terhadap masyarakat sekitar. Data menunjukkan bahwa masyarakat Wonocolo tidak merasa terganggu oleh kehadiran program ini, justru mereka menunjukkan dukungan dan merasa terbantu secara kolektif. Indikator keempat berkaitan dengan kesejahteraan internal pegawai SPPG, mencakup aspek kesehatan dan remunerasi finansial. Saat ini, pegawai SPPG Wonocolo menerima upah harian sebesar Rp130.000, yang mana pendapatan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kapasitas mereka dalam menafkahi keluarga. Secara esensial, penilai utama dari keberhasilan Program MBG adalah penerima manfaat itu sendiri, yang merefleksikan pendekatan yang berorientasi pada hasil dan dampak.¹⁰⁹

Evaluasi Program Gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonocolo Bapak Syamsudin Duka menjelaskan bahwa dilaksanakan melalui

¹⁰⁹ Syamsudin Duka, *Wawancara*, (SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

dua mekanisme terstruktur: evaluasi internal mingguan dan pemantauan eksternal dua mingguan. Secara internal, proses evaluasi dilakukan setiap minggu, di mana setiap divisi memiliki leader (pemimpin) yang bertanggung jawab atas kinerja operasionalnya. Para pemimpin divisi ini berkumpul di akhir pekan untuk menyelenggarakan pertemuan koordinasi guna membahas dan mengidentifikasi kendala (bottleneck) yang dihadapi selama satu minggu berjalan, dengan tujuan utama untuk merumuskan mitigasi risiko dan mencegah terulangnya isu serupa pada periode berikutnya.¹¹⁰

Secara eksternal, Kepala SPPG secara periodik melakukan pemantauan langsung ke institusi pendidikan (sekolah) setiap dua minggu sekali. Pemantauan ini berfokus pada pengumpulan umpan balik (feedback) dan identifikasi keluhan yang mungkin muncul dari penerima manfaat selama dua minggu terakhir. Dalam interaksi dengan pihak sekolah dan penerima manfaat, Kepala SPPG secara konsisten menekankan prinsip akuntabilitas publik program. Ditegaskan bahwa makanan yang disajikan bukanlah gratis, melainkan dibiayai oleh kontribusi masyarakat melalui sistem pajak. Oleh karena itu, penerima manfaat diwajibkan untuk melaksanakan peran kontrol sosial dengan memberikan kritik konstruktif dan melaporkan secara transparan kepada SPPG apabila terdapat ketidaklayakan atau ketidaksesuaian kualitas makanan yang didistribusikan.

¹¹⁰ Syamsudin Duka, *Wawancara*, (SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonocolo mengintegrasikan beberapa titik kendali mutu kritis untuk menjamin keamanan dan kelayakan pangan. Kontrol tahap pertama dilakukan pada fase persiapan, di mana dilakukan penyortiran intensif terhadap bahan makanan baku untuk memastikan hanya bahan dengan kualitas baik yang diproses, sehingga memenuhi standar kelayakan olah. Kontrol tahap kedua (process control) terletak pada bagian pengolahan atau memasak. Setelah makanan matang, dilakukan pengujian organoleptik (tasting) sebelum memasuki fase pemorsian, bertujuan untuk memvalidasi kelayakan konsumsi dan kesesuaian rasa.

Setelah distribusi, kontrol tahap ketiga didelegasikan kepada pihak sekolah melalui penunjukan seorang koordinator MBG. Koordinator ini berfungsi sebagai kontrol terakhir yang wajib memverifikasi kelayakan konsumsi makanan sebelum didistribusikan kepada siswa, sebagai upaya penjaminan mutu di titik serah terima. Dalam upaya mitigasi risiko keamanan pangan, SPPG Wonocolo secara spesifik menggunakan air kemasan galon dalam proses memasak untuk menghilangkan risiko kontaminasi zat kimia yang mungkin timbul dari penggunaan air biasa.¹¹¹

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Aurel selaku Ahli Gizi di SPPG Wonocolo menjelaskan bahwa manajemen risiko keracunan pangan ditangani secara serius. Insiden keracunan berpotensi mengakibatkan

¹¹¹ Syamsudin Duka, *Wawancara*, (Kepala SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

penutupan fasilitas dapur dan penghentian operasional. Protokol hukum dan investigasi akan diaktifkan, mencakup pengambilan sampel makanan untuk diperiksa. Jika ditemukan unsur kelalaian dari pihak dapur, hal tersebut dapat berimplikasi pada sanksi pidana. Selain itu, insiden tersebut secara otomatis memunculkan dimensi tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan dan keselamatan penerima manfaat.¹¹²

Implementasi Program Gizi ditekankan pada prinsip pemenuhan kebutuhan nutrisi yang seimbang dan bervariasi. Kualitas pemenuhan gizi diukur melalui referensi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang disesuaikan berdasarkan variabel usia dan jenis kelamin penerima manfaat. Untuk mengatasi potensi kebosanan menu Ibu Aurel selaku Ahli Gizi melakukan program mengadopsi strategi diversifikasi menu yang ketat, di mana setiap bulan diupayakan untuk menyajikan rangkaian menu yang berbeda-beda. Untuk menjamin bahwa setiap porsi memenuhi spesifikasi gizi yang telah ditetapkan, proses kontrol porsi (portion control) dilaksanakan setelah pemasakan melalui kegiatan penimbangan. Hal ini memastikan bahwa kuantitas makanan yang didistribusikan sesuai dengan estimasi kebutuhan nutrisi per individu.¹¹³

Dalam konteks manajemen risiko kesehatan, upaya mitigasi alergi makanan menjadi prioritas. Prosedur standar operasional mengharuskan pihak sekolah untuk mengumpulkan data riwayat alergi siswa sebelum program

¹¹² Aurel, *Wawancara*, (Ahli Gizi di SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

¹¹³ Aurel, *Wawancara*, (Ahli Gizi di SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

dimulai. Secara spesifik, di SPPG Wonocolo, risiko alergi dikelola dengan kebijakan penghindaran bahan pangan alergenik tinggi, terutama seafood (makanan laut), yang diidentifikasi sebagai komoditas yang paling rentan memicu reaksi alergi pada populasi sasaran.¹¹⁴

Pelaksanaan program MBG menghadapi sejumlah tantangan manajerial yang berpusat pada tiga aspek utama. Tantangan pertama adalah resolusi konflik horizontal yang kerap terjadi antara mitra pelaksana dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akibat adanya perbedaan persepsi strategis dan operasional. Tantangan kedua dan ketiga berkaitan dengan manajemen hubungan eksternal, khususnya pemeliharaan hubungan yang harmonis dengan pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Hal ini mencakup upaya mitigasi dampak negatif operasional, seperti pengelolaan sampah dan limbah (waste management) yang dihasilkan dari proses memasak agar tidak menimbulkan gangguan sosial.

Menurut Bapak Syamsudin Duka tantangan terpenting yang dihadapi adalah efisiensi dan optimasi alokasi anggaran. Mengingat keterbatasan finansial program, kunci keberhasilan manajerial terletak pada kemampuan untuk meyakinkan bahwa kualitas makanan yang disajikan baik dari sisi kepuasan penerima manfaat maupun pemenuhan gizi tetap terjaga. Strategi optimasi anggaran terlihat jelas dalam upaya peningkatan frekuensi layanan di luar Juknis. Sebagai contoh, meskipun Petunjuk Teknis (Juknis) hanya

¹¹⁴ Aurel, *Wawancara*, (Ahli Gizi di SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

mewajibkan pemberian susu sekali seminggu, SPPG Wonocolo mampu meningkatkan frekuensi pemberian susu menjadi 3-4 kali seminggu. Peningkatan ini dilakukan melalui kebijakan internal SPPG untuk mengoptimalkan penyerapan dan alokasi anggaran yang tersedia, menunjukkan komitmen untuk melebihi standar minimum layanan demi kepentingan gizi penerima manfaat.¹¹⁵

2. SPPG Rungkut

Peneliti melakukan wawancara ke Kepala SPPG Rungkut yaitu Ibu Fadhilah Munawaroh. Dari hasil wawancara diperoleh data penelitian terkait pelaksanaan program MBG oleh SPPG Rungkut. Ibu Fadhilah Munawaroh menjelaskan yang pada pokoknya sebagai berikut :¹¹⁶

Program Makan Bergizi (MBG) memiliki landasan tujuan yang bersifat multi-dimensi, terutama berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuan utama program ini adalah untuk mencukupi dan meningkatkan asupan gizi pada kelompok sasaran strategis, yang meliputi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Upaya ini merupakan intervensi krusial dalam pencegahan stunting, sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selain dampak kesehatan dan pembangunan manusia, program MBG juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui pembukaan lapangan pekerjaan

¹¹⁵ Syamsudin Duka, *Wawancara*, (Kepala SPPG Wonocolo, 9 September 2025)

¹¹⁶ Fadhilah Munawaroh, *Wawancara*, (Kepala SPPG Rungkut, 9 September 2025)

bagi masyarakat setempat, serta memberikan dukungan perekonomian yang signifikan bagi sektor-sektor pemasok, termasuk petani, nelayan, peternak, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lainnya.

Ibu Fadhilah Munawaroh menjelaskan untuk sasaran utama Program Makan Bergizi (MBG) di SPPG Rungkut mencakup spektrum luas dari peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Pesantren, Sekolah Keagamaan, hingga Pendidikan Layanan Khusus. Selain peserta didik, di Kecamatan Rungkut, program MBG juga diperluas penyalurannya kepada kelompok rentan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita. Penyaluran kepada seluruh penerima manfaat tersebut menyesuaikan pada kondisi geografis yaitu lokasi penerima manfaat harus berada dalam radius maksimal enam kilometer (6 km) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau memiliki waktu tempuh maksimum 20 menit.

Keberhasilan Program Makan Bergizi (MBG) diukur berdasarkan pencapaian dua indikator utama yang telah ditetapkan secara nasional pada pertengahan tahun 2025. Indikator pertama terkait kapasitas infrastruktur layanan, yaitu terlaksananya kegiatan operasional di 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Target ini berfokus pada perluasan jangkauan fisik untuk memastikan aksesibilitas layanan merata di seluruh wilayah. Indikator

kedua adalah cakupan penerima manfaat, di mana program ini ditargetkan sudah menjangkau minimal 20 juta penerima manfaat pada bulan Agustus 2025.¹¹⁷

Pencapaian ini krusial karena setiap SPPG diwajibkan beroperasi sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang meliputi aspek higienitas, kelayakan gizi (berdasarkan Angka Kecukupan Gizi/AKG), dan efisiensi operasional. Indikator keberhasilan ini tidak hanya merefleksikan kuantitas layanan, tetapi juga komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sebagai prasyarat fundamental dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rungkut mengikuti serangkaian tahapan prosedural yang ketat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Proses dimulai dengan Verifikasi Pengajuan, yaitu pengecekan dokumen awal pengajuan lokasi SPPG melalui portal Mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Tahap selanjutnya adalah Proses Persiapan, di mana mitra mulai melakukan pembangunan fisik SPPG dan diwajibkan melapor perkembangan progres secara berkala. Keseluruhan kesiapan pembangunan kemudian divalidasi pada tahapan Verifikasi Persiapan oleh pihak verifikator.¹¹⁸

Setelah infrastruktur siap, proses berlanjut ke penetapan target penerima manfaat. Dimulai dengan Penentuan Petugas Survei yang akan

¹¹⁷ Fadhilah Munawaroh, *Wawancara*, (Kepala SPPG Rungkut, 9 September 2025)

¹¹⁸ Fadhilah Munawaroh, *Wawancara*, (Kepala SPPG Rungkut, 9 September 2025)

melaksanakan Survei Lapangan, di mana Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan datang langsung ke lokasi untuk memfinalisasi data penerima manfaat. Kelayakan operasional dan teknis kemudian dinilai dalam rapat komite melalui tahapan Penentuan Kelayakan.

Apabila dinyatakan layak, langkah administrasi dilanjutkan dengan penyusunan Berita Acara Verifikasi Validasi. Selanjutnya, Biro SDM akan menunjuk SPPI sebagai Kepala SPPG melalui Penentuan KA SPPG. Tahapan finansial dimulai dengan Pembuatan Virtual Account dan DIALUR, dilanjutkan dengan Pengajuan Proposal hingga Dana Bantuan Pemerintah Cair. Seluruh proses ini bermuara pada tahapan akhir, yaitu Pelaksanaan/Operasional MBG di dapur yang telah terverifikasi.¹¹⁹

Mekanisme pencairan dana bantuan pemerintah untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) diatur dalam beberapa tahapan prosedural yang ketat. Tahap pertama adalah inisiasi permohonan, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengajukan proposal kegiatan yang terperinci, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan program, kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Pengajuan ini harus dilakukan dalam rentang waktu antara dua minggu hingga satu bulan sebelum tanggal efektif pelaksanaan program MBG dimulai.¹²⁰

Tahap kedua terjadi setelah dana bantuan pemerintah dicairkan ke rekening bersama (Virtual Account/VA) yang dibentuk oleh BGN. Pada saat

¹¹⁹ Fadhilah Munawaroh, *Wawancara*, (Kepala SPPG Rungkut, 9 September 2025)

¹²⁰ Fadhilah Munawaroh, *Wawancara*, (Kepala SPPG Rungkut, 9 September 2025)

dana telah tersedia, SPPG memiliki kewajiban segera untuk melaksanakan program pemberian makan bergizi gratis kepada penerima manfaat sesuai rencana. Tahap ketiga menekankan pada transparansi dan akuntabilitas transaksi: semua pembelanjaan yang berkaitan dengan pengadaan bahan baku wajib dilakukan secara langsung dari rekening VA SPPG ke rekening pemasok (supplier). Tahap terakhir adalah pertanggungjawaban keuangan, di mana SPPG wajib menyimpan seluruh bukti transaksi pembayaran. Bukti-bukti ini merupakan komponen esensial yang akan digunakan sebagai lampiran dalam laporan pertanggungjawaban keuangan program.

Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program Makan Bergizi (MBG) dilaksanakan melalui sistem berjenjang yang komprehensif. Struktur ini melibatkan komite monitoring mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat sekolah. Di samping itu, pengumpulan data dilakukan secara independen oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei berkala. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja secara berkala. Aspek krusial dalam sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan adalah pemanfaatan teknologi digital.

Mekanisme pendanaan program yang berbasis digital memungkinkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Inspektorat Utama untuk melaksanakan pemantauan transaksi dan operasional secara real-time. Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas keuangan dan menjaga kualitas pelaksanaan program. Secara spesifik, operasional harian didukung oleh dua sistem utama yaitu DIALUR digunakan untuk pelaporan harian dan pengarsipan dokumen

terkait, sedangkan TAUWAS Care berfungsi sebagai platform khusus untuk pemantauan dan pengawasan kinerja SPPG secara menyeluruh.¹²¹

Penyediaan makanan bergizi secara teratur melalui program ini dipastikan memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan angka stunting. Intervensi ini secara spesifik menargetkan kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah, sehingga menjamin asupan gizi yang adekuat dan berkesinambungan. Jaminan asupan gizi yang optimal ini merupakan fondasi vital untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Secara makro, keberhasilan program ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian program pemerintah dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.¹²²

Ibu Fadhilah Munawaroh juga menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis di SPPG Rungkut juga menetapkan standar gizi yang berbasis pada Angka Kecukupan Gizi (AKG), merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019. Ketentuan ini mengatur kontribusi energi dari porsi makanan yang disajikan, di mana alokasi untuk sarapan menyumbang 20-25% dari kebutuhan harian, sementara porsi makan siang berkontribusi sebesar 30-35%. Dalam menjamin keamanan pangan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan serangkaian standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Prosedur ini mencakup uji keamanan makanan sebelum penyaluran kepada penerima manfaat, penerapan prinsip

¹²¹ Fadhilah Munawaroh, *Wawancara*, (Kepala SPPG Rungkut, 9 September 2025)

¹²² Fadhilah Munawaroh, *Wawancara*, (Kepala SPPG Rungkut, 9 September 2025)

higiene sanitasi pangan secara menyeluruh, serta pengawasan intensif oleh tenaga kesehatan lingkungan. Komitmen terhadap keamanan pangan ini diperkuat melalui kepemilikan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyedia jasa boga yang terlibat dalam program.

Pelaksanaan pemantauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi berbagai tantangan krusial yang dapat diklasifikasikan menjadi empat area utama. Tantangan pertama bersifat logistik dan operasional, meliputi kendala infrastruktur dan transportasi, terutama di daerah terpencil, serta keterbatasan pasokan dan harga bahan baku. Tantangan kedua berkaitan dengan aspek finansial, yaitu ketergantungan program pada sumber pendanaan tunggal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tantangan ketiga adalah risiko integritas, yaitu potensi korupsi dan penyalahgunaan dana program. Tantangan keempat adalah kelemahan tata kelola berupa kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dirumuskan beberapa strategi mitigasi. Kendala logistik diatasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan real-time. Risiko finansial diminimalkan melalui diversifikasi pendanaan dan pembentukan kemitraan strategis. Isu korupsi direspons dengan pembentukan tim verifikasi independen dan penguatan aturan akuntabilitas yang disertai sanksi tegas. Sementara itu, untuk meningkatkan transparansi, dilakukan peningkatan transparansi melalui sistem laporan terintegrasi serta

evaluasi dan pemantauan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak pemangku kepentingan.¹²³

3. MTS Negeri 3 Surabaya

Selain melakukan wawancara penelitian dengan SPPG Rungkut dan SPPG Wonocolo, peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah MTS Negeri 3 Surabaya yaitu Ibu Asmiati. MTS Negeri 3 Surabaya merupakan salah satu sekolah yang menjadi objek penyaluran program MBG dari Pemerintah. Berdasarkan data hasil wawancara Ibu Asmiati pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :¹²⁴

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diimplementasikan di MTS Negeri 3 Surabaya terhitung sejak tanggal 13 Januari 2025, setelah adanya informasi awal yang diterima sekolah pada awal November 2024. Sebagai tahapan persiapan, pihak sekolah diwajibkan melakukan pendataan komprehensif yang mencakup total jumlah siswa serta inventarisasi siswa dengan riwayat alergi makanan. Pada masa awal pelaksanaan, proses pendistribusian makanan ke sekolah mendapatkan pengawalan ketat dari berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Kelurahan, Polsek setempat, dan Komando Distrik Militer (Dandim) Koramil, yang mengindikasikan tingkat antusiasme tinggi dari siswa maupun pihak sekolah dalam menyambut program ini.

¹²³ Fadhilah Munawaroh, *Wawancara*, (Kepala SPPG Rungkut, 9 September 2025)

¹²⁴ Asmiati, *Wawancara*, (Kepala Sekolah MTSN 3 Surabaya, 16 September 2025)

Pengantaran makanan di sekolah dimulai pada pukul 10.00, dan pendistribusian kepada siswa dilaksanakan setelah jam istirahat. Prosedur penerimaan makanan di sekolah melibatkan pembentukan tim piket yang terdiri dari guru. Tim ini bertanggung jawab menerima, melakukan pengecekan kualitas, serta mendata kesesuaian dan kelayakan makanan. Setelah diterima, makanan disimpan di ruangan yang aman dan bersih. Pada saat pembagian, siswa perwakilan tiap kelas bertugas mengambil makanan sesuai pengaturan yang ditetapkan, dan kegiatan makan bersama dilakukan dengan didampingi oleh wali kelas masing-masing.

Terdapat mekanisme umpan balik dan kontrol mutu pasca-konsumsi, sisa makanan yang tidak habis tidak diperbolehkan dibuang ke tempat sampah karena akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi SPPG terkait preferensi menu siswa. Setelah selesai, siswa bertugas mengembalikan tempat makan ke area yang disediakan. Guru piket kemudian bertanggung jawab mengecek kesesuaian jumlah tempat makan yang dikembalikan. Pengambilan tempat makan bekas oleh pihak SPPG dijadwalkan sekitar pukul 14.00. Khusus selama bulan puasa, menu MBG disesuaikan menjadi menu kering, seperti roti, buah, dan takjil, yang dibagikan pada siang hari sekitar pukul 14.00.¹²⁵

Sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) diimplementasikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melaksanakan koordinasi intensif dengan kepala sekolah untuk menyelenggarakan sosialisasi prosedur kepada

¹²⁵ Asmiati, *Wawancara*, (Kepala Sekolah MTSN 3 Surabaya, 16 September 2025)

seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi ini menekankan beberapa aturan fundamental bagi penerima manfaat, meliputi kewajiban membawa peralatan makan pribadi, pelaksanaan cuci tangan sebelum makan sebagai bagian dari praktik higienis, dan larangan merusak tempat makan yang disediakan. Selain siswa, pihak sekolah juga melaksanakan sosialisasi kepada wali murid terkait mekanisme dan penerimaan program MBG. Untuk memastikan keamanan pangan, Dinas Kesehatan turut memberikan himbauan kepada pihak sekolah agar melakukan kontrol makanan sebelum distribusi kepada siswa, sebagai langkah preventif terhadap risiko keracunan pangan dan potensi bahaya lainnya.

Sebagai bagian dari prosedur operasional standar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melaksanakan koordinasi harian dengan pihak sekolah terkait jadwal pengantaran makanan sebelum proses distribusi dilakukan. Selain koordinasi logistik, SPPG juga menerapkan sistem pelaporan berbasis digital untuk menjamin transparansi program. Setiap hari, SPPG mengirimkan formulir elektronik (*Google Form*) kepada pihak sekolah. Formulir ini wajib diisi oleh sekolah dan berfungsi sebagai bukti otentik serta laporan resmi yang menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil dilaksanakan pada hari tersebut.¹²⁶

Sejauh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung, sekolah terkait belum menghadapi tantangan yang bersifat intens

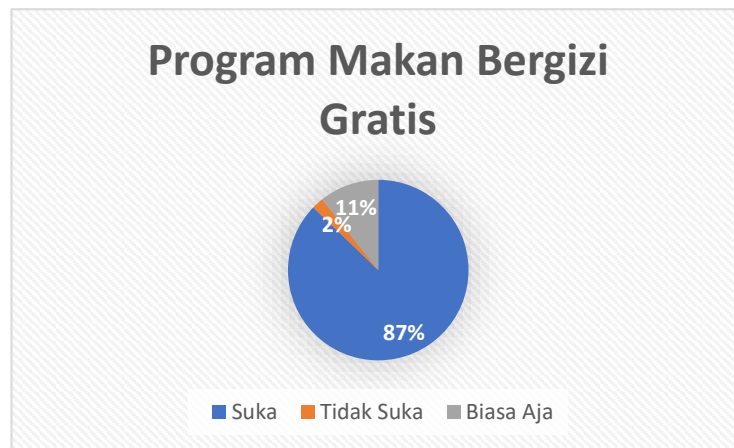
¹²⁶ Asmiati, *Wawancara*, (Kepala Sekolah MTSN 3 Surabaya, 16 September 2025)

atau berkelanjutan. Namun, pada fase awal implementasi program, sempat teridentifikasi adanya permasalahan kecil terkait komposisi menu, khususnya kekurangan dalam penyediaan buah dan lauk pauk. Pihak sekolah segera menyampaikan observasi kekurangan menu tersebut secara langsung kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Respon cepat dari pihak SPPG ditunjukkan dengan tindakan korektif segera, di mana menu yang bermasalah langsung diganti dan dilengkapi sesuai standar gizi yang ditetapkan.

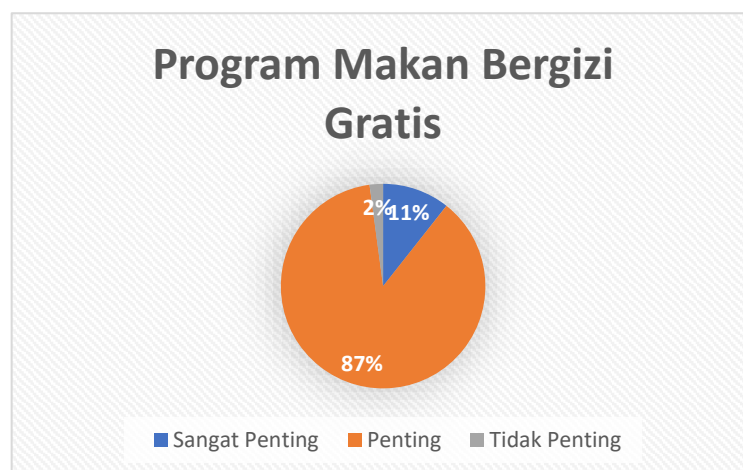
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki prospek keberlanjutan yang tinggi untuk jangka panjang, mengingat tingginya manfaat yang dirasakan siswa. Secara substansial, program ini mengatasi masalah kurangnya pemantauan terhadap asupan gizi siswa sebelumnya. Dengan adanya MBG, asupan nutrisi siswa kini dapat terawasi secara sistematis. Manfaat ini sangat relevan dengan visi pembangunan nasional. Mengingat komitmen Presiden terhadap tercapainya Indonesia Emas 2045, pemenuhan gizi yang adekuat pada setiap anak melalui program ini secara strategis diharapkan menjadi faktor kunci dalam membentuk sumber daya manusia unggul yang mampu mewujudkan visi tersebut di masa depan.¹²⁷

Selain wawancara dengan pihak Kepala Sekolah MTS Negeri 3 Surabaya, peneliti juga memberikan kuisioner untuk mengetahui respon penerima manfaat MBG. Peneliti melakukan kuisioner ke 47 siswa di Sekolah MTS Negeri 3 Surabaya dengan hasil kuisioner sebagai berikut :

¹²⁷ Asmiati, *Wawancara*, (Kepala Sekolah MTsN 3 Surabaya, 16 September 2025)



Berdasarkan diagram lingkaran diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 87% yaitu 41 siswa menyukai program Makan Bergizi Gratis, sebanyak 11% yaitu 5 siswa merasa biasa saja terhadap program Makan Bergizi Gratis, dan 2% yaitu 1 siswa tidak suka dengan program Makan Bergizi Gratis dari Pemerintah. Sebanyak 41 Siswa yang memilih suka beralasan bahwa program Makanan Bergizi Gratis dapat menghemat uang saku, tidak perlu susah payah membawa bekal dari rumah, dan suka dengan makanannya. Sebanyak 5 siswa merasa biasa aja dengan program Makan Bergizi Gratis dengan alasan menunya kadang suka dan kadang tidak suka. Sebanyak 1 orang tidak suka dengan alasan tidak suka dengan menu yang diberikan.



Berdasarkan diagram lingkaran tersebut, menunjukkan bahwa sebanyak 11 % siswa (5 Siswa) merasa sangat penting untuk melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis karena dapat membantu asupan gizi bagi siswa, membantu siswa yang ekonominya rendah dan kesulitan membeli jajan saat disekolah, serta dapat menabung lebih banyak karena sudah ada Makan Bergizi Gratis. Selanjutnya, sebanyak 87% siswa (41 Siswa) merasa penting terhadap program Makan Bergizi Gratis dari Pemerintah, karena semua siswa dapat merasakan makanan yang memiliki gizi seimbang, siswa tidak perlu repot membawa bekal dari rumah, dan siswa bisa menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Sebanyak 2 % siswa (1 siswa) merasakan program Makan Bergizi Gratis tidak terlalu penting, karena menu yang membosankan, tidak ada bedanya dengan makan di rumah, serta merasa mengantuk dan malas setelah makan.

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan diatas, dapat dianalisis sesuai Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis bahwa SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis sudah sesuai dengan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut dapat dipaparkan analisis sebagai berikut:

1. Penyiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Pada petunjuk teknis menunjukkan bahwa penyiapan SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis milik Badan Gizi Nasional memiliki spesifikasi

luas tanah 600 – 1000 m², luas bangunan 300 – 800 m², Lokasi dekat dengan lingkungan sekolah 3000 sampai 4000 siswa dalam radius maksimal 6 KM atau jarak tempuh maksimal 30 menit dari Lokasi SPPG, Listrik terjangkau PLN, jalan akses logistic yang memadai memiliki lebar sekitar 5 meter, lingkungan sekitar higienis dan jauh dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Seluruh SPPG yang beroperasi harus memiliki spesifikasi tersebut agar bisa menjalankan program Makan Bergizi Gratis dengan standar yang sudah ditetapkan.

SPPG Wonocolo dalam penyiapan SPPG telah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan data hasil wawancara dengan Kepala SPPG Wonocolo yaitu Bapak Syamsudin Duka, S.Sos menerangkan bahwa SPPG Wonocolo memiliki luas bangunan 400 m² dan luas tanah 600 m², akses jalan yang memadai, serta lokasi SPPG jauh dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Wonocolo setiap harinya menyalurkan 4000 porsi Makan Bergizi Gratis kepada penerima manfaat yang berada dalam radius 6 KM atau waktu tempuh 30 menit dari Lokasi MBG.

SPPG Rungkut dalam penyiapan SPPG juga telah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SPPG yaitu Ibu Fadhilah Munawaroh menerangkan bahwa SPPG Rungkut memiliki luas bangunan 500 m² dan luas tanah 600 m² setiap harinya SPPG Rungkut menyalurkan 3890 Porsi Makan Bergizi Gratis kepada penerima

manfaat yang berada dalam radius 6 KM atau waktu tempuh 30 menit dari Lokasi MBG.

2. Penerima Manfaat

Pada petunjuk teknis, penerima manfaat sudah disebutkan secara rinci, diantaranya yaitu Anak Balita, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah(MTs), Sekolah Menengah Akhir (SMA) /Madrasah Aliyah (MA) /Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Santri, Pendidikan Khusus, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui.

SPPG Wonocolo dalam menyalurkan program MBG kepada penerima manfaat sudah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Progam Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa, Program Bergizi Gratis di SPPG Wonocolo menargetkan penerima manfaat yang mencakup spektrum luas, mulai dari siswa Taman Kanak-kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu PAUD (Kelompok Bermain) Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13 Surabaya, SMAN 10 Surabaya, dan SMK PGRI 1 Surabaya., serta kelompok rentan lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal tersebut menunjukkan SPPG Wonocolo sudah mendistribusikan program MBG kepada penerima manfaat dengan tepat sasaran.

Sistem pengantaran makanan dimulai dari kloter pertama pukul 07.45 yang ditujukan kepada peserta didik PAUD, TK dan SD. SPPG Wonocolo terkait penerima manfaat dalam kloter pertama yaitu PAUD (Kelompok Bermain) Yasporbi, SD Taquma. Kemudian dilanjutkan untuk kloter kedua dikirimkan pukul 10.00 ditujukan kepada peserta didik SMPN 13 Surabaya, SMAN 10 Surabaya, dan SMK PGRI 1 Surabaya.

SMPN 13 Surabaya berada di Jl. Jemursari II Surabaya, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, dan lokasi dapur produksi berada di Jl. Jemur Andayani XV/12, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 terkait petunjuk teknis program makan bergizi gratis menjelaskan bahwa titik SPPG dalam radius maksimal 6 km dan/atau waktu tempuh maksimal 30 menit dengan jumlah penerima manfaat, maka SMPN 13 Surabaya telah sesuai dengan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 terkait petunjuk teknis program makan bergizi gratis.

SPPG Rungkut dalam menyalurkan program MBG kepada penerima manfaat sudah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan data hasil wawancara menunjukkan bahwa sasaran utama Program Makan Bergizi (MBG) di SPPG Rungkut mencakup spektrum luas dari peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Tk Tunas Pertiwi, Tk Wijaya 4, Ra Sudirman, Tk At Taqwa, SDN Penjaringan Sari 1, SDN Penjaringan Sari 2, MI Al Bukhori, MI At Taqwa, MTSN 3 Surabaya, dan MAN 3 Surabaya. Program

MBG juga diperluas penyalurannya kepada kelompok rentan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita. Sesuai data tersebut menunjukkan bahwa SPPG Rungkut sudah mengimplementasikan pendistribusian program MBG sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis.

3. Pelaksanaan Operasional SPPG

Pada petunjuk teknis, pelaksanaan operasional SPPG terdiri dari 3 point yaitu organisasi dan tugas, yang berisikan 1 kepala SPPG, 1 Ahli Gizi, 1 orang akuntan, pengawas SPPG, persiapan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, pemorsian, packing, distribusi, petugas kebersihan, dan pencuci alat makan. Selanjutnya belanja bahan yang pada pokoknya bahan yang digunakan harus segar, berkualitas baik, sayur secara fisik terlihat segar dan tidak layu, dalam hal ini untuk semua bahan baik daging, telur, buah-buahan, susu, serta sayuran. Ketiga, jaminan kualitas dan kuantitas makanan dimana makanan yang disajikan harus memenuhi standar kesehatan dan standar gizi, sebelum makanan didistribusikan ke penerima manfaat harus dilakukan pengambilan sample sesuai SOP oleh petugas yang sedang bertugas, dan standar gizi berdasar pada Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Pada tahap Operasional tantangan terbesar SPPG dalam pengimplementasian Makan Bergizi Gratis Adalah menjaga kualitas makanan tetap segar dan tidak basi sampai kepada penerima manfaat. Namun pada wilayah SPPG Wonocolo yaitu di SMPN 13 Surabaya sebagai penerima manfaat pernah ditemukan sekitar 7 dari 32 porsi MBG dalam satu kelas tidak

layak konsumsi. Humas SMPN 13 Surabaya mengakui jika memang ada beberapa keluhan dari siswa terkait menu MBG Memang ada beberapa kali makanan mengalami hambatan, mereka alergi dan ada yang tidak termakan.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Cahyo selaku Penanggung jawab pengolahan bahan makanan mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan makanan cepat basi diantaranya :

1. Pemilihan bahan baku yang tidak sesuai dengan SOP

Pemilihan bahan baku sangat penting dalam menjaga kualitas makanan karena bahan yang segar memiliki kadar air dan nutrisi optimal yang menghambat perkembangan mikroba, sedangkan bahan berkualitas buruk justru mempercepat pembusukan. Bapak Cahyo juga menjelaskan terkait cara memilih bahan baku yang berkualitas baik diantaranya pemilihan daging harus berwarna merah dan segar, ikan Ketika ditekan cepat Kembali dan kenyal, ayam dagingnya harus masih segar dan tidak mengeluarkan bau busuk, telur berkualitas baik upayakan langsung dari peternak, sayur secara fisik terlihat segar dan tidak layu, buah dalam kondisi segar dan bebas pestisida. Dan memastikan bahan baku sebelum dimasak dalam kondisi segar.

Akan tetapi di SPPG Wonocolo terkadang masih terkendala dalam pemilihan kualitas bahan baku yang baik mengingat program Makan Bergizi Gratis ini dialokasikan dana yang terbatas dan Surabaya merupakan kota

¹²⁸ Ardiansyah Fajar Syahlillah, "Ombudsman Temukan Sayur MBG Basi di SMPN 13 Surabaya," IDN Times Jatim, 26 Februari 2025, <https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/ombudsman-temukan-sayur-mbg-basi-di-smpn-13-surabaya-00-hc4tp-hnt0q2>.

dengan kebutuhan harga bahan pokok yang sangat relatif tinggi sehingga untuk mencari bahan baku yang berkualitas bagus serta murah sangat sulit, ditambah SPPG wonocolo merupakan salah satu SPPG yang memiliki penerima manfaat dengan batas maksimal 4000 penerima manfaat dengan demikian kebutuhan bahan baku secara otomatis lebih banyak daripada SPPG yang lain.

2. Rentan waktu penyimpanan bahan baku

Rentan waktu penyimpanan bahan baku sangat memengaruhi kualitas makanan karena semakin lama disimpan pada suhu tidak tepat, semakin cepat terjadi degradasi nutrisi dan pertumbuhan mikroorganisme. Penyimpanan bahan baku lebih dari 2 jam pada suhu ruang mempercepat pembusukan, terutama untuk daging, sayur, dan susu yang rentan enzim dan bakteri. Bapak Cahyo menjelaskan bahwa bahan baku sebelum diterima harus dicek oleh bagian pengawas bahan baku baik kualitas maupun kuantitas setiap itemnya

3. Tingkat kebersihan pencucian ompreng

Tingkat kebersihan pencucian ompreng sangat memengaruhi makanan cepat basi karena ompreng yang tidak bersih menyimpan residu bakteri, jamur, atau sisa makanan sebelumnya yang mempercepat kontaminasi pada bahan baru. Residu lemak atau partikel organik di ompreng menjadi media tumbuh mikroorganisme seperti *E. coli* atau *Staphylococcus*, yang menyebabkan pembusukan dalam hitungan jam jika tidak dicuci dengan sabun panas dan air mengalir, di mana studi menunjukkan bahwa peralatan

dapur kotor dapat meningkatkan kadar bakteri hingga 100 kali lipat, memperpendek masa simpan makanan segar.

4. Teknik pengolahan yang tidak benar

Teknik pengolahan makanan juga perlu diperhatikan agar kualitas makanan tetap terjaga, terlalu lama memasak juga mempengaruhi makanan tersebut cepat basi maka harus disesuaikan dengan rentan waktu secara optimal.

Pasca kejadian tersebut Satuan Pelayanan Pemeniuhan Gizi (SPPG) Wonocolo melakukan evaluasi mendalam dengan mengintegrasikan beberapa titik kendali mutu kritis untuk menjamin keamanan dan kelayakan pangan. Bapak Syamsudin Duka selaku kepala SPPG menjelaskan bahwa Kontrol tahap pertama dilakukan pada fase persiapan, di mana dilakukan penyortiran intensif terhadap bahan makanan baku untuk memastikan hanya bahan dengan kualitas baik yang diproses, sehingga memenuhi standar kelayakan olah. Kontrol tahap kedua (process control) terletak pada bagian pengolahan atau memasak. Setelah makanan matang, dilakukan pengujian organoleptik (tasting) sebelum memasuki fase pemorsian, bertujuan untuk memvalidasi kelayakan konsumsi dan kesesuaian rasa.

Setelah distribusi, kontrol tahap ketiga didelegasikan kepada pihak sekolah melalui penunjukan seorang koordinator MBG. Koordinator ini berfungsi sebagai kontrol terakhir yang wajib memverifikasi kelayakan konsumsi makanan sebelum didistribusikan kepada siswa, sebagai upaya penjaminan mutu di titik serah terima. Dalam upaya mitigasi risiko keamanan

pangan, SPPG Wonocolo secara spesifik menggunakan air kemasan galon dalam proses memasak untuk menghilangkan risiko kontaminasi zat kimia yang mungkin timbul dari penggunaan air biasa.

Manajemen risiko keracunan pangan ditangani secara serius. Insiden keracunan berpotensi mengakibatkan penutupan fasilitas dapur dan penghentian operasional. Protokol hukum dan investigasi akan diaktifkan, mencakup pengambilan sampel makanan untuk diperiksa. Jika ditemukan unsur kelalaian dari pihak dapur, hal tersebut dapat berimplikasi pada sanksi pidana. Selain itu, insiden tersebut secara otomatis memunculkan dimensi tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan dan keselamatan penerima manfaat.

Implementasi Program Gizi ditekankan pada prinsip pemenuhan kebutuhan nutrisi yang seimbang dan bervariasi. Kualitas pemenuhan gizi diukur melalui referensi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang disesuaikan berdasarkan variabel usia dan jenis kelamin penerima manfaat. Untuk mengatasi potensi kebosanan menu, program mengadopsi strategi diversifikasi menu yang ketat, di mana setiap bulan diupayakan untuk menyajikan rangkaian menu yang berbeda-beda. Untuk menjamin bahwa setiap porsi memenuhi spesifikasi gizi yang telah ditetapkan, proses kontrol porsi (*portion control*) dilaksanakan setelah pemasakan melalui kegiatan penimbangan. Hal ini memastikan bahwa kuantitas makanan yang didistribusikan sesuai dengan estimasi kebutuhan nutrisi per individu.

Siklus operasional di SPPG Wonocolo Bapak Syamsudin Duka menjelaskan bahwa berlangsung secara simultan dan berkesinambungan selama 24 jam. Fase awal (preparasi) dimulai pada sore hari dengan penyiapan dan sterilisasi bahan baku. Proses memasak dimulai setelah persiapan bahan selesai dan diperkirakan selesai hingga pukul 03.00 dini hari, diikuti oleh fase pemorsian (portioning) yang bersifat intensif dan memakan waktu lama. Pendistribusian dilaksanakan dalam dua gelombang: distribusi pertama pada pukul 07.00 pagi menargetkan jenjang TK hingga SD, sementara distribusi kedua pada pukul 11.00 siang menyasar jenjang SMP hingga SMA/SMK. Sebagai bagian dari mandat gizi tambahan, pada hari Senin (untuk alokasi Selasa dan Rabu) dan Kamis (untuk alokasi Jumat), SPPG Wonocolo menyelenggarakan distribusi khusus bagi kelompok rentan B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

SPPG Rungkut dalam hal pelaksanaan SPPG sudah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Rungkut menetapkan standar gizi yang berbasis pada Angka Kecukupan Gizi (AKG), merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019. Ketentuan ini mengatur kontribusi energi dari porsi makanan yang disajikan, di mana alokasi untuk sarapan menyumbang 20-25% dari kebutuhan harian, sementara porsi makan siang berkontribusi sebesar 30-35%.

Dalam menjamin keamanan pangan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan serangkaian standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Prosedur ini mencakup uji keamanan makanan sebelum penyaluran kepada penerima manfaat, penerapan prinsip higiene sanitasi pangan secara menyeluruh, serta pengawasan intensif oleh tenaga kesehatan lingkungan. Komitmen terhadap keamanan pangan ini diperkuat melalui kepemilikan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyedia jasa boga yang terlibat dalam program.

Selain analisis berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis, peneliti juga melakukan analisis berdasarkan teori *good governance* yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* memiliki 8 prinsip diantaranya partisipasi publik, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.¹²⁹ Berikut analisis Implementasi Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis dengan studi di SPPG Wonocolo, SPPG Rungkut, dan MTSN 3 Surabaya (penerima manfaat):

1. Partisipasi Publik

Prinsip partisipasi publik menekankan keterlibatan semua elemen yang berkepentingan dalam proses pengambilan Keputusan dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dari Pemerintah. Berdasarkan data hasil

¹²⁹ United Nations Economic And Social Commission For Asia And The Pacific (Unescap). (2017). *What Is Good Governance?* Unescap.

wawancara, SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut telah menerapkan prinsip partisipasi public dalam mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis. SPPG Wonocolo melibatkan berbagai elemen masyarakat yang mencakup pegawai operasional seperti staf pengolahan makanan, pencuci alat makan, driver, ahli gizi, dan akuntan.

Selain itu, SPPG Wonocolo juga mendata penerima manfaat baik dari jumlah penerima manfaat sampai dengan data alergi yang diderita oleh penerima manfaat dengan tujuan supaya menu makan bergizi gratis tidak menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat. Setiap dua minggu sekali, Kepala SPPG Wonocolo turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menerima saran dan keluhan selama berjalannya program Makan Bergizi Gratis dilakukan. Masukan dan keluhan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk SPPG Wonocolo supaya lebih baik dalam memberikan pelayanan program Makan Bergizi Gratis.

Sedangkan SPPG Rungkut dalam partisipasi public memiliki kesamaan seperti SPPG Wonocolo, yaitu melakukan pendataan kepada penerima manfaat dalam radius 6 KM atau 30 Menit waktu tempuh yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Pesantren, Sekolah Keagamaan, hingga Pendidikan Layanan Khusus. Selain peserta didik,

di Kecamatan Rungkut, program MBG juga diperluas penyalurannya kepada kelompok rentan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita.

SPPG Rungkut juga melibatkan Masyarakat sekitar untuk ikut terlibat dalam penyajian Makan Bergizi Gratis. Keterlibatan Masyarakat berupa adanya lapangan pekerjaan bagi Masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat sekitar. Pihak SPPG juga melibatkan pihak sekolah sebagai penerima manfaat untuk menyampaikan keluhan atau saran kepada pihak SPPG sebagai bentuk evaluasi supaya dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis menjadi lebih baik kedepannya.

Selain kedua SPPG tersebut, Kepala MTS Negeri 3 Surabaya sebagai penerima manfaat juga menyampaikan sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) diimplementasikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melaksanakan koordinasi intensif dengan kepala sekolah untuk menyelenggarakan sosialisasi prosedur kepada seluruh pemangku kepentingan. Untuk memastikan keamanan pangan, Dinas Kesehatan turut memberikan himbauan kepada pihak sekolah agar melakukan kontrol makanan sebelum distribusi kepada siswa, sebagai langkah preventif terhadap risiko keracunan pangan dan potensi bahaya lainnya.

Sebagai bagian dari prosedur operasional standar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melaksanakan koordinasi harian dengan pihak sekolah terkait jadwal pengantaran makanan sebelum proses distribusi dilakukan. Selain koordinasi logistik, SPPG juga menerapkan sistem pelaporan berbasis digital untuk menjamin transparansi program. Setiap hari, SPPG

mengirimkan formulir elektronik (*Google Form*) kepada pihak sekolah. Formulir ini wajib diisi oleh sekolah dan berfungsi sebagai bukti otentik serta laporan resmi yang menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil dilaksanakan pada hari tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis telah menerapkan prinsip Partisipasi Publik. Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil wawancara yang sudah dipaparkan. Partisipasi dari berbagai elemen seperti perekrutan pegawai dari berbagai elemen masyarakat dan melakukan koordinasi dengan penerima manfaat, yaitu pihak sekolah membuktikan keterbukaan partisipasi dengan tujuan supaya program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan optimal.

2. Supremasi Hukum

Prinsip Supremasi Hukum memastikan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan yaitu Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan data hasil wawancara yang sudah dipaparkan diatas, SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut telah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis.

3. Transparansi

Prinsip Transparansi menekan keterbukaan informasi dan kebijakan. Pada program Makan Bergizi Gratis, prinsip transparansi dapat berupa menu

makanan harian, kriteria penerima manfaat (siswa), dan alokasi dana harus dipublikasikan lewat media sosial atau website resmi SPPG atau pihak sekolah. Jika hal ini dilakukan, maka proses pengambilan Keputusan terkait program Makan Bergizi Gratis dapat dikatakan transparan. Dalam hal ini, SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut dapat dikatakan transparan karena kedua SPPG tersebut telah mempublikasikan menu harian dan kriteria penerima manfaat di akun media sosial instagram masing-masing SPPG. Setiap harinya, SPPG Rungkut dan SPPG Wonocolo mempublikasikan menu yang didistribusikan kepada penerima manfaat, meliputi menunya apa saja, jumlah porsi yang didistribusikan, jumlah analisis kandungan gizi, dan tempat pendistribusian program Makan Bergizi Gratis kemana saja. Berdasarkan hal tersebut, SPPG Rungkut dan SPPG Wonocolo sudah dapat dikatakan transparan.

Selain itu, kriteria penerima manfaat dan alokasi dana juga sudah disebutkan bahwa SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut memiliki kriteria penerima manfaat mulai dari siswa PIAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SLB, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Santri. Kemudian dalam pengalokasian dana, anggaran yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis ditetapkan berdasarkan ukuran porsi. Secara spesifik, porsi besar dianggarkan sebesar Rp10.000, sementara porsi kecil dianggarkan sebesar Rp8.000. Secara keseluruhan, setiap penerima manfaat memiliki alokasi anggaran total sebesar Rp15.000 per hari. Sisa dana dari selisih biaya porsi makanan (Rp15.000 dikurangi biaya porsi) diperuntukkan bagi pembiayaan biaya operasional. Komponen utama dari biaya operasional ini meliputi

remunerasi (gaji) karyawan serta biaya utilitas esensial seperti pembelian gas, listrik, dan air.

4. Daya Tanggap

Prinsip ini menekankan untuk memiliki respon yang baik dalam menghadapi permasalahan selama program Makan Bergizi Gratis diimplementasikan. Apabila mengacu pada data hasil wawancara, SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut memiliki daya tanggap yang cukup baik dalam merespon masukan atau keluhan dari penerima manfaat. SPPG Wonocolo memiliki jadwal evaluasi selama 2 minggu sekali kepada pihak eksternal SPPG, dimana Kepala SPPG turun langsung untuk memonitor ke setiap sekolah dengan tujuan mengetahui keluhan atau permasalahan yang dihadapi oleh siswa sebagai penerima manfaat. Hasil dari monitoring langsung tersebut menjadi landasan perbaikan pihak SPPG dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Sedangkan SPPG Rungkut juga melakukan hal yang sama, dimana pihak sekolah selaku penerima manfaat dapat melakukan pelaporan melalui *google form* yang sudah disediakan pihak SPPG untuk mengetahui kendala atau keluhan siswa selaku penerima manfaat. Selain itu, Kepala SPPG Rungkut juga turun langsung untuk memonitor kondisi lapangan saat pendistribusian program Makan Bergizi Gratis dan mendengarkan keluhan serta masukan dari pihak sekolah. Berdasarkan hal tersebut, SPPG Rungkut dan SPPG Wonocolo memiliki daya tanggap yang cukup baik dalam memberikan Solusi permasalahan yang dihadapi selama pengimplementasian Program Makan Bergizi Gratis.

5. Orientasi Konsensus

Prinsip ini menekankan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan terbaik yang mewakili kepentingan berbagai pihak (Pemerintah, Sekolah, SPPG, dan Masyarakat). Berdasarkan data yang didapatkan, Kepala Sekolah MTSN 3 Surabaya menjelaskan sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) diimplementasikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melaksanakan koordinasi intensif dengan kepala sekolah untuk menyelenggarakan sosialisasi prosedur kepada seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi ini menekankan beberapa aturan fundamental bagi penerima manfaat, meliputi kewajiban membawa peralatan makan pribadi, pelaksanaan cuci tangan sebelum makan sebagai bagian dari praktik higienis, dan larangan merusak tempat makan yang disediakan. Selain siswa, pihak sekolah juga melaksanakan sosialisasi kepada wali murid terkait mekanisme dan penerimaan program MBG. Untuk memastikan keamanan pangan, Dinas Kesehatan turut memberikan himbauan kepada pihak sekolah agar melakukan kontrol makanan sebelum distribusi kepada siswa, sebagai langkah preventif terhadap risiko keracunan pangan dan potensi bahaya lainnya.

Sebagai bagian dari prosedur operasional standar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melaksanakan koordinasi harian dengan pihak sekolah terkait jadwal pengantaran makanan sebelum proses distribusi dilakukan. Selain koordinasi logistik, SPPG juga menerapkan sistem pelaporan berbasis digital untuk menjamin transparansi program. Setiap hari, SPPG

mengirimkan formulir elektronik (*Google Form*) kepada pihak sekolah. Formulir ini wajib diisi oleh sekolah dan berfungsi sebagai bukti otentik serta laporan resmi yang menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil dilaksanakan pada hari tersebut.

Sejauh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung, sekolah terkait belum menghadapi tantangan yang bersifat intens atau berkelanjutan. Namun, pada fase awal implementasi program, sempat teridentifikasi adanya permasalahan kecil terkait komposisi menu, khususnya kekurangan dalam penyediaan buah dan lauk pauk. Pihak sekolah segera menyampaikan observasi kekurangan menu tersebut secara langsung kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Respon cepat dari pihak SPPG ditunjukkan dengan tindakan korektif segera, di mana menu yang bermasalah langsung diganti dan dilengkapi sesuai standar gizi yang ditetapkan.

6. Keadilan

Pada prinsip ini memastikan bahwa semua penerima manfaat, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati program Makan Bergizi Gratis dari Pemerintah. Berdasarkan data hasil wawancara yang sudah didapatkan, SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut sudah mengimplementasikan prinsip keadilan. Hal tersebut terbukti dari menu makanan yang didistribusikan semuanya sama serta porsi makanan setiap jenjang Pendidikan juga disesuaikan dengan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang sudah tercantum dalam petunjuk Surat Keputusan Badan

Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Prinsip ini memastikan bahwa Sumber Daya yang digunakan optimal untuk mencapai tujuan dari program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan data yang sudah didapatkan, efektivitas dan efisiensi dilandaskan pada sarana dan prasarana yang memadai. SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut dalam mengimplementasikan program Makan Bergizi gratis telah berusaha se-efektivitas dan se-efisien mungkin. Hal tersebut diperlihatkan sejak awal pendirian SPPG yang memiliki tahap serta prosedur yang cukup ketat. Mulai dari spesifikasi, kesiapan staf atau personal SPPG yang meliputi jumlah karyawan dalam bidang memasak makanan, belanja bahan makanan, pemorsian makanan, ahli gizi, akuntan, driver, dan penyalur Makan Bergizi Gratis ke penerima manfaat.

Selain itu, masing-masing SPPG juga memiliki SOP atau Jadwal operasional yang pada intinya proses memasak dimulai setelah persiapan bahan selesai dan diperkirakan selesai hingga pukul 03.00 dini hari, diikuti oleh fase pemorsian (portioning) yang bersifat intensif dan memakan waktu lama. Pendistribusian dilaksanakan dalam dua gelombang: distribusi pertama pada pukul 07.00 pagi menargetkan jenjang TK hingga SD, sementara distribusi kedua pada pukul 11.00 siang menyasar jenjang SMP hingga SMA/SMK. Sebagai bagian dari mandat gizi tambahan, pada hari Senin (untuk alokasi Selasa dan Rabu) dan Kamis (untuk alokasi Jumat), SPPG Wonocolo

menyelenggarakan distribusi khusus bagi kelompok rentan B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

8. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban SPPG terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan data hasil wawancara, SPPG Rungkut dan SPPG Wonocolo memiliki sistem pelaporan program Makan Bergizi Gratis yang sama. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program Makan Bergizi (MBG) dilaksanakan melalui sistem berjenjang yang komprehensif. Struktur ini melibatkan komite monitoring mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat sekolah. Di samping itu, pengumpulan data dilakukan secara independen oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei berkala. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja secara berkala. Aspek krusial dalam sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan adalah pemanfaatan teknologi digital.

Mekanisme pendanaan program yang berbasis digital memungkinkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Inspektorat Utama untuk melaksanakan pemantauan transaksi dan operasional secara real-time. Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas keuangan dan menjaga kualitas pelaksanaan program. Secara spesifik, operasional harian didukung oleh dua sistem utama yaitu DIALUR digunakan untuk pelaporan harian dan pengarsipan dokumen terkait, sedangkan TAUWAS Care berfungsi sebagai platform khusus untuk pemantauan dan pengawasan kinerja SPPG secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis diatas, pengimplementasian program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut sudah selaras dengan apa yang diatur oleh Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025. Selain itu, pengimplementasian program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut sudah memenuhi prinsip-prinsip teori *good governance* yang terdiri dari partisipasi masyarakat, supremasi hukum, daya tanggap, transparansi, keadilan, efektivitas dan efisien, berorientasi konsensus, serta akuntabilitas.

Selain menganalisis dengan teori *Good Governance* peneliti juga melakukan analisis berdasarkan konsep Ketahanan Keluarga yang terdiri dari ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, dan juga ketahanan Psikologi. Berikut merupakan analisis Implementasi Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis dengan studi di SPPG Wonocolo, SPPG Rungkut, dan MTSN 3 Surabaya (penerima manfaat):

1. Ketahanan Fisik

Kesehatan dan kebugaran fisik merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh pada ketahanan diri dan keluarga. Selain itu, kesehatan keluarga dapat juga dilihat dari kualitas makanannya, karena makanan sangat mempengaruhi kesehatan setiap orang. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperkuat aspek ini melalui penyediaan nutrisi seimbang bagi anak-anak dari keluarga rentan, yang pada gilirannya mengurangi risiko stunting, meningkatkan daya tahan tubuh, serta

mendukung pertumbuhan optimal. Secara keseluruhan, MBG menjadi instrumen kebijakan publik yang mempererat fondasi ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Pada petunjuk teknis menjelaskan bahwa bahan yang digunakan harus segar, berkualitas baik, sayur secara fisik terlihat segar dan tidak layu, dalam hal ini untuk semua bahan baik daging, telur, buah-buahan, susu, serta sayuran. Ketiga, jaminan kualitas dan kuantitas makanan dimana makanan yang disajikan harus memenuhi standar kesehatan dan standar gizi, sebelum makanan didistribusikan ke penerima manfaat harus dilakukan pengambilan sample sesuai SOP oleh petugas yang sedang bertugas, dan standar gizi berdasar pada Angka Kecukupan Gizi (AKG). Hal ini menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi tiap anak guna mewujudkan generasi Indonesia Emas tahun 2045.

2. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan keluarga untuk bertahan dan pulih dari berbagai tantangan hidup, termasuk aspek ketahanan ekonomi yang melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan, penganggaran, dan kemampuan menghadapi fluktuasi ekonomi seperti inflasi, pengangguran, atau krisis finansial. Program makan bergizi gratis, yang sering diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga sosial, bertujuan untuk menyediakan nutrisi seimbang tanpa biaya kepada keluarga kurang mampu, sehingga berkontribusi langsung pada

penguatan ketahanan ekonomi dengan mengurangi beban pengeluaran harian untuk kebutuhan pokok seperti makanan.

Program makan bergizi gratis membantu keluarga menghemat anggaran rumah tangga yang biasanya dialokasikan untuk membeli bahan makanan, yang bisa mencapai persentase signifikan dari pendapatan bulanan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Dengan akses gratis ke makanan bergizi, keluarga dapat mengalihkan dana tersebut ke kebutuhan lain seperti pendidikan anak, pembayaran tagihan utilitas, atau tabungan darurat, sehingga meningkatkan stabilitas finansial mereka. Hal ini secara langsung memperkuat ketahanan ekonomi karena mengurangi risiko keluarga jatuh ke dalam utang atau kemiskinan ekstrem akibat biaya hidup yang tinggi.

Dalam jangka panjang, program ini tidak hanya mengatasi kekurangan nutrisi tetapi juga mencegah biaya kesehatan yang tinggi akibat penyakit terkait malnutrisi, seperti penurunan produktivitas kerja atau rawat inap. Keluarga yang sehat secara fisik dan nutrisi cenderung memiliki anggota yang lebih produktif, sehingga meningkatkan pendapatan keluarga melalui pekerjaan yang lebih stabil atau peluang ekonomi baru. Dengan demikian, program makan bergizi gratis membangun fondasi ketahanan ekonomi yang lebih kuat

Setelah melakukan penelitian ke sekolah, banyak siswa terbantu perekonomiannya dengan adanya program makan bergizi gratis ini, karena program tersebut mengurangi beban finansial orang tua yang

sebelumnya harus menyediakan bekal makan siang setiap hari, sehingga memungkinkan mereka mengalokasikan dana untuk kebutuhan pendidikan atau kesehatan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu mengalami peningkatan konsentrasi dan performa akademik, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan potensi ekonomi jangka panjang bagi keluarga mereka. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung ketahanan ekonomi langsung tetapi juga membuka peluang untuk mobilitas sosial yang lebih baik.

3. Ketahanan Sosial Psikologis

Konsep ketahanan keluarga pada dimensi sosial-psikologis menekankan kemampuan keluarga untuk mempertahankan hubungan emosional yang harmonis, stabilitas mental, dan dukungan antaranggota di tengah tekanan sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi secara tidak langsung melalui peningkatan kesejahteraan anak, yang mencerminkan ketahanan keluarga secara keseluruhan, karena nutrisi yang baik mendukung perkembangan kognitif dan emosional yang menjadi fondasi interaksi sosial positif.

Pada Program Makan Bergizi Gratis, ketahanan sosial-psikologis keluarga diperkuat ketika anak-anak dari keluarga rentan menerima asupan gizi seimbang, mengurangi risiko gangguan konsentrasi atau perilaku akibat kekurangan gizi seperti stunting. Hal ini menciptakan lingkungan keluarga yang lebih stabil, di mana orang tua merasa lega dari

beban nutrisi harian, sehingga dapat fokus pada pengasuhan emosional dan penguatan ikatan keluarga. Program ini sejalan dengan kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan, yang menyoroti kesehatan mental sebagai bagian integral dari kesejahteraan holistik.

Saat melakukan penelitian di sekolah observasi menunjukkan bahwa kegiatan makan bersama secara rutin mempererat pertemanan antarpeserta didik. Anak-anak dari latar belakang ekonomi berbeda duduk bersama menikmati hidangan bergizi, yang memicu interaksi sosial alami seperti berbagi cerita dan tawa, sehingga membangun rasa kebersamaan dan mengurangi stigma kemiskinan. Fenomena ini memperkuat ketahanan sosial-psikologis, karena pengalaman positif di sekolah membawa dampak pulang ke keluarga, meningkatkan kepercayaan diri anak. Makan bersama dalam program ini menciptakan norma sosial inklusif di lingkungan sekolah, di mana anak-anak belajar empati dan kolaborasi sejak dini. Penelitian lapangan mengungkap bahwa frekuensi interaksi ini berkorelasi dengan penurunan konflik antarteman dan peningkatan dukungan emosional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berperan strategis sebagai katalisator konsep ketahanan keluarga secara holistik dengan mendukung dimensi fisik melalui pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian anak sekolah yang mengurangi stunting dan meningkatkan imunitas, sehingga keluarga mampu mempertahankan kesehatan fisik anggotanya secara berkelanjutan. Pada aspek ekonomi, MBG

menghilangkan beban biaya makanan bergizi bagi rumah tangga rentan, membebaskan anggaran untuk pendidikan atau tabungan darurat guna memperkuat stabilitas finansial jangka panjang. Ketahanan sosial-psikologis diperkuat melalui kegiatan makan bersama yang membangun pertemanan akrab di sekolah anak menyukai aspek sosialnya yang meningkatkan kepercayaan diri anak dan kohesi emosional keluarga. Secara keseluruhan, MBG mewujudkan sinergi multidimensional ketahanan keluarga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan, mentransformasi keluarga rentan menjadi unit tangguh melalui intervensi nutrisi terintegrasi.

C. Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam hukum Islam

Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat. Secara etimologis, maqashid berasal dari kata *maqshad*, yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah mengacu pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.¹³⁰ Oleh karena itu, Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh syariat dalam menetapkan hukum-hukum Islam untuk kebaikan umat manusia. Tujuan utama Maqashid Syariah dalam hukum Islam adalah menciptakan kesejahteraan bagi manusia dengan tetap memperhatikan aspek moral dan spiritual.

¹³⁰ Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. Iiit.

Maqashid Syariah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).¹³¹ Dharuriyyat adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hajiyyat merujuk pada kebutuhan yang jika tidak dipenuhi dapat menyebabkan kesulitan dalam kehidupan, sementara tahsiniyyat berkaitan dengan aspek penyempurnaan atau keindahan dalam kehidupan manusia.¹³²

Dalam kebijakan publik, penerapan Maqashid Syariah dapat dilihat dalam berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maqashid Syariah memberikan landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih humanis dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.¹³³ Dengan memahami tujuan utama dari syariat Islam, para pembuat kebijakan dapat merancang program yang lebih efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara holistik. Hal ini menunjukkan bahwa Maqashid Syariah tidak hanya relevan dalam bidang hukum Islam, tetapi juga dalam pengelolaan kebijakan publik yang lebih luas. Misalnya, kebijakan yang berfokus pada kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dapat dikategorikan sebagai implementasi dari

¹³¹ Harahap, *MAQASHID AL-SYARI'AH BERDASARKAN KEMASLAHATAN YANG DIPELIHARA DALAM HUKUM ISLAM*.

¹³² Nasution dan Nasution, *FILSAFAT HUKUM ISLAM*.

¹³³ Thamsir, M., Umar, H., & Adawiyah, R. A. (2025). Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5721-5728.

Maqashid Syariah.¹³⁴ Dengan demikian, prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat menjadi pedoman dalam merancang kebijakan publik yang adil dan berkeadilan.

Konsep *Maqasid Syari'ah* menekankan lima aspek utama yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam kebijakan publik, kelima prinsip ini menjadi landasan dalam merumuskan regulasi yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.¹³⁵ Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan yang relevan terhadap konsep *Maqasid Syari'ah* terkait perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan penelitian ini, implementasi program Makan Bergizi Gratis yang diatur secara teknis melalui Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui penguatan status gizi. Analisis kebijakan ini dari perspektif *Maqashid Syari'ah* memberikan kerangka komprehensif untuk menilai kemaslahatan dan relevansinya dalam konteks kesejahteraan umat. *Maqashid Syari'ah* merujuk pada *al-Kulliyat al-Khams* yaitu

¹³⁴ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.

¹³⁵ Sofian, M. (2023). Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(1), 29-46.

memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa/raga (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Berikut analisis implementasi program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis perspektif *Maqashid Syari'ah* :

1. Penyiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Pada petunjuk teknis menunjukkan bahwa penyiapan SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis milik Badan Gizi Nasional memiliki spesifikasi luas tanah 600 – 1000 m², luas bangunan 300 – 800 m², Lokasi dekat dengan lingkungan sekolah 3000 sampai 4000 siswa dalam radius maksimal 6 KM atau jarak tempuh maksimal 30 menit dari Lokasi SPPG, Listrik terjangkau PLN, jalan akses logistic yang memadai memiliki lebar sekitar 5 meter, lingkungan sekitar higienis dan jauh dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Seluruh SPPG yang beroperasi harus memiliki spesifikasi tersebut agar bisa menjalankan program Makan Bergizi Gratis dengan standar yang sudah ditetapkan.

SPPG Wonocolo dalam penyiapan SPPG telah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan data hasil wawancara dengan Kepala SPPG Wonocolo yaitu Bapak Syamsudin Duka, S.Sos menerangkan bahwa SPPG Wonocolo memiliki luas bangunan 400 m² dan luas tanah 600 m², akses jalan yang memadai, serta lokasi SPPG jauh dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA). SPPG Wonocolo setiap harinya

menyalurkan 4000 porsi Makan Bergizi Gratis kepada penerima manfaat yang berada dalam radius 6 KM atau waktu tempuh 30 menit dari Lokasi MBG.

SPPG Rungkut dalam penyiapan SPPG juga telah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SPPG yaitu Ibu Fadhilah Munawaroh menerangkan bahwa SPPG Rungkut memiliki luas bangunan 500 m² dan luas tanah 600 m² setiap harinya SPPG Rungkut menyalurkan 3890 Porsi Makan Bergizi Gratis kepada penerima manfaat yang berada dalam radius 6 KM atau waktu tempuh 30 menit dari Lokasi MBG.

Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis berdasarkan prinsip *Maqashid Syari'ah* yaitu Perlindungan Jiwa (*Hifdz An-Nafs*). Penentuan spesifikasi luas bangunan dan lokasi yang higienis serta jauh dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah upaya mendasar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan penerima manfaat. Hal tersebut mencegah kontaminasi pangan dari sampah dan polusi, sehingga selaras dengan tujuan Islam untuk menjamin kehidupan yang sehat dan berkualitas. Kemudian, pembatasan radius memastikan makanan bergizi didistribusikan secara cepat dan tepat waktu. Hal ini menjaga kualitas dan kesegaran makanan, sehingga tujuan pemenuhan gizi yang menunjang kelangsungan hidup dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. Penerima Manfaat

Pada petunjuk teknis, penerima manfaat sudah disebutkan secara rinci, diantaranya yaitu Anak Balita, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah(MTs), Sekolah Menengah Akhir (SMA) /Madrasah Aliyah (MA) /Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Santri, Pendidikan Khusus, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui.

SPPG Wonocolo dalam menyalurkan program MBG kepada penerima manfaat sudah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Progam Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa, Program Bergizi Gratis di SPPG Wonocolo menargetkan penerima manfaat yang mencakup spektrum luas, mulai dari siswa Taman Kanak-kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta kelompok rentan lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal tersebut menunjukkan SPPG Wonocolo sudah mendistribusikan program MBG kepada penerima manfaat dengan tepat sasaran.

SPPG Rungkut dalam menyalurkan program MBG kepada penerima manfaat sudah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Progam Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan data hasil wawancara menunjukkan bahwa sasaran utama Program Makan Bergizi (MBG) di SPPG Rungkut mencakup spektrum luas dari peserta didik pada

berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Pesantren, Sekolah Keagamaan, hingga Pendidikan Layanan Khusus. Program MBG juga diperluas penyalurannya kepada kelompok rentan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita. Sesuai data tersebut menunjukkan bahwa SPPG Rungkut sudah mengimplementasikan pendistribusian program MBG sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis sesuai prinsip *Maqashid Syari'ah* yaitu Perlindungan Jiwa (*Hifdz An-Nafs*) dan Perlindungan Keturunan (*Hifdz An-Nasl*). Target penerima manfaat yang mencakup kelompok usia rentan (Balita, anak sekolah) dan kelompok biologis rentan (Ibu Hamil, Ibu Menyusui) adalah upaya krusial untuk menjamin kelangsungan hidup dan kualitas generasi mendatang. Pemenuhan gizi pada ibu hamil dan balita secara spesifik adalah perlindungan terbaik bagi keturunan.

3. Pelaksanaan Operasional SPPG

Pada petunjuk teknis, pelaksanaan operasional SPPG terdiri dari 3 point yaitu organisasi dan tugas, yang berisikan 1 kepala SPPG, 1 Ahli Gizi, 1 orang akuntan, pengawas SPPG, persiapan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, pemorsian, packing, distribusi, petugas kebersihan, dan pencuci alat makan. Selanjutnya belanja bahan yang pada pokoknya bahan yang digunakan

harus segar, berkualitas baik, sayur secara fisik terlihat segar dan tidak layu, dalam hal ini untuk semua bahan baik daging, telur, buah-buahan, susu, serta sayuran. Ketiga, jaminan kualitas dan kuantitas makanan dimana makanan yang disajikan harus memenuhi standar kesehatan dan standar gizi, sebelum makanan didistribusikan ke penerima manfaat harus dilakukan pengambilan sample sesuai SOP oleh petugas yang sedang bertugas, dan standar gizi berdasar pada Angka Kecukupan Gizi (AKG).

SPPG Wonocolo dalam hal pelaksanaan SPPG sudah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonocolo mengintegrasikan beberapa titik kendali mutu kritis untuk menjamin keamanan dan kelayakan pangan. Kontrol tahap pertama dilakukan pada fase persiapan, di mana dilakukan penyortiran intensif terhadap bahan makanan baku untuk memastikan hanya bahan dengan kualitas baik yang diproses, sehingga memenuhi standar kelayakan olah. Kontrol tahap kedua (process control) terletak pada bagian pengolahan atau memasak. Setelah makanan matang, dilakukan pengujian organoleptik (tasting) sebelum memasuki fase pemorsian, bertujuan untuk memvalidasi kelayakan konsumsi dan kesesuaian rasa.

Setelah distribusi, kontrol tahap ketiga didelegasikan kepada pihak sekolah melalui penunjukan seorang koordinator MBG. Koordinator ini berfungsi sebagai kontrol terakhir yang wajib memverifikasi kelayakan

konsumsi makanan sebelum didistribusikan kepada siswa, sebagai upaya penjaminan mutu di titik serah terima. Dalam upaya mitigasi risiko keamanan pangan, SPPG Wonocolo secara spesifik menggunakan air kemasan galon dalam proses memasak untuk menghilangkan risiko kontaminasi zat kimia yang mungkin timbul dari penggunaan air biasa.

Manajemen risiko keracunan pangan ditangani secara serius. Insiden keracunan berpotensi mengakibatkan penutupan fasilitas dapur dan penghentian operasional. Protokol hukum dan investigasi akan diaktifkan, mencakup pengambilan sampel makanan untuk diperiksa. Jika ditemukan unsur kelalaian dari pihak dapur, hal tersebut dapat berimplikasi pada sanksi pidana. Selain itu, insiden tersebut secara otomatis memunculkan dimensi tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan dan keselamatan penerima manfaat.

Implementasi Program Gizi ditekankan pada prinsip pemenuhan kebutuhan nutrisi yang seimbang dan bervariasi. Kualitas pemenuhan gizi diukur melalui referensi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang disesuaikan berdasarkan variabel usia dan jenis kelamin penerima manfaat. Untuk mengatasi potensi kebosanan menu, program mengadopsi strategi diversifikasi menu yang ketat, di mana setiap bulan diupayakan untuk menyajikan rangkaian menu yang berbeda-beda. Untuk menjamin bahwa setiap porsi memenuhi spesifikasi gizi yang telah ditetapkan, proses kontrol porsi (portion control) dilaksanakan setelah pemasakan melalui kegiatan penimbangan. Hal ini

memastikan bahwa kuantitas makanan yang didistribusikan sesuai dengan estimasi kebutuhan nutrisi per individu.

SPPG Rungkut dalam hal pelaksanaan SPPG sudah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Rungkut menetapkan standar gizi yang berbasis pada Angka Kecukupan Gizi (AKG), merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019. Ketentuan ini mengatur kontribusi energi dari porsi makanan yang disajikan, di mana alokasi untuk sarapan menyumbang 20-25% dari kebutuhan harian, sementara porsi makan siang berkontribusi sebesar 30-35%.

Dalam menjamin keamanan pangan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan serangkaian standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Prosedur ini mencakup uji keamanan makanan sebelum penyaluran kepada penerima manfaat, penerapan prinsip higiene sanitasi pangan secara menyeluruh, serta pengawasan intensif oleh tenaga kesehatan lingkungan. Komitmen terhadap keamanan pangan ini diperkuat melalui kepemilikan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyedia jasa boga yang terlibat dalam program.

Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis sesuai prinsip *Maqashid Syari'ah* yaitu Perlindungan Jiwa (*Hifdz An-Nafs*), Perlindungan Jiwa (*Hifdz An-Nafs*), Perlindungan Akal (*Hifdz Al-Aql*). Seluruh rangkaian kontrol mutu yang ketat (sejak bahan mentah hingga titik serah terima) adalah bentuk ikhtiar

maksimal dalam menjaga keselamatan dan menghindari bahaya (*mafsadah*) keracunan pangan. Hal ini sejalan dengan kaidah syariah untuk menjauhi segala yang membahayakan jiwa. Adanya ancaman sanksi pidana jika terjadi kelalaian mencerminkan fungsi hukum (*siyasah syar'iyah*) sebagai pencegah (*zawajir*) agar pelaksana program berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Ini menguatkan komitmen menjaga keselamatan penerima manfaat. Pemenuhan nutrisi yang seimbang (sesuai AKG) dan strategi diversifikasi menu adalah upaya untuk memastikan tubuh dan otak penerima manfaat berkembang optimal, sehingga mereka dapat menggunakan akalunya untuk belajar dan beribadah.

Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis yang diimplementasikan berlandaskan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*. Program ini secara dominan merealisasikan perlindungan fundamental atas jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz an-nasl*), sekaligus memberikan dampak positif pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui stimulasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada komitmen pelaksana dalam menjamin kualitas, keamanan, dan akuntabilitas sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan, sehingga masalah yang dituju dapat terwujud secara paripurna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi program makan bergizi gratis terkait Operasional oleh SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut sudah selaras dengan apa yang diatur dalam Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025. Selain itu, pengimplementasian program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh SPPG Wonocolo dan SPPG Rungkut selaras dengan prinsip-prinsip teori *good governance* yang terdiri dari partisipasi masyarakat, supremasi hukum, daya tanggap, transparansi, keadilan, efektivitas dan efisien, berorientasi konsensus, serta akuntabilitas. Namun, masih terdapat tantangan serta evaluasi dalam hal menu Makanan Bergizi Gratis yang bervariasi agar tidak membosankan para siswa sebagai penerima manfaat. Selain itu, dalam hal stok dan penyediaan buah serta sayuran pernah mengalami kehabisan stok, sehingga terdapat beberapa sekolah salah satunya di MTSN 3 Surabaya saat awal program MBG dilaksanakan pernah tidak mendapatkan komponen tersebut.
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berperan strategis sebagai katalisator konsep ketahanan keluarga secara holistik dengan mendukung dimensi fisik melalui pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian anak sekolah yang mengurangi stunting dan meningkatkan imunitas, sehingga keluarga mampu mempertahankan kesehatan fisik anggotanya secara berkelanjutan.

Pada aspek ekonomi, MBG menghilangkan beban biaya makanan bergizi bagi rumah tangga rentan, membebaskan anggaran untuk pendidikan atau tabungan darurat guna memperkuat stabilitas finansial jangka panjang. Ketahanan sosial-psikologis diperkuat melalui kegiatan makan bersama yang membangun pertemanan akrab di sekolah anak menyukai aspek sosialnya yang meningkatkan kepercayaan diri anak dan kohesi emosional keluarga. Secara keseluruhan, MBG mewujudkan sinergi multidimensional ketahanan keluarga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan, mentransformasi keluarga rentan menjadi unit tangguh melalui intervensi nutrisi terintegrasi.

3. Implementasi Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam hukum Islam. Program Makan Bergizi Gratis yang diimplementasikan berlandaskan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*. Program ini secara dominan merealisasikan perlindungan fundamental atas jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz an-nasl*), sekaligus memberikan dampak positif pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui stimulasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mengharapkan untuk SPPG Rungkut dan SPPG Wonocolo bisa lebih bervariasi menu

makanannya sehingga tidak menimbulkan rasa bosan kepada penerima manfaat yaitu para siswa di sekolah dan memastikan pemenuhan stok sayuran serta buah-buahan agar penerima manfaat mendapatkan gizi yang seimbang. Selain itu, sesuai dengan teori *good governance* peneliti mengharapkan untuk memperjelas sistem transparansi, selain publikasi melalui akun instagram masing-masing SPPG yang mengimplementasikan program MBG dapat membuat website SPPG agar mudah diakses publik guna kebutuhan transparansi program dan pengalokasian anggaran.

2. Terkait analisis terhadap *maqashid syari'ah*, peneliti menyarankan supaya penyaluran program Makan Bergizi Gratis dapat dipastikan keamanan makanan baik dari kelayakan makanan serta kualitas makanan untuk tetap terjaga sebelum diserahkan kepada penerima manfaat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* yaitu *hifz an-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-aql* demi mewujudkan generasi emas tahun 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173

Jurnal :

Affandi, F. (2022). *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlantar*. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 11(2), 323-335.

Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 300-311.

Andriyani, A., Baroroh Barir, S. K. M., Gz, M., Musiana, S. H. I., MM, M. K., Irianto, S. K. M., ... & Gz, M. (2024). *Kebijakan Dan Manajemen Program Gizi Masyarakat*. Cendikia mulia mandiri.

Anisa, S. K., Rohim, A. N., & Hasbi, D. S. (2021). Analisis pendistribusian ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di yayasan Indonesia mulia Bekasi. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(2), 1-28.

Anshori, M., & Iswati, S. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif: edisi 1*. Airlangga University Press.

Ardiansyah, A., & Albanna, F. (2022). Analisis Pemeliharaan pada Kendaraan Operasional PKP-PK di Bandar Udara Adi Soemarmo Solo. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 19-28.

Askandary, A. I., Rahman, A. Z., & Hanani, R. (2024). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik Melalui Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Dalam Upaya Penurunan Stunting Di Kelurahan Bandarahajo, Kecamatan Semarang Utara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-17.

- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2022). *Kota Surabaya dalam angka 2022*. BPS Kota Surabaya. <https://surabayakota.bps.go.id/publication/2022/02/25/12bdeec5a5d2b8f503a83a2c/kota-surabaya-dalam-angka-2022.html>
- Betan, A., Sofiantin, N., Sanaky, M. J., Primadewi, B. K., Arda, D., Kamaruddin, M. I., & AM, A. M. A. (2023). Kebijakan Kesehatan Nasional. *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423-5443.
- Disperindag Jatim. (2024). *Laporan Pemantauan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur Tahun 2024*. Surabaya: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- Dwijayanti, Avrina. "Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian." *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 2 (30 Desember 2024): 281–308. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i2.435>.
- Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6).
- Fattah, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 194-208.
- Hadi, Ahmad, Budiman Rusli, dan Mohammad Benny Alexandri. "DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TENTANG PANGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA." *Responsive* 2, no. 3 (10 Februari 2020): 122. <https://doi.org/10.24198/responsive.v2i3.26085>.
- Harahap, Solehuddin. "MAQASHID AL-SYARI'AH BERDASARKAN KEMASLAHATAN YANG DIPELIHARA DALAM HUKUM ISLAM" 6, no. 2 (2023).
- Hanafiah, N. (2024). Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia. *Integrated Education Journal*, 1(2), 112-125.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute

- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., ... & Lolang, E. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Indonesia, N. K., & RI, H. A. M. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. *Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*.
- ISTIQOMAH;, MIFTIA KHODIQOTUL. *SKRIPSI ANALISIS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KANTOR DESA BANJARSARI, KECAMATAN BOBOTSARI, KABUPATEN PURBALINGGA*. UNIVERSITAS TIDAR, 2024.
[//repositori.untidar.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D16807%26keywords%3D](https://repositori.untidar.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D16807%26keywords%3D).
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. “KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT” 15, no. 1 (2021).
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Maheran, S., Saiin, A., April, M., & Rizki, M. (2022). Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(01), 49-59.
- Merlinda, Ajeng Atikah, dan Yusmar Yusuf. “Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Tinjauan Dari Perspektif Sosiologi Pendidikan.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (1 Januari 2025): 1364–73. <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i2.1360>.
- Muhammad Syahrur, S. T., M.H. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media.

- Qomarrullah, Rifiy, Suratni Suratni, Lestari Wulandari S, dan Muhammad Sawir. “Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan.” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 2 (5 Maret 2025): 130–37. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.660>.
- Pradita, Yolana Anggun. “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN,” t.t.
- Putra, Danang Sagita, Indah Prabawati, S Sos, dan M Si. “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 1.1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN GERAKAN TUNTAS PENANGANAN GIZI BURUK (RESTU IBU),” t.t.
- Putra, D. (2017). Membangun Kembali Nilai-Nilai Dasar Keislaman sebagai Resolusi Konflik Ahmadiyah: Diskursus Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 2(01), 137-157.
- Ramadhan, A. M., Santoso, M. P. T., & Gustianti, N. A. (2024). Proses Sekuritisasi Isu Keamanan Non Tradisional dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Narkoba Internasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18495-18511.
- Riski, Petrus. Baca Artikel VOA Indonesia “Pemerintah Diminta Libatkan Kantin Sekolah dan UMKM untuk Program Makan Bergizi Gratis”. [Link](#). Diakses 31 Januari 2025.
- Rivai Zainal, V., Ismail, R., & Ahmad, W. (2022). *Sistem Ekonomi Islam Edisi 2 Mengislamkan Sistem Ekonomi Masyarakat Dan Memasyarakatkan Sistem Ekonomi Islam*.
- Rofiullah, A. H. (2024). Analisis Implementasi Prinsip Syariah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Lex Economica Journal*, 2(2),
- Rohman, A. (2022). Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban dalam Islam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 6(1),
- Shari, A. *Peran Ekonomi Kreatif Dalam Mentransformasi Ekonomi Masyarakat, Perspektif Nilai Maqashid*.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*.
- Suci Riskia, I. (2023). *Gambaran Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, dan Kejadian Wasting pada Balita Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa*. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

- Suiraoaka, I. P., ST, S., Fajar Saputra, S. K. M., Yuli Laraeni, S. K. M., Agustini, N. P., SKM, M. S., ... & Anis Ervina, S. S. T. (2024). *KESEHATAN MASYARAKAT UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Susanti, L., Handriyantini, E., & Hamzah, A. (2023). *Guru Kreatif Inovatif Era Merdeka Belajar*. Penerbit Andi.
- Syahid, A. (2020). Studi Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Perilaku Sopan Santun Siswa pada Kelas VIIIC SMP Negeri 18 Banjarmasin. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 6(4)
- United Nations Development Programme (UNDP). (2015). *UNDP Governance For Sustainable Development*. UNDP.
- United Nations Economic And Social Commission For Asia And The Pacific (UNESCAP). (2017). *What Is Good Governance?* UNESCAP.
- Wahab, D. A., Dewi Anggadini, S., Yunanto, R., & Sulistiyo Soegoto, D. (2023). *Ekosistem Bisnis & Transformasi Digital Perspektif Keberlanjutan Usaha Kecil Kuliner*.
- Wijaya, S. C., Mahendra, A. A., Hamdan, T. N., Ramdan, H., & Aditya, R. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik untuk Pemerintah Daerah: Development of Public Service Information Systems for Regional Government. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 3(1), 40-51.
- World Bank. (1992). *Governance And Development*. World Bank.
- Zarzani, T. R., Ismaidar, I., & Sirait, A. R. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik Medis oleh Dokter yang Bertugas Di Rumah Sakit. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5593-5604.

Wibesite :

- “5. BAB II.pdf.” t.t. Diakses 22 Mei 2025. <http://repository.iainkudus.ac.id/7047/5/5.%20BAB%20II.pdf>.
- “detail news.” Diakses 20 Mei 2025. <https://www.bgn.go.id/news/artikel/bgn-akan-memulai-program-mbg-secara-bertahap>.
- Dwijayanti, Avrina. “Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian.” *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 2 (2024): 281–308. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i2.435>.

- fabio.lopes@kompas.com, Fabio Maria Lopes Costa-. “Jumlah Siswa Diduga Keracunan Paket MBG di Cianjur Jadi 165 Orang.” Kompas.id, 26 April 2025. <https://www.kompas.id/artikel/jumlah-siswa-diduga-keracunan-paket-mbg-di-cianjur-jadi-165-orang>.
- Harahap, Solehuddin. *MAQASHID AL-SYARI'AH BERDASARKAN KEMASLAHATAN YANG DIPELIHARA DALAM HUKUM ISLAM*. 6, no. 2 (2023).
<https://jatim.jpnn.com>. “JPNN.com Jatim.” Diakses 23 Desember 2025. <https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/37289/mbg-di-smp-negeri-13-surabaya-diberhentikan-sementara-alasan-tak-diketahui>.
- <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>. 1 (2020).
- ISTIQOMAH;, MIFTIA KHODIQOTUL. *SKRIPSI ANALISIS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KANTOR DESA BANJARSARI, KECAMATAN BOBOTSARI, KABUPATEN PURBALINGGA*. UNIVERSITAS TIDAR, 2024. MAGELANG.
[//repositori.untidar.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D16807%26keywords%3D](https://repositori.untidar.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D16807%26keywords%3D).
- “Kepala Sekolah dan Dua Siswa di Karanganyar Diduga Keracunan MBG.” Diakses 6 Mei 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250429174012-20-1223999/kepala-sekolah-dan-dua-siswa-di-karanganyar-diduga-keracunan-mbg>.
- Kompasiana.com. “Optimalisasi Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Sosial dan Pembanguna Ekonomi Berdasarkan Maqashid Syariah.” KOMPASIANA, 27 Agustus 2024. <https://www.kompasiana.com/burhanirfany0402/66cd6073ed6415317e094a55/optimalisasi-ketahanan-pangan-untuk-kesejahteraan-sosial-dan-pembanguna-ekonomi-berdasarkan-maqashid-syariah>.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. *KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT*. 15, no. 1 (2021).
- “Maqashid Kesehatan dan Etika medis_FULLL.pdf.” t.t. Diakses 31 Mei 2025. https://digilib.iainkendari.ac.id/2045/1/Maqashid%20Kesehatan%20%20dan%20Etika%20medis%20_FULLL.pdf.
- Media, Kompas Cyber. “Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Sasar 20 Juta Penerima.” KOMPAS.com, 6 Januari 2025. <https://health.kompas.com/read/25A06090000568/program-makan-bergizi-gratis-dimulai-sasar-20-juta-penerima>.
- Merlinda, Ajeng Atikah, dan Yusmar Yusuf. “Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Tinjauan Dari Perspektif Sosiologi Pendidikan.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 2. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1360>.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *FILSAFAT HUKUM ISLAM*. t.t.

- Olenka. “Deretan Kasus Program Makan Siang Bergizi Gratis: Menuai Masalah Hingga Dihentikan di Sejumlah Wilayah.” 25 April 2025. <https://olenka.id/deretan-kasus-program-makan-siang-bergizi-gratis-menuai-masalah-hingga-dihentikan-di-sejumlah-wilayah>.
- Penulis, Tim, Dr Manotar Tampubolon, Dr Nelson Simanjuntak, dan Dr Fernando Silalahi. *BIROKRASI & GOOD GOVERNANCE*. t.t.
- Qomarrullah, Rifiy, Suratni Suratni, Lestari Wulandari S, dan Muhammad Sawir. “Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan.” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 2 (2025): 130–37. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i2.660>.
- Rawung, Meilita M, Herlina I S Wungouw, dan Damajanty H C Pangemanan. *Hubungan Status Gizi dengan Prestasi Belajar Siswa SD Katolik St Fransiskus Xaverius Kakaskasen Kota Tomohon*. t.t.
- Syahlillah, Ardiansyah Fajar. “Ombudsman Temukan Sayur MBG Basi di SMPN 13 Surabaya.” *IDN Times Jatim*, 26 Februari 2025. <https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/ombudsman-temukan-sayur-mbg-basi-di-smpn-13-surabaya-00-hc4tp-hnt0q2>.
- Tempo. “Sejumlah Daerah yang Laporkan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis | tempo.co.” 25 April 2025. <https://www.tempo.co/politik/sejumlah-daerah-yang-laporkan-kasus-keracunan-makan-bergizi-gratis-1247446>.
- Tribunnews.com. “Guru Sekolah Was-was Pendistribusian Menu Makan Bergizi Hambat Proses Belajar Siswa.” 10 Mei 2025. <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2025/01/07/guru-sekolah-was-was-pendistribusian-menu-makan-bergizi-hambat-proses-belajar-siswa>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara

1. SPPG Wonocolo

Gambar 1



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Syamsudin Duka, S.Sos sebagai Kepala SPPG Wonocolo terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sesuai Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 terkait Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis pada tanggal 9 September 2025 pukul 11.45 di Kantor SPPG Wonocolo.

Gambar 2



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Aurel sebagai Ahli Gizi SPPG Wonocolo terkait pemenuhan gizi, keamanan dan kualitas makanan pada SPPG Wonnocolo pada tanggal 9 September 2025 pukul 13.00 di Kantor SPPG Wonocolo.

Gambar 3



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Cahyo sebagai Kepala Dapur SPPG Wonocolo yang bertanggungjawab terkait bahan baku makanan dan kualitas bahan makanan di SPPG Wonocolo pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 10.00 di Kantor SPPG Wonocolo.

Gambar 4



Dokumentasi pemantauan dan pemorsian Menu MBG agar sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi di SPPG Wonocolo pada tanggal pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 08.00 di Kantor SPPG Wonocolo.

2. SPPG Rungkut

Gambar 5



Dokumentasi wawancara dengan Fadhilah Munawaroh sebagai Kepala SPPG Rungkut terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sesuai Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 terkait Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis pada tanggal 9 September 2025 pukul 15.00 di Kantor SPPG Rungkut..

3. Sekolah MTSN 3 Surabaya

Gambar 5



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Dra. Asmiati, M.Pd., sebagai Kepala Sekolah MTSN 3 Surabaya terkait penyaluran MBG di sekolah, pada tanggal 16 September 2025 pukul 09.00 di Kantor Sekolah MTSN 3 Surabaya

Gambar 6



Dokumentasi pengisian kuisisioner penelitian oleh Siswa MTSN 3 Surabaya sebagai penerima Manfaat program MBG pada tanggal 16 September 2025, pukul 11.00 Wib.

B. Data Wawancara

1. Wawancara SPPG Wonocolo

1. Bagaimana awal mulai pendirian SPPG di Kecamatan Wonocolo?

Jawaban :

Awal pendirian SPPG dimulai dari mitra atau yayasan mendaftarkan diri di mitra BGN pusat, yang mana nanti terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Petunjuk Teknis. Setelah melalui proses seleksi hingga akhir maka sebuah dapur itu bisa melaksanakan MBG akan diutus 1 SPPI yang dilatih oleh Kemenhan untuk menjalankan Makan Bergizi Gratis, pada proses dapur tersebut sudah dibentuk pegawai yang salah satunya yaitu Ahli Gizi dan Akuntan dengan total keseluruhan anggota kurang lebih 50 orang, dari 50 orang tersebut terbagi menjadi beberapa tugas yakni mulai dari persiapan, produksi/masak, pemorsian, pengantaran/driver dan pembersihan alat. Kegiatan proses mulai dari awal sampai akhir di SPPG Wonocolo ini berlangsung 24 jam secara berkesinambungan. Langkah awal yaitu persiapan dimulai dari sore hari untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan diolah dan dibersihkan untuk siap dimasak. Tahap masak dimulai setelah persiapan semua bahan telah disiapkan dan perkiraan tahap memasak sampai jam 3 dini hari untuk pengantaran pertama setelah itu lanjut ke tahap pemorsian yang mana hal ini yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Pengantaran pertama dilakukan pada jam 7 pagi dan pendistribusian kedua dilaksanakan pada jam 11 siang. Pendistribusian pagi meliputi tingkat TK hingga SD

sedangkan distribusi siang meliputi tingkat SMP dan SMA/SMK. Untuk hari Senin (sekali untuk Selasa dan Rabu) dan Kamis (sekali untuk Jum'at) di SPPG Wonocolo ada tambahan B3 yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan Balita. Dalam pembentukan SPPG itu memerlukan proses yang cukup panjang karena harus ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memulai program makan bergizi gratis ini. Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya yaitu terkait kelayakan tempat/bangunan yang paling kecil yaitu 400 meter dan tanah minimal 600 meter, dan kedua yaitu kelayakan alat yang digunakan yang mana telah diatur oleh BGN pusat

2. Siapa saja sasaran utama dari Program MBG ini? Bagaimana kriteria pemilihannya?

Jawaban :

Sasaran program Bergizi Gratis ini ditujukan kepada siswa mulai dari TK/PAUD hingga SMA/SMK, Ibu hamil, Ibu Menyusui, dan Balita. Untuk menentukan sasaran tersebut pihak SPPG berkoordinasi dengan pihak Koramil. Pihak SPPG dan Koramil berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk diminta data siswa. Pada awalnya banyak sekolah yang menolak untuk program ini karena masih belum ada arahan dari pihak Dinas Pendidikan. Radius penerima manfaat tidak boleh lebih dari 6km atau 30 menit dari dapur SPPG. Di Wonocolo sendiri penerima manfaat tidak melebihi dari radius jarak yang sudah ditetapkan dan sudah mencakup maksimal 4.000 penerima manfaat. Jika ada kelebihan

penerima manfaat harus berkoordinasi dengan BGN Pusat apakah dapat diterima atau tidak, SPPG Wonocolo merupakan satu satunya SPPG yang memiliki penerima manfaat 4000.

3. Apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur dampak program MBG?

Jawaban :

Ketika kita berbicara indikator keberhasilan yang menentukan apakah program ini berhasil atau tidak bukan dari pihak SPPG akan tetapi dilihat dari penerima manfaat tersebut apakah penerima manfaat ini senang dengan adanya Program MBG ini pada kenyataannya di Wonocolo banyak sekali siswa yang senang dengan adanya program ini, yang kedua apakah guru-guru tersebut ketika diberikan program MBG ini terbebani atau tidak selama ini di Wonocolo para guru tidak terbebani justru bersyukur dengan adanya program MBG ini. Yang ketiga apakah masyarakat yang berada di Wonocolo ini menerima dengan logowo atau tidak atau apakah terganggu atau tidak dengan adanya program MBG ini pada kenyataannya masyarakat tidak terganggu dengan adanya program ini justru mereka merasa terbantu. Dan yang terakhir apakah pegawai pegawai di SPPG ini di perhatikan kesehatannya dan keuangan mereka. Pada hari ini gaji pegawai SPPG di Wonocolo perharinya 130.000 perharinya maka dari gaji tersebut ada keluarga yang dinafkahi oleh mereka. Jadi pada intinya ketika kita berbicara indikator keberhasilan maka yang menilai langsung apakah program ini berhasil atau tidak yaitu penerima manfaat

4. Apa saja tahapan utama dalam pelaksanaan Program MBG mulai dari penetapan lokasi hingga pemberian bantuan?

Jawaban :

Dalam pembentukan SPPG itu memerlukan proses yang cukup panjang karena harus ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memulai program makan bergizi gratis ini. Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya yaitu terkait kelayakan tempat/bangunan yang paling kecil yaitu 400 meter dan tanah minimal 600 meter, dan kedua yaitu kelayakan alat yang digunakan yang mana telah diatur oleh BGN pusat

Kegiatan proses mulai dari awal sampai akhir di SPPG Wonocolo ini berlangsung 24 jam secara berkesinambungan. Langkah awal yaitu persiapan dimulai dari sore hari untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan diolah dan dibersihkan untuk siap dimasak. Tahap masak dimulai setelah persiapan semua bahan telah disiapkan dan perkiraan tahap memasak sampai jam 3 dini hari untuk pengantaran pertama setelah itu lanjut ke tahap pemorsian yang mana hal ini yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Pengantaran pertama dilakukan pada jam 7 pagi dan pendistribusian kedua dilaksanakan pada jam 11 saing. Pendistribusian pagi meliputi tingkat TK hingga SD sedangkan distribusi siang meliputi tingkat SMP dan SMA/SMK. Untuk hari Senin (sekaligus untuk Selasa dan Rabu) dan Kamis(sekaligus untuk Jum'at) di SPPG Wonocolo ada tambahan B3 yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan Balita.

5. Bagaimana mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Program MBG di lapangan?

Jawaban :

Dalam kegiatan evaluasi SPPG Wonocolo dilakukan setiap minggu, dalam tiap Divisi terdapat Leader yang mengatur dan tiap akhir pekan para leader tersebut berkumpul untuk membahas kendala yang dialami dalam minggu ini dengan harapan di minggu selanjutnya tidak ada kendala yang terulang kembali. Untuk kepihak sekolah Kepala SPPG melakukan pemantauan tiap 2 minggu sekali dengan menanyakan apakah dalam dua minggu terakhir terdapat keluhan yang terjadi. Pada saat kepala SPPG turun langsung ke lapangan beliau selalu menegaskan bahwa makanan program ini tidak gratis hal ini dibayar oleh masyarakat melalui pajak dll, maka dari itu para penerima manfaat wajib mengkritisi apakah makanan yang diberikan layak atau tidak, ketika ada makanan yang tidak sesuai harap melaporkan kepada pihak SPPG

6. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pemantauan dan bagaimana upaya mengatasinya?

Jawaban :

Tiap suatu pekerjaan pasti terdapat tantangan yang dihadapi biasanya terjadi konflik antara mitra dengan SPPI karena terdapat perselisihan persepsi terus kemudian yang kedua bagaimana kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sekolah, yang ketiga bagaimana kita harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar apakah terganggu atau

tidak mulai dari sampah atau limbah dari proses pemasakan dll. Tantangan terpenting yakni bagaimana kita menggunakan anggaran sebaik mungkin mengingat program makan bergizi ini terbatas akan tetapi Kepala SPPG Wonocolo yakin bahwa dapat meyakinkan bahwa makanan yang disajikan kepada penerima manfaat sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan gizi yang dibutuhkan. Da anggaran harus bisa diserap dengan baik contoh dalam petunjuk teknis pemberian susu diwajibkan seminggu sekali akan tetapi di Wonocolo pemberian susu dibagikan setidaknya 3-4 kali dalam seminggu, kenapa demikian karena pihak SPPG mengoptimalkan anggaran

7. Bagaimana mekanisme pencairan Anggaran dalam program MBG ini?

Jawaban :

Ketika SPPG tersebut dinyatakan untuk bisa memulai program maka pendanaannya sudah berada di yayasan yang dikirim oleh BGN, untuk mencairkan anggaran tersebut yaitu harus ada kedua belah pihak yaitu yayasan dan Pihak SPPG Pencairan anggaran di SPPG dilaksanakan dalam 2 minggu sekali tiap pengajuan proposal dihitung dengan jumlah penerima manfaat, yang mana dalam program makan bergizi gratis ini diberikan anggaran 10.000 untuk porsi besar dan 8.000 untuk porsi kecil. Dan tiap penerima manfaat diberikan anggaran 15.000 maka untuk sisa dari anggaran tersebut diperuntukkan gaji karyawan, biaya operasional meliputi pembelian gas, listrik, air dll

8. Bagaimana Badan Gizi Nasional memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program ini?

Jawaban :

Dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis sebelum makanan di distribusikan ada beberapa kontrol untuk memastikan yang pertama dalam persiapan kita pilih bahan makanan yang baik sehingga dipastikan bahan yang digunakan layak untuk diolah, kemudian yang kedua pada bagian masak setelah semua makanan sudah matang sebelum masuk dalam pemorsian di kontrol atau dicicipi apakah makan yang sudah dimasak layak untuk dikonsumsi. Setelah makanan di distribusikan ke sekolah salah satu pihak sekolah ada yang menjadi koordinator MBG, yang mana nantinya koordinator ini yang harus mengontrol apakah makanan sebelum dibagikan terhadap siswa layak dikonsumsi atau tidak. Dan untuk menghindari keracunan di SPPG Wonocolo menggunakan air galon dalam memasak karena jika menggunakan air biasa takut tercampur dengan bahan kimia. Ketika ada kejadian keracunan terdapat kemungkinan dapur tersebut tidak bisa beroperasi lagi atau ditutup yang mana nantinya akan diambil sampel diperiksa apakah nantinya ada kelalaian dari pihak dapur yang secara hukum bisa dipidana, yang kedua tanggungjawab negara terhadap penerima manfaat

9. Apa standar gizi yang diterapkan dalam penyusunan menu MBG?

Jawaban :

Dalam kebutuhan gizinya ini harus seimbang dan bervariasi untuk melihat gizinya tersebut terpenuhi bisa dilihat dari AKG (angka kecukupan Gizi) menurut usia dan jenis kelamin. Untuk mengatasi rasa bosan maka menu yang disajikan harus bervariasi dan dalam satu bulan sebisa mungkin menggunakan menu yang berbeda-beda. Untuk memastikan dalam satu menu tersebut memenuhi kebutuhan gizi maka setelah pemasakan maka harus ditimbang sesuai dengan kebutuhan gizi. Dan untuk menghindari penerima manfaat yang terkena alergi maka sebelum dimulai pihak sekolah mendata siswa yang terkena alergi dan di Wonocolo sendiri menghindari makanan seafood karena hal tersebut yang rawan terkena alergi

2. Wawancara SPPG Rungkut

1. Apa alasan utama Badan Gizi Nasional meluncurkan Program Makan Bergizi (MBG) pada tahun 2025?

Jawaban :

Alasan utama program MBG adalah untuk mencukupkan dan meningkatkan asupan gizi masyarakat terutama anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta mencegah stunting untuk mewujudkan visi pemerintah yaitu “Menuju Indonesia Emas 2045” selain itu juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan membantu perekonomian bagi petani, nelayan, peternak dan umkm lainnya.

2. Siapa saja sasaran utama dari Program MBG ini? Bagaimana kriteria pemilihannya?

Jawaban :

Sasaran utama program MBG adalah Peserta didik PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SLB, pesantren, sekolah keagamaan, dan pendidikan layanan khusus, Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita . Hal tersebut juga mempertimbangkan lokasi sekolah atau posyandu dalam radius 6 km dari SPPG atau dengan waktu tempuh maksimal 20 menit

3. Apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur dampak program MBG?

Jawaban :

Indikator keberhasilan program MBG adalah terlaksananya kegiatan di 5000 SPPG pada Agustus 2025, serta sudah mencapai 20jt penerima manfaat bulan Agustus 2025, sesuai standar yang ditetapkan.

4. Apa saja tahapan utama dalam pelaksanaan Program MBG mulai dari penetapan lokasi hingga pemberian bantuan?

Jawaban :

Tahapan pelaksanaan program MBG meliputi

- 1) Verifikasi Pengajuan atau pengecekan dokumen awal pengajuan titik lokasi SPPG di portal Mitra BGN
- 2) Proses Persiapan yaitu mitra mulai membangun SPPG dan melapor progress secara berkala
- 3) Verifikasi Persiapan yaitu verifikator mengecek kesiapan final
- 4) Penentuan Petugas Survey
- 5) Survey Lapangan yaitu SPPI datang langsung ke lokasi dan finalisasi data penerima manfaat
- 6) Penentuan Kelayakan yaitu komite melakukan rapat penilaian kelayakan
- 7) Berita Acara Verifikasi Validasi
- 8) Penentuan KA SPPG yaitu Biro SDM menunjuk SPPI sebagai KA SPPG
- 9) Pembuatan Virtual Account dan DIALUR
- 10) Pengajuan Proposal

11) Dana Bantuan Pemerintah Cair

12) Pelaksanaan/operasional MBG

5. Bagaimana mekanisme pemberian dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah dalam program ini?

Jawaban :

- 1) SPPG mengajukan proposal kegiatan yg berisi Rencana anggaran biaya pelaksanaan program kepada BGN 2 Minggu sampai 1 bulan sebelum tanggal pelaksanaan pemberian MBG
 - 2) jika dana sudah cair ke rekening bersama yg di bentuk oleh BGN, SPPG wajib melaksanakan program pemberian makan bergizi gratis kepada penerima manfaat.
 - 3) Semua pembelanjaan terkait bahan wajib langsung dilakukan dari rekening VA ke rekening supplier
 - 4) Dan bukti transaksi disimpan untuk bahan laporan pertanggung jawaban keuangan
6. Bagaimana mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Program MBG di lapangan?

Jawaban :

Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program MBG melibatkan sistem berjenjang yang melibatkan komite monitoring dari tingkat pusat hingga sekolah, pengumpulan data oleh BPS melalui survei, pelaporan berkala dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan mekanisme pendanaan digital yang memungkinkan pemantauan real-time

oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Inspektorat Utama untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas program. Terdapat Sistem yg digunakan dalam sehari² untuk pelaporan harian, pelaporan dokumen hingga evaluasi pelaksanaan yakni Dialur dan tauwas care. Dialur untuk pelaporan harian dan dokumen terkait. Dan tauwas care terkait pemantauan dan pengawasan SPPG.

7. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pemantauan dan bagaimana upaya mengatasinya?

Jawaban :

Tantangan utama dalam pemantauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meliputi kendala infrastruktur dan transportasi di daerah terpencil, keterbatasan pasokan dan harga bahan baku, pendanaan tunggal yang bergantung pada APBN, risiko korupsi dan penyalahgunaan dana, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Upaya mengatasinya meliputi pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan real-time, diversifikasi pendanaan dan kemitraan strategis, pembentukan tim verifikasi independen, penguatan aturan akuntabilitas dan sanksi, peningkatan transparansi melalui sistem laporan terintegrasi, serta evaluasi dan pemantauan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak pemangku kepentingan.

8. Menurut anda, bagaimana program MBG berkontribusi pada penurunan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia?

Jawaban:

Dengan Penyediaan makanan bergizi secara teratur untuk kelompok rentan, seperti ibu hamil, menyusui, balita, dan anak sekolah, sehingga menjamin asupan gizi yang cukup untuk pertumbuhan optimal dan mendukung program pemerintah untuk menciptakan Generasi Emas Indonesia 2045.

9. Apa standar gizi yang diterapkan dalam penyusunan menu MBG? Bagaimana SPPG memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program ini?

Jawaban :

Standar gizi pada program makanan bergizi gratis didasarkan pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019, di mana porsi makanan menyumbang 20-25% kebutuhan harian untuk sarapan dan 30-35% untuk makan siang. Untuk memastikan keamanan pangan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar operasional prosedur (SOP) ketat, uji keamanan makanan sebelum penyaluran, penerapan prinsip higiene sanitasi pangan, dan pengawasan oleh tenaga kesehatan lingkungan, termasuk melalui sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk penyedia jasa boga.

10. Apakah pelaksanaan program MBG di Kecamatan Rungkut sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh BGN?

Jawaban:

Untuk saat ini sudah sesuai petunjuk teknis mulai dari layout dapur yg sudah sesuai standar serta penerimaan manfaat sudah sesuai mulai dari paud sampai SMA dan B3

3. Wawancara MTSN 3 Surabaya

1. Bagaimana sekolah Anda mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis ini?

Jawaban :

Pada awal November tahun 2024 MTSN 03 Surabaya mendapat informasi bahwasanya pada awal tahun nanti akan menerima Makan Bergizi Gratis, sebelum memulai program ini pihak sekolah diminta untuk mendata jumlah semua siswa dan mendata siswa yang mempunyai alergi makanan dll. Program ini mulai terlaksana Makan Bergizi Gratis di MTSN 03 Surabaya terhitung sejak tanggal 13 Januari 2025. Waktu pendistribusian Makan Bergizi Gratis ke sekolah ini pada waktu itu dikawal oleh pihak Dinas Kesehatan, Kelurahan, Polsek sekitar dan termasuk Dandim koramil, karena hal ini masih awal dan para siswa dan pihak sekolah sangat antusias pada waktu itu dalam menyambut program MBG ini. Proses pengantaran di sekolah ini dimulai pada jam 10.00 yang mana nantinya makanan ini akan dibagikan setelah jam istirahat siswa. Untuk prosedur penerimaan sekolah ini membentuk tim piket yang melibatkan guru yang bertugas menerima, mengecek, dan mendata apakah makanan tersebut sudah sesuai dan layak makan. Setelah diterima makanan disimpan di dalam ruangan yang aman dan bersih. Pada saat makanan dibagikan para siswa juga mendapat tugas tiap kelas perwakilan untuk mengambil makanan yang mana hal ini sudah diatur dan pada saat makan bersama didampingi oleh wali kelas masing-masing. Setelah makan bersama jika

ada sisa makanan tidak boleh dibuang ke tempat sampah hal ini akan menjadi bahan pertimbangan pihak SPPG nantinya apakah siswa suka atau tidak suka dengan menu tersebut. Para siswa juga ditugaskan untuk mengembalikan tempat makan kedalam tempat yang sudah disediakan yang mana nantinya guru piket akan mengecek jumlah tempat makan apakah sudah sesuai dengan jumlah awal. Setelah itu, dari pihak SPPG sekitar jam 14.00 akan mengambil tempat makan tersebut.

Untuk bulan puasa pemberian Makan Bergizi Gratis sedikit berbeda yaitu dengan menggunakan menu kering contoh seperti roti, buah dan takjil. yang mana dalam pembagian ini dilakukan pada siang hari sekitar jam 14.00.

2. Apa peran sekolah dalam penyusunan pelaksanaan dan bagaimana sekolah mengelola, memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan?

Jawaban :

Sekolah memfasilitasi terkait program MBG ini artinya sekolah hanya sekedar menjadi penerima manfaat dalam program MBG ini. sekolah membentuk tim piket yang melibatkan guru yang bertugas menerima, mengecek, dan mendata apakah makanan tersebut sudah sesuai dan layak makan. Setelah diterima makanan disimpan di dalam ruangan yang aman dan bersih. Pada saat makanan dibagikan para siswa juga mendapat tugas tiap kelas perwakilan untuk mengambil makanan yang mana hal ini sudah diatur dan pada saat makan bersama didampingi oleh wali kelas masing-masing.

3. Apakah terdapat pelatihan atau sosialisasi untuk staf sekolah terkait program MBG?

Jawaban :

Sebelum pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Kepala SPPG berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur Makan Bergizi Gratis ini mulai dari membawa peralatan makan sendiri, cuci tangan sebelum makan dan tidak boleh merusak tempat makan. Tak hanya itu sekolah juga melakukan sosialisasi terhadap wali murid terkait penerimaan program Makan Bergizi Gratis ini. Pihak Dinas Kesehatan juga turut menghimbau kepada pihak sekolah bahwa sebelum makanan dibagikan harus dikontrol terlebih dahulu untuk menghindari keracunan dll.

4. Bagaimana koordinasi antara sekolah dengan pihak SPPG dalam pelaksanaan program?

Jawaban :

Sebelum makanan didistribusikan pihak SPPG berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait jam pengantaran makanan dan pihak SPPG setiap hari mengirimkan google form untuk diisi oleh pihak sekolah guna sebagai laporan transparansi bahwa telah dilaksanakan program Makan Bergizi Gratis dihari itu.

5. Apa tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam menjalankan Program MBG dan bagaimana mengatasinya?

Jawaban :

sejauh ini disekolah ini masih belum ada tantangan yang intens dalam program Makan Bergizi Gratis. Akan tetapi pada awal mula program berlangsung ada beberapa menu yang kurang dalam artian kurang buah dan lauk. Hal ini pihak sekolah langsung disampaikan oleh pihak SPPG dan pada waktu itu juga langsung diganti dengan menu yang lengkap

6. Apakah program ini cocok untuk jangka panjang?

Jawaban :

Program ini sangat cocok untuk waktu jangka panjang karena mengingat banyak siswa terbantu dengan adanya program ini dan selama ini makan mereka tidak terpantau akan tetapi dengan adanya program Makan bergizi Gratis ini bisa memantau asupan gizi siswa terlebih presiden kita memiliki visi Indonesia emas tahun 2045 nanti saya kira dengan adanya program ini dengan terpenuhinya gizi dari masing-masing anak dapat diharapkan membawa Indonesia emas nantinya.

C. Data Kuisiorer

Nama : Shafa Dian P
Absen : 26
Kelas : 8A

A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Sejak adanya program makanan bergizi gratis, apa yang paling kamu rasakan saat belajar di kelas setelah makan siang?
 - a. Tidak ada perubahan sama sekali.
 - b. Merasa lebih mengantuk dan malas.
 - ☒ c. Merasa lebih fokus dan tidak mudah lelah.
 - d. Merasa sakit perut dan tidak nyaman.
2. Bagaimana pengaruh program makanan gratis ini terhadap semangatmu untuk datang ke sekolah setiap hari?
 - a. Semangatku untuk datang ke sekolah berkurang.
 - b. Semangatku untuk datang ke sekolah meningkat.
 - ☒ c. Hanya berpengaruh pada saat ada menu makanan favorit saja.
 - d. Tidak ada pengaruh sama sekali.
3. Selain manfaat untuk dirimu sendiri, apa manfaat lain yang kamu lihat dari program ini untuk teman-teman di sekolah?
 - a. Tidak ada manfaat bagi teman-teman.
 - b. Membuat kantin sekolah sepi.
 - ☒ c. Membantu teman-teman yang kesulitan membeli makanan.
 - d. Membuat siswa lebih sering jajan di luar.
4. Bagaimana program ini memengaruhi kebiasaan makanku di rumah?
 - ☒ a. Aku lebih ingin mencoba makanan sehat seperti yang disajikan di sekolah.
 - b. Aku menjadi lebih suka jajan makanan instan.
 - c. Aku menjadi lebih pilih-pilih makanan di rumah.
 - d. Aku tidak ingin makan lagi di rumah karena sudah kenyang di sekolah.
5. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan dampak kesehatanmu setelah ada program makanan bergizi?

- a. Aku lebih sering sakit.
 - ☒ b. Berat badanku bertambah drastis.
 - c. Aku merasa lebih sehat dan lebih berenergi.
 - d. Aku tidak merasakan perbedaan apa pun.
6. Jika kamu bisa memberikan saran untuk program makanan bergizi di sekolah, apa yang akan kamu sarankan?
- a. Menambah porsi makanan agar bisa makan sepuasnya.
 - b. Hanya menyajikan makanan cepat saji.
 - ☒ c. Memvariasikan menu agar tidak bosan.
 - d. Menghilangkan program ini karena tidak penting.
7. Bagaimana program ini memengaruhi interaksi sosialmu dengan teman-teman?
- a. Aku jadi sering bertengkar dengan teman karena menu makanan.
 - b. Aku jarang berbicara dengan teman-teman saat jam makan.
 - c. Aku lebih sering makan sendiri.
 - ☒ d. Aku dan teman-teman lebih sering makan bersama dan bertukar cerita.
8. Jika kamu merasa tidak suka dengan menu makanan yang disajikan, apa yang akan kamu lakukan?
- a. Membawa makanan sendiri dari rumah.
 - ☒ b. Meminta guru atau pihak sekolah untuk mengganti menu.
 - c. Tidak makan sama sekali.
 - d. Menyembunyikan makanan yang tidak disukai.
9. Menurutmu, apakah makanan bergizi gratis ini bisa membantu meningkatkan nilai akademismu? Mengapa?
- a. Ya, karena otak yang sehat membutuhkan nutrisi untuk bekerja dengan baik.
 - b. Tidak, karena nilai hanya bergantung pada seberapa rajin kita belajar.
 - ☒ c. Ya, karena dengan makanan gratis aku tidak perlu memikirkan jajan lagi.
 - d. Tidak, karena makanan tidak ada hubungannya dengan pelajaran.
10. Jika ada temanmu yang bilang bahwa dia tidak butuh program makanan ini, apa yang akan kamu jawab?
- ☒ a. Program ini penting untuk semua siswa, termasuk kamu, karena menjamin nutrisi yang seimbang.
 - b. Dia tidak boleh bilang begitu, karena harus menghargai program ini.
 - c. Ya sudah, biar aku saja yang dapat makanan gratisnya.
 - d. Mungkin dia benar, karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda.

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Bagaimana pendapatmu tentang makanan gratis yang disediakan di sekolah? Apakah kamu suka dengan program makan bergizi gratis ini?

Jawaban : ya, karna membantu orang tua agar tdk membawakan bekal lagi untuk jam istirahat selanjutnya dan uang jajan akan semakin hemat

2. Apakah kamu suka dengan menu makanan yang diberikan? Kenapa?

Jawaban : ya, karna ada menu yg enak dan berfarian untuk sehari-hari

3. Bagaimana makanan bergizi ini mempengaruhi kesehatan dan energimu saat belajar?

Jawaban : ya dgn Program ini kesehatan ku semakin membaik dan berat badan ku bertambah drastis dgn adanya mbg yang awal nya badan ku kekurangan nutrisi sekarang semakin bertambah

4. apakah program makan bergizi ini penting untuk anak-anak di sekolah? Mengapa?

Jawaban : ya, karna ada makanan gratis (makanan bergizi) aku tidak perlu memikirkan uang jajan lagi karna dgn Program ini kita bisa menghemat uang

Semoga Setiap hari mbg selanjutnya menu nya akan semakin enak dan Setiap mbg setiap hari ada susu dan menu yang lezat

Terima kasih Pak Prabowo

😊😊

dan Tim Katering untuk masak makanan mbg dgn baik
Terima kasih

Nama : Siti Sofa Hermanto
Absen : 27
Kelas : 8A

- A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1. Sejak adanya program makanan bergizi gratis, apa yang paling kamu rasakan saat belajar di kelas setelah makan siang?
 - a. Tidak ada perubahan sama sekali.
 - b. Merasa lebih mengantuk dan malas.
 - ☒ c. Merasa lebih fokus dan tidak mudah lelah.
 - d. Merasa sakit perut dan tidak nyaman.
 2. Bagaimana pengaruh program makanan gratis ini terhadap semangatmu untuk datang ke sekolah setiap hari?
 - a. Semangatku untuk datang ke sekolah berkurang.
 - ☒ b. Semangatku untuk datang ke sekolah meningkat.
 - c. Hanya berpengaruh pada saat ada menu makanan favorit saja.
 - d. Tidak ada pengaruh sama sekali.
 3. Selain manfaat untuk dirimu sendiri, apa manfaat lain yang kamu lihat dari program ini untuk teman-teman di sekolah?
 - a. Tidak ada manfaat bagi teman-teman.
 - b. Membuat kantin sekolah sepi.
 - ☒ c. Membantu teman-teman yang kesulitan membeli makanan.
 - d. Membuat siswa lebih sering jajan di luar.
 4. Bagaimana program ini memengaruhi kebiasaan makanku di rumah?
 - ☒ a. Aku lebih ingin mencoba makanan sehat seperti yang disajikan di sekolah.
 - b. Aku menjadi lebih suka jajan makanan instan.
 - c. Aku menjadi lebih pilih-pilih makanan di rumah.
 - d. Aku tidak ingin makan lagi di rumah karena sudah kenyang di sekolah.
 5. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan dampak kesehatanmu setelah ada program makanan bergizi?

- a. Aku lebih sering sakit.
 - b. Berat badanku bertambah drastis.
 - ☒ c. Aku merasa lebih sehat dan lebih berenergi.
 - d. Aku tidak merasakan perbedaan apa pun.
6. Jika kamu bisa memberikan saran untuk program makanan bergizi di sekolah, apa yang akan kamu sarankan?
- a. Menambah porsi makanan agar bisa makan sepuasnya.
 - b. Hanya menyajikan makanan cepat saji.
 - ☒ c. Memvariasikan menu agar tidak bosan.
 - d. Menghilangkan program ini karena tidak penting.
7. Bagaimana program ini memengaruhi interaksi sosialmu dengan teman-teman?
- a. Aku jadi sering bertengkar dengan teman karena menu makanan.
 - b. Aku jarang berbicara dengan teman-teman saat jam makan.
 - c. Aku lebih sering makan sendiri.
 - ☒ d. Aku dan teman-teman lebih sering makan bersama dan bertukar cerita.
8. Jika kamu merasa tidak suka dengan menu makanan yang disajikan, apa yang akan kamu lakukan?
- ☒ a. Membawa makanan sendiri dari rumah.
 - b. Meminta guru atau pihak sekolah untuk mengganti menu.
 - c. Tidak makan sama sekali.
 - d. Menyembunyikan makanan yang tidak disukai
9. Menurutmu, apakah makanan bergizi gratis ini bisa membantu meningkatkan nilai akademismu? Mengapa?
- a. Ya, karena otak yang sehat membutuhkan nutrisi untuk bekerja dengan baik.
 - ☒ b. Tidak, karena nilai hanya bergantung pada seberapa rajin kita belajar.
 - c. Ya, karena dengan makanan gratis aku tidak perlu memikirkan jajan lagi.
 - d. Tidak, karena makanan tidak ada hubungannya dengan pelajaran.
10. Jika ada temanmu yang bilang bahwa dia tidak butuh program makanan ini, apa yang akan kamu jawab?
- a. Program ini penting untuk semua siswa, termasuk kamu, karena menjamin nutrisi yang seimbang.
 - ☒ b. Dia tidak boleh bilang begitu, karena harus menghargai program ini.
 - c. Ye sudah, biar aku saja yang dapat makanan gratisnya.
 - d. Mungkin dia benar, karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda.

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Bagaimana pendapatmu tentang makanan gratis yang disediakan di sekolah? Apakah kamu suka dengan program makan bergizi gratis ini?

Jawaban : Sangat Baik karena bisa menghemat uang supaya tidak membeli jajan lagi , dan saya suka dengan program ini

2. Apakah kamu suka dengan menu makanan yang diberikan? Kenapa?

Jawaban : Saya suka dengan menu nya , asal menu nya bervariasi

3. Bagaimana makanan bergizi ini mempengaruhi kesehatan dan energimu saat belajar?

Jawaban : menjadi lebih semangat karena yang awalnya lapar menjadi tidak lapar lagi

4. apakah program makan bergizi ini penting untuk anak-anak di sekolah? Mengapa?

Jawaban : Penting , karena semisal ada anak-anak kelaparan karena tidak membawa uang saku / bekal mereka bisa terisi perutnya dengan makan bergizi ini

Nama : Zahrotul Fadila
Absen : 31
Kelas : 8A

A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Sejak adanya program makanan bergizi gratis, apa yang paling kamu rasakan saat belajar di kelas setelah makan siang?
 - a. Tidak ada perubahan sama sekali.
 - b. Merasa lebih mengantuk dan malas.
 - ☒ c. Merasa lebih fokus dan tidak mudah lelah.
 - d. Merasa sakit perut dan tidak nyaman.
2. Bagaimana pengaruh program makanan gratis ini terhadap semangatmu untuk datang ke sekolah setiap hari?
 - a. Semangatku untuk datang ke sekolah berkurang.
 - ☒ b. Semangatku untuk datang ke sekolah meningkat.
 - c. Hanya berpengaruh pada saat ada menu makanan favorit saja.
 - d. Tidak ada pengaruh sama sekali.
3. Selain manfaat untuk dirimu sendiri, apa manfaat lain yang kamu lihat dari program ini untuk teman-teman di sekolah?
 - a. Tidak ada manfaat bagi teman-teman.
 - b. Membuat kantin sekolah sepi.
 - ☒ c. Membantu teman-teman yang kesulitan membeli makanan.
 - d. Membuat siswa lebih sering jajan di luar.
4. Bagaimana program ini memengaruhi kebiasaan makanku di rumah?
 - ☒ a. Aku lebih ingin mencoba makanan sehat seperti yang disajikan di sekolah.
 - b. Aku menjadi lebih suka jajan makanan instan.
 - c. Aku menjadi lebih pilih-pilih makanan di rumah.
 - d. Aku tidak ingin makan lagi di rumah karena sudah kenyang di sekolah.
5. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan dampak kesehatanmu setelah ada program makanan bergizi?

- a. Aku lebih sering sakit.
b. Berat badanku bertambah drastis.
☒ c. Aku merasa lebih sehat dan lebih berenergi.
d. Aku tidak merasakan perbedaan apa pun.
6. Jika kamu bisa memberikan saran untuk program makanan bergizi di sekolah, apa yang akan kamu sarankan?
- a. Menambah porsi makanan agar bisa makan sepuasnya.
b. Hanya menyajikan makanan cepat saji.
☒ c. Memvariasikan menu agar tidak bosan.
d. Menghilangkan program ini karena tidak penting.
7. Bagaimana program ini memengaruhi interaksi sosialmu dengan teman-teman?
- a. Aku jadi sering bertengkar dengan teman karena menu makanan.
b. Aku jarang berbicara dengan teman-teman saat jam makan.
c. Aku lebih sering makan sendiri.
☒ d. Aku dan teman-teman lebih sering makan bersama dan bertukar cerita.
8. Jika kamu merasa tidak suka dengan menu makanan yang disajikan, apa yang akan kamu lakukan?
- a. Membawa makanan sendiri dari rumah.
b. Meminta guru atau pihak sekolah untuk mengganti menu.
☒ c. Tidak makan sama sekali.
d. Menyembunyikan makanan yang tidak disukai
9. Menurutmu, apakah makanan bergizi gratis ini bisa membantu meningkatkan nilai akademismu? Mengapa?
- ☒ a. Ya, karena otak yang sehat membutuhkan nutrisi untuk bekerja dengan baik.
b. Tidak, karena nilai hanya bergantung pada seberapa rajin kita belajar.
c. Ya, karena dengan makanan gratis aku tidak perlu memikirkan jajan lagi.
d. Tidak, karena makanan tidak ada hubungannya dengan pelajaran.
10. Jika ada temanmu yang bilang bahwa dia tidak butuh program makanan ini, apa yang akan kamu jawab?
- a. Program ini penting untuk semua siswa, termasuk kamu, karena menjamin nutrisi yang seimbang.
☒ b. Dia tidak boleh bilang begitu, karena harus menghargai program ini.
c. Ya sudah, biar aku saja yang dapat makanan gratisnya.
d. Mungkin dia benar, karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda.

Suara

27
rdi

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Bagaimana pendapatmu tentang makanan gratis yang disediakan di sekolah? Apakah kamu suka dengan program makan bergizi gratis ini?

Jawaban : Suka, karena makan-makanannya enak

2. Apakah kamu suka dengan menu makanan yang diberikan? Kenapa?

Jawaban : Suka, tapi kadang bosan dengan menu nya, dan kadang makanannya ada ulat dan belatung, serta buah-buahan yg sudah busuk

3. Bagaimana makanan bergizi ini mempengaruhi kesehatan dan energimu saat belajar?

Jawaban : Perut terasa lebih kenyang dan semangat untuk belajar

4. apakah program makan bergizi ini penting untuk anak-anak di sekolah? Mengapa?

Jawaban : penting, karena semua siswa-siswi di sekolah membutuhkan makan-makanan yang seimbang sehingga tubuh menjadi sehat

Nama : Agustin Sucia Rahma
Absen : 4
Kelas : 3A

- A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1. Sejak adanya program makanan bergizi gratis, apa yang paling kamu rasakan saat belajar di kelas setelah makan siang?
 - a. Tidak ada perubahan sama sekali.
 - b. Merasa lebih mengantuk dan malas.
 - ☒ c. Merasa lebih fokus dan tidak mudah lelah.
 - d. Merasa sakit perut dan tidak nyaman.
 2. Bagaimana pengaruh program makanan gratis ini terhadap semangatmu untuk datang ke sekolah setiap hari?
 - a. Semangatku untuk datang ke sekolah berkurang.
 - ☒ b. Semangatku untuk datang ke sekolah meningkat.
 - c. Hanya berpengaruh pada saat ada menu makanan favorit saja.
 - d. Tidak ada pengaruh sama sekali.
 3. Selain manfaat untuk dirimu sendiri, apa manfaat lain yang kamu lihat dari program ini untuk teman-teman di sekolah?
 - a. Tidak ada manfaat bagi teman-teman.
 - b. Membuat kantin sekolah sepi.
 - ☒ c. Membantu teman-teman yang kesulitan membeli makanan.
 - d. Membuat siswa lebih sering jajan di luar.
 4. Bagaimana program ini memengaruhi kebiasaan makanku di rumah?
 - ☒ a. Aku lebih ingin mencoba makanan sehat seperti yang disajikan di sekolah.
 - b. Aku menjadi lebih suka jajan makanan instan.
 - c. Aku menjadi lebih pilih-pilih makanan di rumah.
 - d. Aku tidak ingin makan lagi di rumah karena sudah kenyang di sekolah.
 5. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan dampak kesehatanmu setelah ada program makanan bergizi?

- a. Aku lebih sering sakit.
 - ☒ b. Berat badanku bertambah drastis.
 - c. Aku merasa lebih sehat dan lebih berenergi.
 - d. Aku tidak merasakan perbedaan apa pun.
6. Jika kamu bisa memberikan saran untuk program makanan bergizi di sekolah, apa yang akan kamu sarankan?
- ☒ a. Menambah porsi makanan agar bisa makan sepuasnya.
 - b. Hanya menyajikan makanan cepat saji.
 - ☒ c. Memvariasikan menu agar tidak bosan.
 - d. Menghilangkan program ini karena tidak penting.
7. Bagaimana program ini memengaruhi interaksi sosialmu dengan teman-teman?
- a. Aku jadi sering bertengkar dengan teman karena menu makanan.
 - b. Aku jarang berbicara dengan teman-teman saat jam makan.
 - c. Aku lebih sering makan sendiri.
 - ☒ d. Aku dan teman-teman lebih sering makan bersama dan bertukar cerita.
8. Jika kamu merasa tidak suka dengan menu makanan yang disajikan, apa yang akan kamu lakukan?
- ☒ a. Membawa makanan sendiri dari rumah.
 - b. Meminta guru atau pihak sekolah untuk mengganti menu.
 - c. Tidak makan sama sekali.
 - d. Menyembunyikan makanan yang tidak disukai
9. Menurutmu, apakah makanan bergizi gratis ini bisa membantu meningkatkan nilai akademismu? Mengapa?
- ☒ a. Ya, karena otak yang sehat membutuhkan nutrisi untuk bekerja dengan baik.
 - b. Tidak, karena nilai hanya bergantung pada seberapa rajin kita belajar.
 - c. Ya, karena dengan makanan gratis aku tidak perlu memikirkan jajan lagi.
 - d. Tidak, karena makanan tidak ada hubungannya dengan pelajaran.
10. Jika ada temanmu yang bilang bahwa dia tidak butuh program makanan ini, apa yang akan kamu jawab?
- a. Program ini penting untuk semua siswa, termasuk kamu, karena menjamin nutrisi yang seimbang.
 - b. Dia tidak boleh bilang begitu, karena harus menghargai program ini.
 - ☒ c. Ya sudah, biar aku saja yang dapat makanan gratisnya.
 - d. Mungkin dia benar, karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda.

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Bagaimana pendapatmu tentang makanan gratis yang disediakan di sekolah? Apakah kamu suka dengan program makan bergizi gratis ini?

Jawaban : Saya sangat suka dengan program makan bergizi ini

2. Apakah kamu suka dengan menu makanan yang diberikan? Kenapa?

Jawaban : Saya suka, karena menu nya ber variasi

3. Bagaimana makanan bergizi ini mempengaruhi kesehatan dan energimu saat belajar?

Jawaban : makan bergizi membuatku lebih semangat saat belajar,
untuk kesehatan tidak ada perubahan

4. apakah program makan bergizi ini penting untuk anak-anak di sekolah? Mengapa?

Jawaban : Penting, karena sangat membantu teman yang kesulitan membeli makan

Nama : Nafa Ayu Ananhi
Absen : 20
Kelas : IPA

A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Sejak adanya program makanan bergizi gratis, apa yang paling kamu rasakan saat belajar di kelas setelah makan siang?
 - a. Tidak ada perubahan sama sekali.
 - ☒ b. Merasa lebih mengantuk dan ~~malas~~.
 - c. Merasa lebih fokus dan tidak mudah lelah.
 - d. Merasa sakit perut dan tidak nyaman.
2. Bagaimana pengaruh program makanan gratis ini terhadap semangatmu untuk datang ke sekolah setiap hari?
 - a. Semangatku untuk datang ke sekolah berkurang.
 - ☒ b. Semangatku untuk datang ke sekolah meningkat.
 - c. Hanya berpengaruh pada saat ada menu makanan favorit saja.
 - d. Tidak ada pengaruh sama sekali.
3. Selain manfaat untuk dirimu sendiri, apa manfaat lain yang kamu lihat dari program ini untuk teman-teman di sekolah?
 - a. Tidak ada manfaat bagi teman-teman.
 - b. Membuat kantin sekolah sepi.
 - ☒ c. Membantu teman-teman yang kesulitan membeli makanan.
 - d. Membuat siswa lebih sering jajan di luar.
4. Bagaimana program ini memengaruhi kebiasaan makanku di rumah?
 - ☒ a. Aku lebih ingin mencoba makanan sehat seperti yang disajikan di sekolah.
 - b. Aku menjadi lebih suka jajan makanan instan.
 - c. Aku menjadi lebih pilih-pilih makanan di rumah.
 - d. Aku tidak ingin makan lagi di rumah karena sudah kenyang di sekolah.
5. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan dampak kesehatanmu setelah ada program makanan bergizi?

- a. Aku lebih sering sakit.
 - b. Berat badanku bertambah drastis.
 - c. Aku merasa lebih sehat dan lebih berenergi.
 - ☒ d. Aku tidak merasakan perbedaan apa pun.
6. Jika kamu bisa memberikan saran untuk program makanan bergizi di sekolah, apa yang akan kamu sarankan?
- a. Menambah porsi makanan agar bisa makan sepuasnya.
 - b. Hanya menyajikan makanan cepat saji.
 - ☒ c. Memvariasikan menu agar tidak bosan.
 - d. Menghilangkan program ini karena tidak penting.
7. Bagaimana program ini memengaruhi interaksi sosialmu dengan teman-teman?
- a. Aku jadi sering bertengkar dengan teman karena menu makanan.
 - b. Aku jarang berbicara dengan teman-teman saat jam makan.
 - c. Aku lebih sering makan sendiri.
 - ☒ d. Aku dan teman-teman lebih sering makan bersama dan bertukar cerita.
8. Jika kamu merasa tidak suka dengan menu makanan yang disajikan, apa yang akan kamu lakukan?
- a. Membawa makanan sendiri dari rumah.
 - b. Meminta guru atau pihak sekolah untuk mengganti menu.
 - ☒ c. Tidak makan sama sekali.
 - d. Menyembunyikan makanan yang tidak disukai
9. Menurutmu, apakah makanan bergizi gratis ini bisa membantu meningkatkan nilai akademismu? Mengapa?
- a. Ya, karena otak yang sehat membutuhkan nutrisi untuk bekerja dengan baik.
 - ☒ b. Tidak, karena nilai hanya bergantung pada seberapa rajin kita belajar.
 - c. Ya, karena dengan makanan gratis aku tidak perlu memikirkan jajan lagi.
 - d. Tidak, karena makanan tidak ada hubungannya dengan pelajaran.
10. Jika ada temanmu yang bilang bahwa dia tidak butuh program makanan ini, apa yang akan kamu jawab?
- a. Program ini penting untuk semua siswa, termasuk kamu, karena menjamin nutrisi yang seimbang.
 - ☒ b. Dia tidak boleh bilang begitu, karena harus menghargai program ini.
 - c. Ya sudah, biar aku saja yang dapat makanan gratisnya.
 - d. Mungkin dia benar, karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda.

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Bagaimana pendapatmu tentang makanan gratis yang disediakan di sekolah? Apakah kamu suka dengan program makan bergizi gratis ini?

Jawaban : Sangat baik . soalnya dapat menghemat uang jajan juga kadang sudah bawa bekal tapi masih ingin beli jajan krna pulang sekolahnya yg aja sore . Kalau dibidang suka sih suka tapi terkadang ada menu yg zanh soalnya saya pernah mendapat yg ada cacingnya tapi saya tetap suka untuk Program MBG

2. Apakah kamu suka dengan menu makanan yang diberikan? Kenapa?

Jawaban : Suka ,tapi kadang bosan soalnya menu nya itu 2 aja Pernah 1 minggu 2x dapat menu yang sama . jadi menu makannya harus lebih bervariasi soalnya terkadang ada yg dimakan & tidak di .
Makan Oleh siswa

3. Bagaimana makanan bergizi ini mempengaruhi kesehatan dan energimu saat belajar?

Jawaban : Bagi saya untuk energi mungkin tak mempengaruhi soalnya kebanyakan bikin ngantuk dan malas soalnya kekenyangan . Tapi untuk kesehatan mungkin sedikit berpengaruh .

4. apakah program makan bergizi ini penting untuk anak-anak di sekolah? Mengapa?

Jawaban : Penting , karna untuk membantu anak² yg mungkin kurang sehat makanannya di rumah , dan juga dapat membantu utk menambah gizi anak yg kurang . Tapi kadang harus memperhatikan bahan² / bahan baku untuk makan

Pihak
MBGnya juga

Tapi Love you MBG

*MBG sampelulus

*Hidupmbg



Sarangheyo

Jangan last mbg
nanti kangen

mbg

*PA sayang mbg

*menunya ganti²

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Imron

Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 31 Mei 2003

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Lempeni, Dusun Kebonan RT 41/RW 10,
Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

Email : imronfahur86@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- MIN 2 LUMAJANG: 2009-2015
- SMPN 1 TEMPEH : 2015-2018
- SMAN 1 TEMPEH : 2018-2021
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025